

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

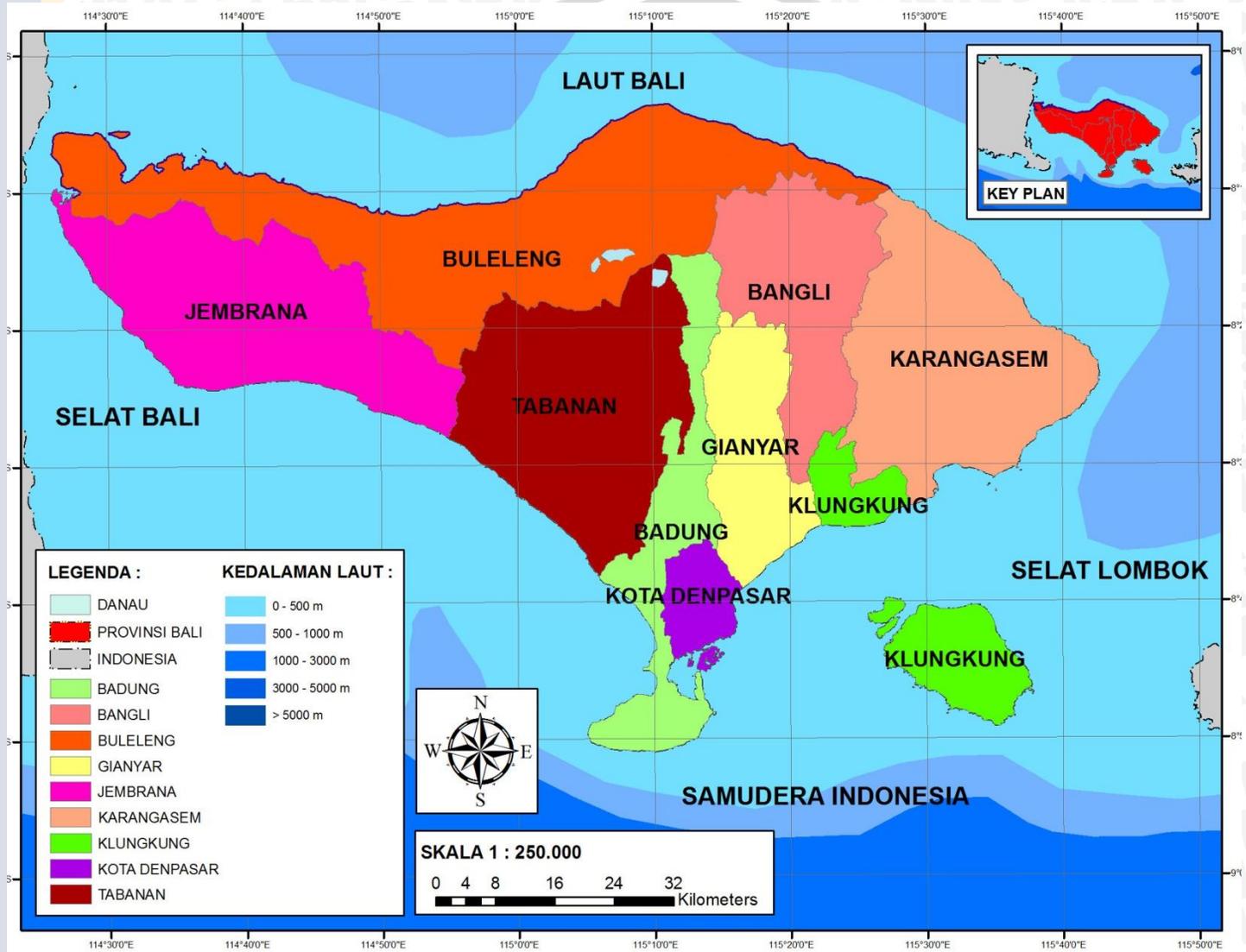
#### 4.1 Gambaran Umum Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang di kenal dengan sebutan Pulau Dewata. Provinsi Bali dengan Ibu kotanya adalah Kota Denpasar, yang meliputi Pulau Bali, Pulau Nusa Penida serta beberapa Pulau-pulau kecil lainnya dengan luas wilayah 5.636,66 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai mencapai 529 km. Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, 55 Kecamatan dan 701 Desa/Kelurahan, 3.563 Banjar/Dusun/Lingkungan. Provinsi Bali berada pada posisi 8°3'40" dan 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" dan 115°42'40" Bujur Timur, dengan batas administrasi (**Gambar 4.1**) :

Sebelah Utara	: Laut Bali;
Sebelah Timur	: Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia; dan
Sebelah Barat	: Selat Bali (Provinsi Jawa Timur).

Pulau Bali memiliki letak yang sangat strategis, karena menghubungkan lalu lintas laut dan darat antara Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara.

Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai 4.104.900 jiwa, dengan kepadatan 728 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencarian penduduk beraneka ragam yang meliputi pekerjaan sebagai petani, pengerajin, pedagang dan berbagai jasa khususnya bidang kepariwisataan. Pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduk dan sebagian besar penduduk Provinsi Bali adalah petani.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

#### 4.1.1 Gambaran Karakteristik Kependudukan Provinsi Bali

Untuk mengetahui karakteristik sosial budaya Provinsi Bali dapat dilihat dari segi komposisi penduduk dan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

**Tabel 4.1 Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 (jiwa)**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan/ km <sup>2</sup>
			Pria	Wanita	Jumlah		
1.	Buleleng	1.365,88	320.000	322.300	642.300	99,29	470
2.	Jembrana	841,80	133.900	135.900	269.800	98,53	321
3.	Karangasem	839,54	203.400	203.200	406.600	100,10	484
4.	Tabanan	839,33	215.100	218.200	433.300	98,58	516
5.	Bangli	520,81	112.000	109.300	221.300	102,47	425
6.	Badung	418,52	307.400	295.300	602.700	104,10	1.440
7.	Gianyar	368,00	247.500	243.000	490.500	101,85	1.333
8.	Klungkung	315,00	86.500	88.300	174.800	97,96	555
9.	Denpasar	127,78	440.900	422.700	863.600	104,31	6.758
	<b>Bali</b>	<b>5.636,66</b>	<b>2.066.700</b>	<b>2.038.200</b>	<b>4.104.900</b>	<b>101,40</b>	<b>728</b>
	2013	5.636,66	2.042.000	2.014.300	4.056.300	101,38	720
	2012	5.636,66	2.017.000	1.990.200	4.007.200	100,73	654

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015

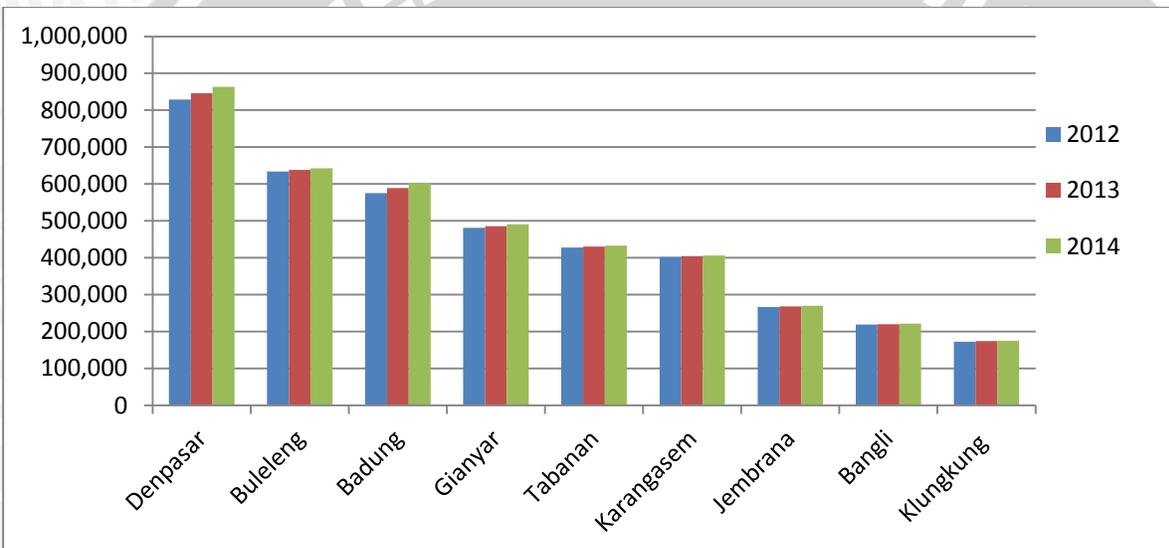
Berdasarkan **Tabel 4.1** dapat dilihat bahwa Provinsi Bali mempunyai luas wilayah 5.636,66 km<sup>2</sup> dengan peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 2012-2014 sebanyak 74 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kabupaten terluas di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah sebesar 1.365,88 km<sup>2</sup> atau sebesar 24,23% dari luas Provinsi Bali. Sementara untuk jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Denpasar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali. Jumlah penduduk Kota Denpasar sebesar 863.600 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin sebesar 104,31 (yang berarti bahwa setiap 100 orang wanita terdapat 104,31 pria) dan kepadatan penduduk sebesar 6.758 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Denpasar paling tinggi di Provinsi Bali karena selain sebagai Ibu Kota Provinsi, luas wilayah Kota Denpasar tergolong paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

Jumlah penduduk Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Bali  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (ribu jiwa)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	828.900	846.200	863.600	2,08	2,05	2,07
2.	Buleleng	634.300	638.300	642.300	0,63	0,62	0,62
3.	Badung	575.000	589.000	602.700	2,43	2,32	2,38
4.	Gianyar	481.200	486.000	490.500	0,99	0,92	0,96
5.	Tabanan	427.800	430.600	433.300	0,65	0,62	0,64
6.	Karangasem	402.200	404.300	406.600	0,52	0,56	0,54
7.	Jembrana	266.200	268.000	269.800	0,67	0,67	0,67
8.	Bangli	218.700	220.000	221.300	0,59	0,59	0,59
9.	Klungkung	172.900	173.900	174.800	0,57	0,51	0,54
<b>Bali</b>		<b>4.007.200</b>	<b>4.056.300</b>	<b>4.104.900</b>	<b>1,22</b>	<b>1,19</b>	<b>1,21</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Bali  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (ribu jiwa)**

Berdasarkan **Tabel 4.2** terlihat bahwa Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya, jumlah penduduk tahun 2014 saja sebesar 4.104.900 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan jumlah penduduk pertahun sebesar 1,21%. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Denpasar, di mana jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 863.600 jiwa, dengan rata-rata persentase peningkatan jumlah penduduk pertahun sebesar 2,07%. Rata-rata persentase peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata persentase peningkatan jumlah penduduk Provinsi Bali. Namun, rata-rata persentase peningkatan jumlah penduduk paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan 2,38%. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Klungkung dengan jumlah

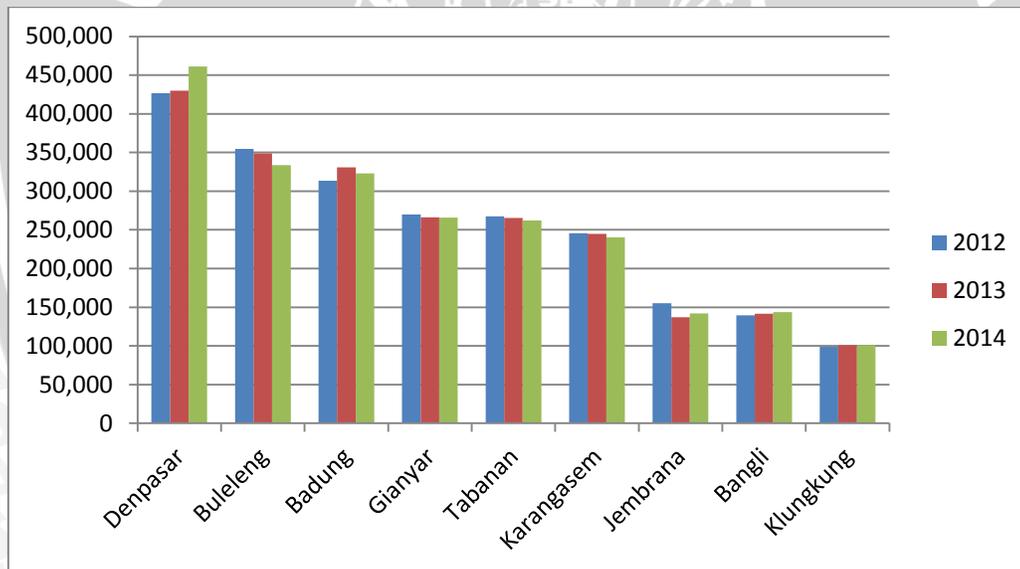
penduduk sebesar 174.800 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,54%. Rata-rata persentase peningkatan Kabupaten Klungkung sama dengan Kabupaten Karangasem.

Jumlah penduduk Provinsi Bali yang bekerja sesuai lapangan usaha menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.3**

**Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	426.602	429.844	461.135	0,75	7,27	4,01
2.	Buleleng	354.746	348.703	333.594	- 1,70	- 4,33	- 3,01
3.	Badung	313.338	330.897	322.913	5,60	- 2,41	1,59
4.	Gianyar	269.947	266.288	265.787	- 1,35	- 0,18	- 0,77
5.	Tabanan	267.428	265.197	262.006	- 0,83	- 1,20	- 1,01
6.	Karangasem	245.770	244.648	240.451	- 0,45	- 1,71	- 1,08
7.	Jembrana	154.980	137.223	142.086	- 11,45	3,54	- 3,95
8.	Bangli	139.430	141.551	143.857	1,52	1,62	1,57
9.	Klungkung	98.834	100.703	100.803	1,89	0,09	0,99
	<b>Bali</b>	<b>2.271.075</b>	<b>2.265.054</b>	<b>2.272.632</b>	<b>- 0,26</b>	<b>0,33</b>	<b>0,03</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

Berdasarkan **Tabel 4.3** dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali sebesar 2.272.632 jiwa pada tahun 2014 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,03%. Di mana, pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar 461.135 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 4,01%, jauh lebih tinggi dari rata-rata persentase peningkatan Provinsi Bali. Sementara itu, pada tahun 2014 penyerapan

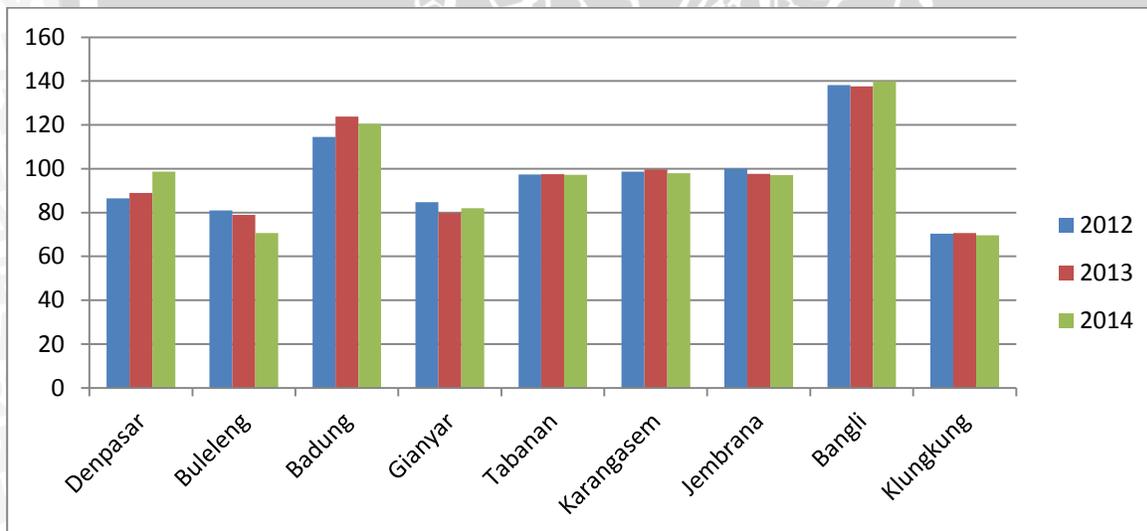
tenaga kerja terendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 100.803 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,99%. Namun, penyerapan tenaga kerja Kabupaten Klungkung masih lebih baik dari pada Kabupaten Jembrana, di mana Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dengan rata-rata persentase penurunan sebesar 3,95.

Perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.4**

**Tabel 4.4 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	86,50	88,88	98,71	2,38	9,82	6,10
2.	Buleleng	81,02	78,91	70,66	- 2,10	- 8,25	- 5,18
3.	Badung	114,56	123,78	120,47	9,21	- 3,30	2,95
4.	Gianyar	84,77	79,85	81,91	- 4,91	2,05	- 1,42
5.	Tabanan	97,36	97,43	97,16	0,06	- 0,26	- 0,09
6.	Karangasem	98,66	99,61	97,94	0,95	- 1,66	- 0,35
7.	Jembrana	99,90	97,68	97,05	- 2,22	- 0,63	- 1,42
8.	Bangli	138,17	137,57	139,93	- 0,60	2,36	0,88
9.	Klungkung	70,31	70,60	69,59	0,28	- 1,00	- 0,35
	<b>Bali</b>	<b>92,95</b>	<b>93,21</b>	<b>93,10</b>	<b>0,25</b>	<b>- 0,10</b>	<b>0,07</b>

Sumber: Hasil Analisis tahun 2016



**Gambar 4.4 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

Berdasarkan **Tabel 4.4** dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 93,10% dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,07%. Perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 139,93%

dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,88% lebih tinggi dari persentasi Provinsi Bali. Namun, rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kota Denpasar dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 6,10%. Sedangkan, perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja paling rendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 69,59% dengan rata-rata persentase penurunan sebesar 0,35%. Untuk rata-rata persentase terjadi penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 5,18%.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Ekonomi Provinsi Bali

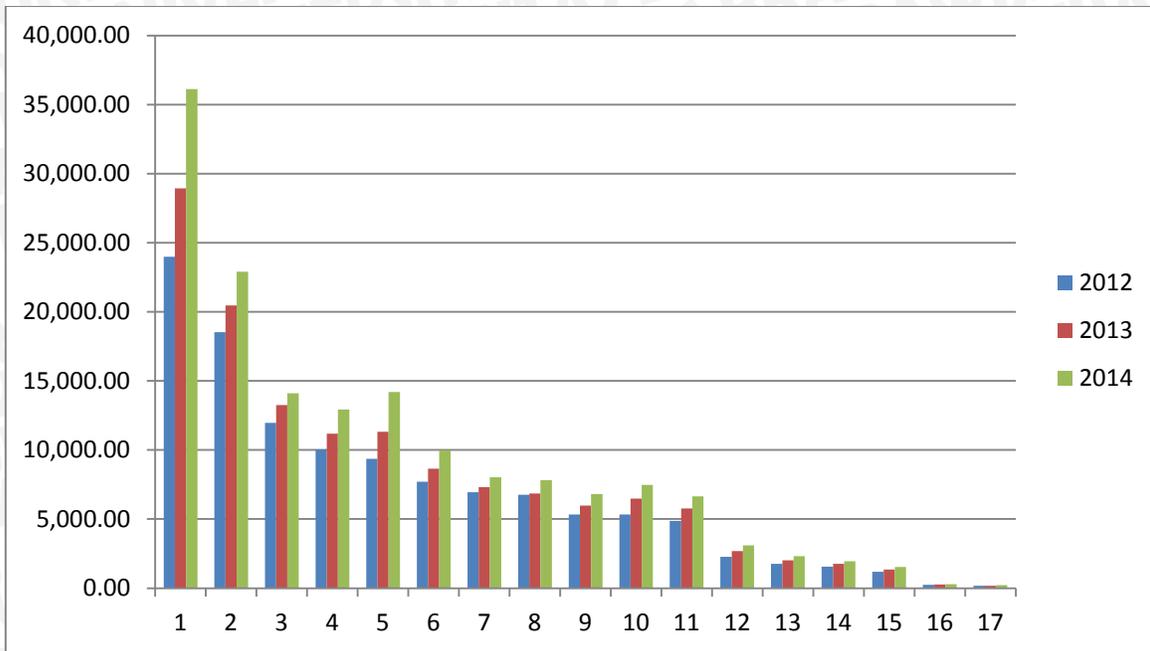
Kondisi perekonomian di Provinsi Bali berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 realisasi penerimaan mencapai Rp 4,58 trilyun. Sementara itu, belanja daerah Provinsi Bali pada tahun anggaran yang sama mencapai Rp 4,49 trilyun. Alokasi dana APBD digunakan untuk kepentingan pelayanan publik termasuk di dalamnya untuk anggaran kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan Provinsi Bali adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Provinsi Bali PAD masih menjadi sumber penerimaan rutin terbesar, yaitu sebesar Rp 2,92 trilyun atau memberi kontribusi sekitar 63,80% dari total penerimaan. PAD tersebut didominasi oleh pajak daerah, yaitu sebesar Rp 2,52 trilyun atau sebesar 86,20%.

Selain melihat APBD, alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya adalah PDRB. Menurut Bali Dalam Angka tahun 2015 BAB XII Pendapatan Regional Provinsi Bali menyebutkan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2014 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Bali. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014, di mana pada tahun 2012 jumlah PDRB dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum sebesar Rp 23.975,78 (miliar) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 36.111,29 (miliar). Data tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.5**

**Tabel 4.5 PDRB Provinsi Bali Atas Dasar  
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2014 (miliar rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	23.975,78	28.936,18	36.111,29	20,68	24,79	22,74
2.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.518,18	20.450,71	22.899,52	10,43	11,97	11,20
3.	Konstruksi	11.959,01	13.258,59	14.114,26	10,86	6,45	8,66
4.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.036,40	11.173,40	12.937,60	11,32	15,78	13,55
5.	Transportasi dan Pergudangan	9.364,60	11.310,70	14.203,20	20,78	25,57	23,17
6.	Industri Pengolahan	7.699,34	8.656,36	9.984,34	12,42	15,34	13,88
7.	Informasi dan Komunikasi	6.938,73	7.312,44	8.034,80	5,38	9,87	7,63
8.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	6.761,45	6.845,97	7.828,08	1,25	14,34	7,79
9.	Real Estat	5.330,94	5.966,63	6.813,22	11,92	14,18	13,05
10.	Jasa Pendidikan	5.322,81	6.484,15	7.465,41	21,81	15,13	18,47
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.864,87	5.772,73	6.647,93	18,66	15,16	16,91
12.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.269,72	2.673,58	3.090,47	17,79	15,59	16,69
13.	Jasa Lainnya	1.771,28	2.016,72	2.315,34	13,85	14,80	14,33
14.	Pertambangan dan Penggalan	1.548,33	1.758,25	1.955,76	13,55	11,23	12,39
15.	Jasa Perusahaan	1.198,61	1.344,01	1.534,46	12,13	14,17	13,15
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	246,48	262,98	286,67	6,69	9,00	7,85
17.	Pengadaan Listrik dan Gas	180,88	175,65	225,95	-2,89	28,63	12,87
<b>PDRB</b>		<b>117.987,40</b>	<b>134.399,05</b>	<b>156.448,28</b>	<b>13,90</b>	<b>16,40</b>	<b>15,15</b>

Sumber: PDRB Provinsi Bali tahun 2015



**Gambar 4.5 PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2014 (miliar rupiah)**

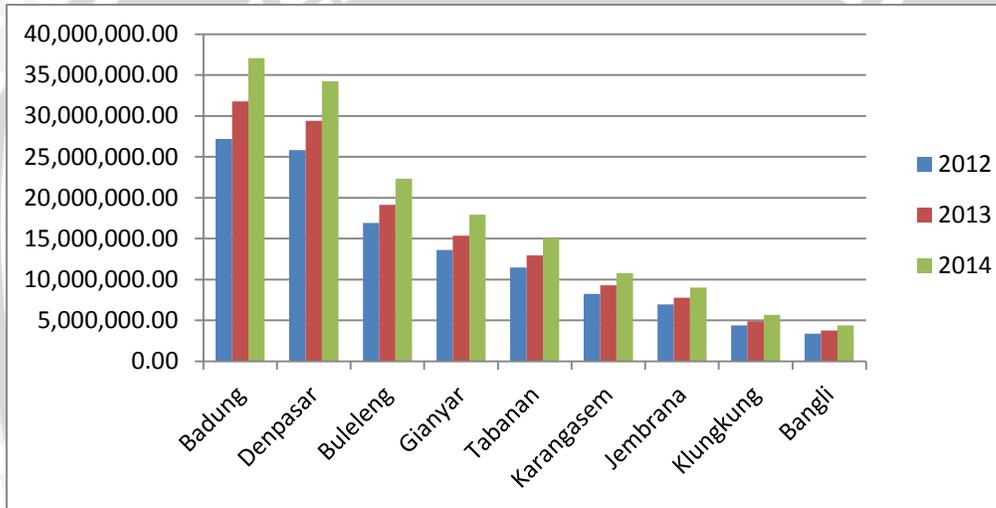
Berdasarkan **Tabel 4.5** PDRB Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 156.448,28 (miliar rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 15,15%. Dari semua lapangan usaha tersebut, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum pada tahun 2014 menduduki peringkat pertama di mana menyumbang sebesar 36.111,29 (miliar rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 22,74%. Sedangkan, penyumbang PDRB Provinsi Bali paling sedikit pada tahun 2014 adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 225,95 (miliar rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 12,87%. Namun, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 23,17%. Sementara itu, untuk rata-rata persentase peningkatan paling rendah terdapat pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 7,63%.

Sementara itu, PDRB Provinsi Bali bila dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.6**

**Tabel 4.6 PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	27.200.747,5	31.790.085,4	37.062.824,3	16,87	16,58	16,72
2.	Denpasar	25.819.231,1	29.389.254,9	34.208.828,9	13,82	16,39	15,11
3.	Buleleng	16.927.300,8	19.144.313,1	22.339.136,5	13,09	16,68	14,89
4.	Gianyar	13.604.852,2	15.370.797,0	17.912.552,2	12,98	16,53	14,75
5.	Tabanan	11.470.346,1	12.962.311,3	15.062.086,9	13,00	16,19	14,60
6.	Karangasem	8.231.550,0	9.293.065,9	10.785.066,0	12,89	16,05	14,47
7.	Jembrana	6.972.949,7	7.769.853,8	9.019.716,8	11,42	16,08	13,75
8.	Klungkung	4.397.748,3	4.899.877,4	5.676.419,3	11,41	15,84	13,63
9.	Bangli	3.362.677,7	3.779.486,8	4.381.648,8	12,39	15,93	14,16
	<b>Bali</b>	<b>117.987.403,4</b>	<b>134.399.045,6</b>	<b>156.448.279,7</b>	<b>13,90</b>	<b>16,40</b>	<b>15,15</b>

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota tahun 2015



**Gambar 4.6 PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

Berdasarkan **Tabel 4.6** dapat dilihat bila Kabupaten Badung memiliki PDRB tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2014 saja sebesar 37.062.824,3 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 16,72%. Sementara itu, Kabupaten Bangli menjadi Kabupaten dengan PDRB paling kecil di Provinsi Bali pada tahun 2014 saja sebesar 4.381.648,8 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 14,16%. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling kecil terdapat pada Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 13,63%.

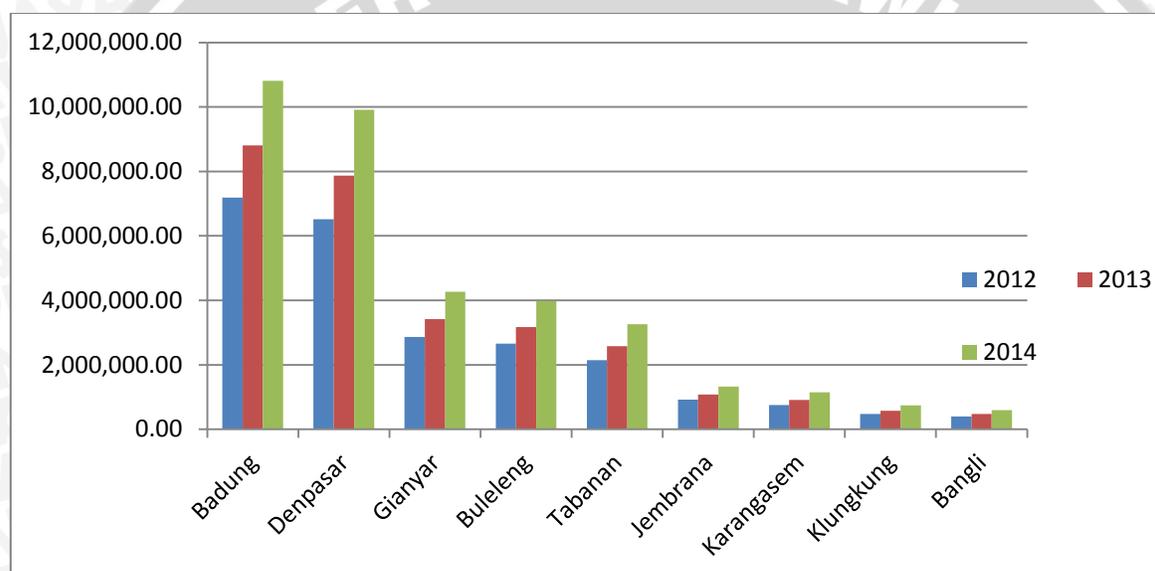
Untuk mengetahui PDRB Provinsi Bali jika dilihat dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum yang dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada

**Tabel 4.7**

**Tabel 4.7 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	7.186.658,8	8.807.667,9	10.815.279,8	22,55	22,79	22,67
2.	Denpasar	6.519.877,9	7.870.764,7	9.908.704,4	20,71	25,89	23,30
3.	Gianyar	2.869.042,1	3.414.180,9	4.270.932,3	19,00	25,09	22,04
4.	Buleleng	2.661.856,5	3.172.753,8	3.976.744,1	19,19	25,34	22,26
5.	Tabanan	2.142.102,5	2.577.088,5	3.262.806,4	20,30	26,60	23,45
6.	Jembrana	920.075,4	1.074.369,8	1.327.112,1	16,79	23,52	20,14
7.	Karangasem	753.516,9	910.867,0	1.150.656,2	20,88	26,32	23,60
8.	Klungkung	476.819,2	579.103,8	746.517,1	21,45	28,90	25,18
9.	Bangli	399.864,0	475.036,8	590.586,4	18,79	24,32	21,56
	<b>Bali</b>	<b>23.975.781,3</b>	<b>28.936.183,2</b>	<b>36.111.298,8</b>	<b>20,68</b>	<b>24,79</b>	<b>22,74</b>

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota tahun 2015



**Gambar 4.7 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

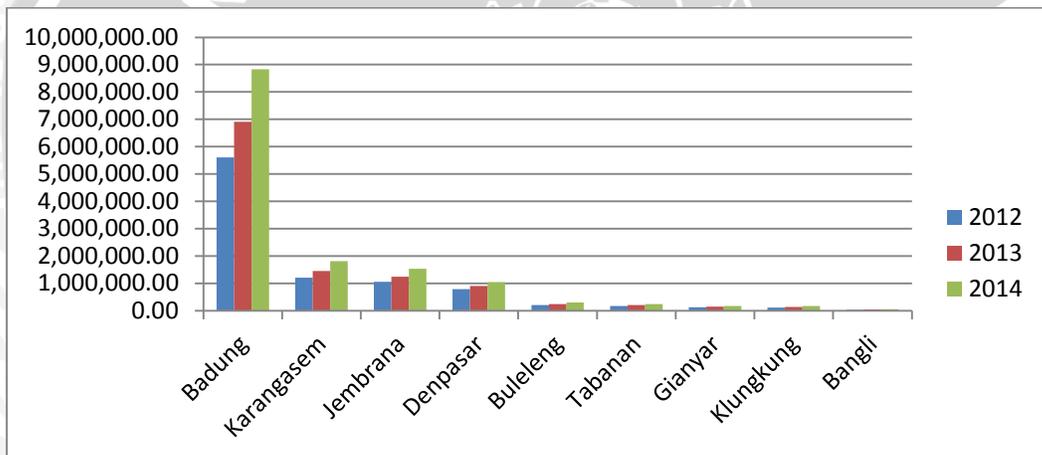
Berdasarkan **Tabel 4.7** terlihat bila Kabupaten Badung masih menjadi tumpuan Provinsi Bali dalam hal pendapatan dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum, di mana pada tahun 2014 saja menyumbang sebesar 10.815.279,8 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase sebesar 22,67%. Sementara itu, untuk penyumbang paling sedikit adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 590.586,4 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 21,56%. Sedangkan, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 25,18%. Untuk PDRB Provinsi Bali dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum pada tahun 2014 saja sebesar 36.111.298,8 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 22,74%.

Untuk mengetahui PDRB Provinsi Bali jika dilihat dari Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.8**

**Tabel 4.8 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	5.610.455,2	6.913.400,6	8.831.238,2	23,22	27,74	25,48
2.	Karangasem	1.205.436,2	1.450.502,0	1.820.720,7	20,33	25,52	22,92
3.	Jembrana	1.063.822,4	1.241.712,5	1.538.797,8	16,72	23,92	20,32
4.	Denpasar	795.101,1	902.921,2	1.052.803,7	13,56	16,59	15,08
5.	Buleleng	215.197,7	249.710,5	299.768,4	16,03	20,04	18,04
6.	Tabanan	177.362,9	206.156,0	243.605,8	16,23	18,16	17,19
7.	Gianyar	128.475,7	147.882,6	174.262,6	15,10	17,83	16,47
8.	Klungkung	122.144,8	143.278,6	174.935,1	17,30	22,09	19,69
9.	Bangli	39.921,7	47.495,5	57.792,8	18,97	21,68	20,32
	<b>Bali</b>	<b>9.364.595,8</b>	<b>11.310.696,3</b>	<b>14.203.195,1</b>	<b>20,78</b>	<b>25,57</b>	<b>23,17</b>

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota tahun 2015



**Gambar 4.8 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

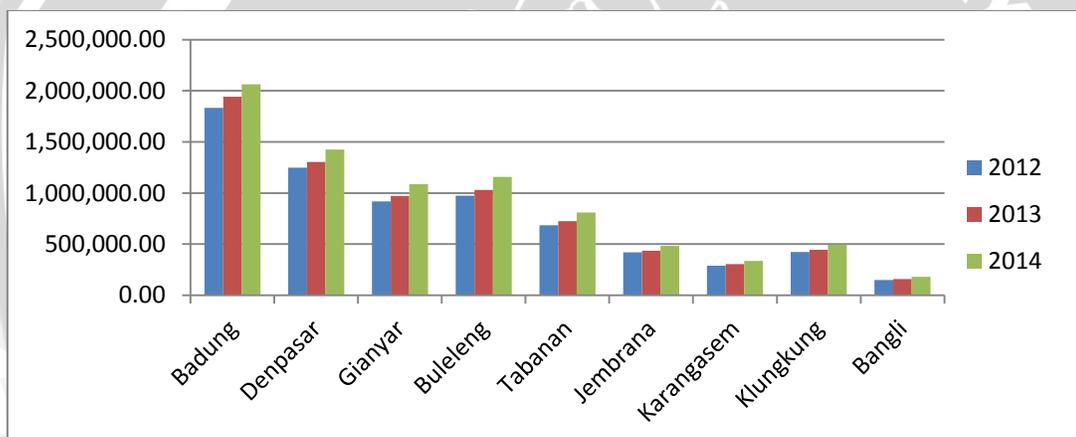
Berdasarkan **Tabel 4.8** terlihat jika pendapatan dari Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan masih didominasi oleh Kabupaten Badung, di mana pada tahun 2014 saja sebesar 8.831.238,2 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 25,48%, paling tinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya. Sementara itu, penyumbang paling sedikit adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 57.792,8 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase sebesar 20,32%. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling rendah terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 15,08%. Untuk PDRB Provinsi Bali dari Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2014 saja sebesar 14.203.195,1 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 23,17%.

Untuk mengetahui PDRB Provinsi Bali jika dilihat dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.9**

**Tabel 4.9 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	1.833.380,1	1.940.828,4	2.064.232,1	5,86	6,35	6,10
2.	Denpasar	1.246.242,3	1.302.543,3	1.424.722,2	4,51	9,38	6,94
3.	Gianyar	917.019,5	969.344,2	1.085.203,8	5,70	11,95	8,82
4.	Buleleng	972.140,6	1.029.940,9	1.156.206,3	5,94	12,25	9,10
5.	Tabanan	683.311,0	723.962,9	807.985,9	5,94	11,60	8,77
6.	Jembrana	418.169,6	434.260,1	480.745,9	3,84	10,70	7,27
7.	Karangasem	289.711,2	304.814,1	336.555,2	5,21	10,41	7,81
8.	Klungkung	424.198,3	443.505,0	493.566,3	4,55	11,28	7,91
9.	Bangli	150.186,6	159.541,7	178.924,1	6,22	12,14	9,18
	<b>Bali</b>	<b>6.938.730,8</b>	<b>7.312.441,4</b>	<b>8.034.798,2</b>	<b>5,38</b>	<b>9,87</b>	<b>7,63</b>

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota tahun 2015



**Gambar 4.9 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

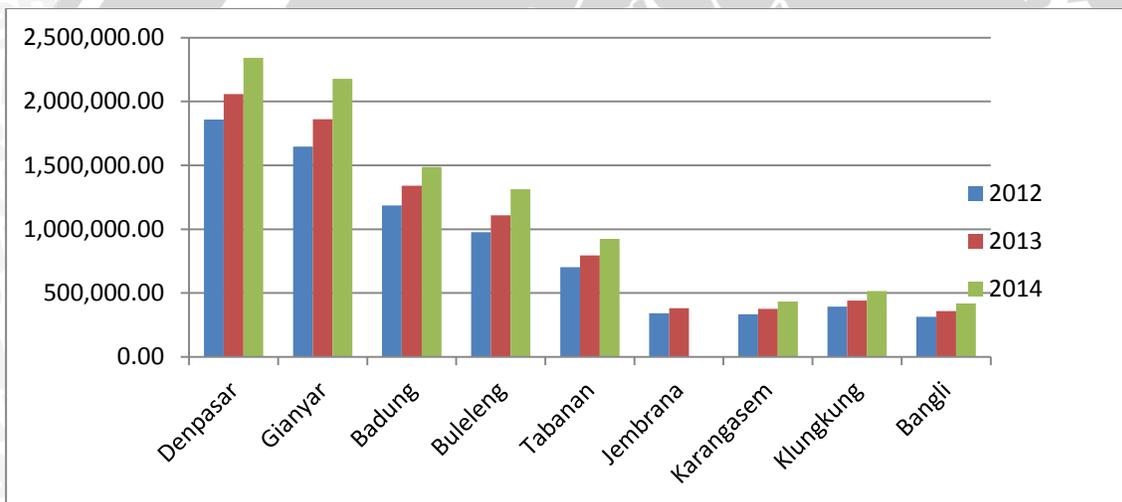
Berdasarkan **Tabel 4.9** terlihat bila PDRB Provinsi Bali dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2014 saja sebesar 8.034.798,2 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 7,63%. Kabupaten Badung masih mendominasi PDRB Provinsi Bali Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, di mana pada tahun 2014 saja menyumbang sebesar 2.064.232,1 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 6,10%, yang menjadi rata-rata persentase peningkatan paling rendah. Sementara itu, penyumbang paling sedikit adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 178.924,1 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 9,18%, yang menjadi rata-rata persentase peningkatan paling tinggi.

Untuk mengetahui PDRB Provinsi Bali jika dilihat dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.10**

**Tabel 4.10 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	1.858.596,0	2.058.868,3	2.342.479,7	10,77	13,77	12,27
2.	Gianyar	1.646.322,1	1.860.712,8	2.178.044,9	13,02	17,05	15,03
3.	Badung	1.186.706,1	1.339.289,3	1.487.956,3	12,85	11,10	11,97
4.	Buleleng	977.574,3	1.108.797,3	1.312.046,6	13,42	18,33	15,87
5.	Tabanan	702.010,2	793.675,0	924.493,5	13,05	16,48	14,77
6.	Jembrana	341.071,0	380.969,8	442.429,4	11,69	16,13	13,91
7.	Karangasem	332.726,1	375.524,8	432.722,0	12,86	15,23	14,04
8.	Klungkung	393.701,7	440.917,6	516.555,2	11,99	17,15	14,57
9.	Bangli	314.524,8	358.428,7	418.381,8	13,95	16,72	15,34
	<b>Bali</b>	<b>7.699.337,9</b>	<b>8.656.357,7</b>	<b>9.984.338,7</b>	<b>12,42</b>	<b>15,34</b>	<b>13,88</b>

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota tahun 2015



**Gambar 4.10 PDRB Provinsi Bali Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (juta rupiah)**

Berdasarkan **Tabel 4.10** terlihat bila PDRB Provinsi Bali dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 saja sebesar 9.984.338,7 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 13,88%. Kota Denpasar memiliki PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan paling tinggi, di mana pada tahun 2014 saja sebesar 2.342.479,7 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 12,27%. Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan paling kecil, yaitu sebesar 418.381,8 (juta rupiah) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 15,34%. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, yaitu sebesar

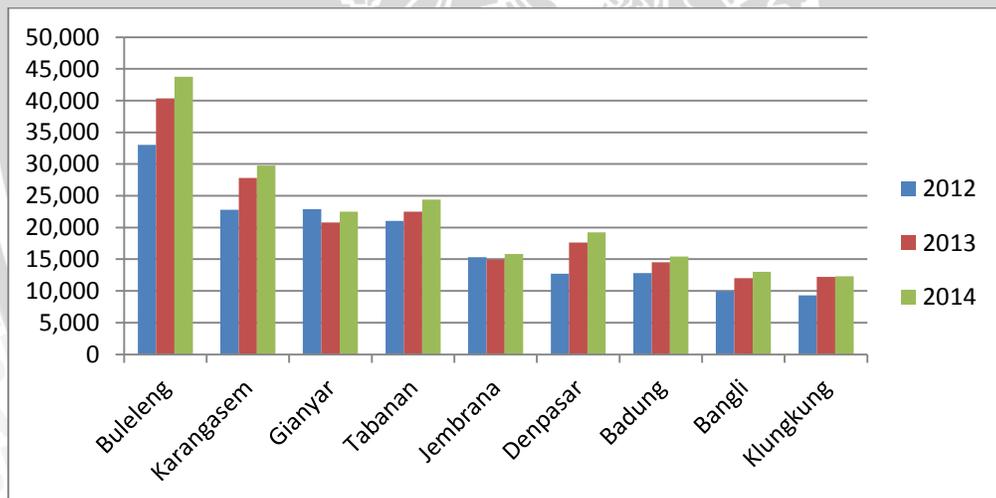
15,87%. Sedangkan, untuk rata-rata persentase peningkatan paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung, yaitu sebesar 11,97%.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Bali yang sudah mendunia tidak menutup kemungkinan adanya angka kemiskinan. Berdasarkan data dari Bali Dalam Angka Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.11**

**Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Buleleng	33.010	40.326	43.738	22,16	8,46	15,31
2.	Karangasem	22.786	27.832	29.753	22,14	6,90	14,52
3.	Gianyar	22.900	20.800	22.500	- 9,17	8,17	- 0,49
4.	Tabanan	21.050	22.520	24.410	6,98	8,39	7,68
5.	Jembrana	15.313	14.922	15.840	- 2,55	6,15	1,79
6.	Denpasar	12.725	17.615	19.225	38,42	9,13	23,78
7.	Badung	12.830	14.546	15.412	13,37	5,95	9,66
8.	Bangli	9.935	12.012	13.025	20,90	8,43	14,66
9.	Klungkung	9.300	12.200	12.300	31,18	0,81	16,00
	<b>Bali</b>	<b>159,849</b>	<b>182,773</b>	<b>196,203</b>	<b>14,34</b>	<b>7,34</b>	<b>10,84</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.11 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

Berdasarkan **Tabel 4.11** jumlah penduduk miskin Provinsi Bali mengalami peningkatan, pada tahun 2014 saja tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 196,203 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 10,84%. Kabupaten Buleleng menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali, di mana pada tahun 2014 saja menyentuh angka 43.738 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar

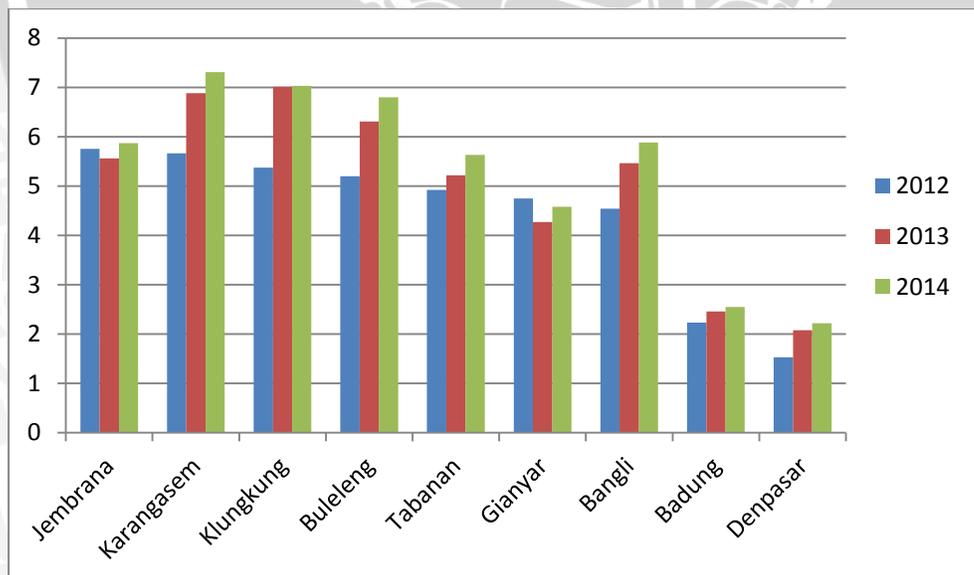
15,31%. Sementara itu, Kabupaten Klungkung menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah. Pada tahun 2014 saja jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung sebanyak 12.300 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 16,00%. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 23,78%. Sedangkan, untuk rata-rata persentase paling rendah terdapat di Kabupaten Gianyar, yaitu mengalami penurunan sebesar 0,49%.

Perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.12**

**Tabel 4.12 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Jembrana	5,75	5,56	5,87	- 0,18	0,30	0,05
2.	Karangasem	5,66	6,88	7,31	1,21	0,43	0,82
3.	Klungkung	5,37	7,01	7,03	1,63	0,02	0,82
4.	Buleleng	5,20	6,31	6,80	1,11	0,49	0,80
5.	Tabanan	4,92	5,22	5,63	0,30	0,40	0,35
6.	Gianyar	4,75	4,27	4,58	- 0,47	0,30	- 0,08
7.	Bangli	4,54	5,46	5,88	0,91	0,42	0,67
8.	Badung	2,23	2,46	2,55	0,23	0,08	0,16
9.	Denpasar	1,53	2,08	2,22	0,54	0,14	0,34
	<b>Bali</b>	<b>3,98</b>	<b>4,50</b>	<b>4,77</b>	<b>0,51</b>	<b>0,27</b>	<b>0,39</b>

Sumber: Hasil Analisis tahun 2016



**Gambar 4.12 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

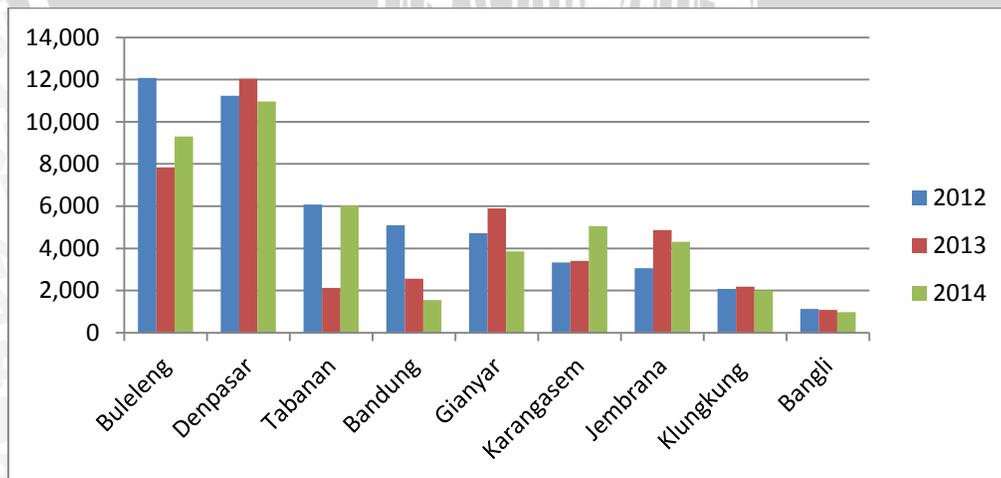
Berdasarkan **Tabel 4.12** dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 4,77% dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,39%. Perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 7,31% dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,82%. Sedangkan, perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk paling rendah terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 2,22% dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,34%. Untuk rata-rata persentase terjadi penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Gianyar sebesar 0,08%.

Selain jumlah penduduk miskin, banyaknya pengangguran juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Di Provinsi Bali sendiri jumlah pengangguran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 4.13**

**Tabel 4.13 Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Buleleng	12.083	7.834	9.296	- 35,16	18,66	- 8,25
2.	Denpasar	11.232	12.036	10.968	7,15	- 8,87	- 0,85
3.	Tabanan	6.074	2.123	6.027	- 65,04	183,89	59,42
4.	Badung	5.094	2.565	1.558	- 49,64	- 39,25	- 44,45
5.	Gianyar	4.714	5.891	3.859	24,96	- 34,49	- 4,76
6.	Karangasem	3.337	3.408	5.045	2,12	48,03	25,08
7.	Jembrana	3.055	4.863	4.314	59,18	- 11,28	23,94
8.	Klungkung	2.073	2.186	1.998	5,45	- 8,60	- 1,57
9.	Bangli	1.121	1.076	976	- 4,01	- 9,29	- 6,65
	<b>Bali</b>	<b>48.783</b>	<b>41.982</b>	<b>44.041</b>	<b>- 13,94</b>	<b>4,90</b>	<b>- 4,51</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.13 Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (jiwa)**

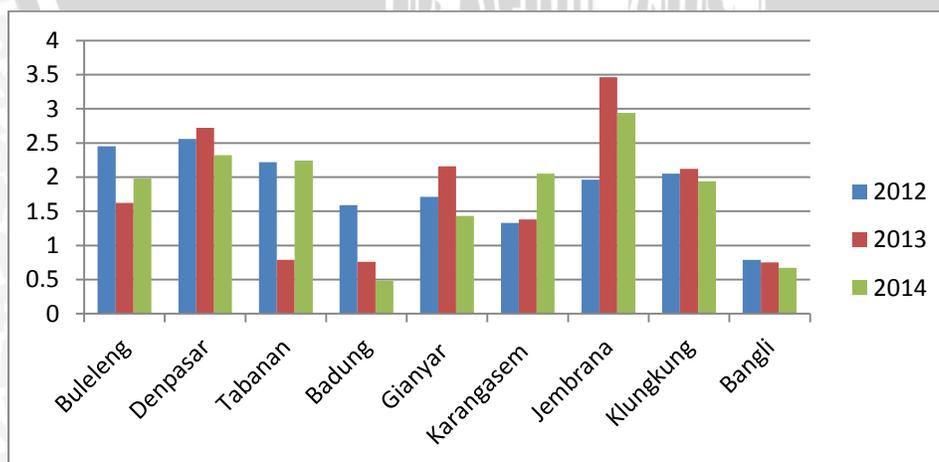
Berdasarkan **Tabel 4.13** terlihat bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Bali mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 naik sebesar 4,90% dari tahun sebelumnya menjadi 44.041 jiwa dengan rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 4,51%. Kota Denpasar memiliki jumlah pengangguran terbesar di Provinsi Bali di mana pada tahun 2014 saja sebanyak 10.968 jiwa, walaupun sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,87%. Selain itu, rata-rata persentase di Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 0,85%. Sementara itu, Kabupaten Bangli menjadi Kabupaten dengan jumlah pengangguran paling sedikit, yaitu sebanyak 976 jiwa pada tahun 2014 dengan rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 6,65%.

Perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.14**

**Tabel 4.14 Perbandingan Jumlah Pengangguran dengan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Buleleng	2,45	1,62	1,98	- 0,83	0,36	- 0,23
2.	Denpasar	2,56	2,72	2,32	0,15	- 0,40	- 0,12
3.	Tabanan	2,22	0,79	2,24	- 1,42	1,45	0,01
4.	Badung	1,59	0,76	0,48	- 0,83	- 0,28	- 0,55
5.	Gianyar	1,71	2,16	1,43	0,44	- 0,73	- 0,14
6.	Karangasem	1,33	1,38	2,05	0,04	0,66	0,35
7.	Jembrana	1,96	3,46	2,94	1,49	- 0,51	0,48
8.	Klungkung	2,05	2,12	1,94	0,07	- 0,18	- 0,05
9.	Bangli	0,79	0,75	0,67	- 0,04	- 0,08	- 0,06
	<b>Bali</b>	<b>1,99</b>	<b>1,72</b>	<b>1,80</b>	<b>- 0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>- 0,09</b>

Sumber: Hasil Analisis tahun 2016



**Gambar 4.14 Perbandingan Jumlah Pengangguran dengan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (persen)**

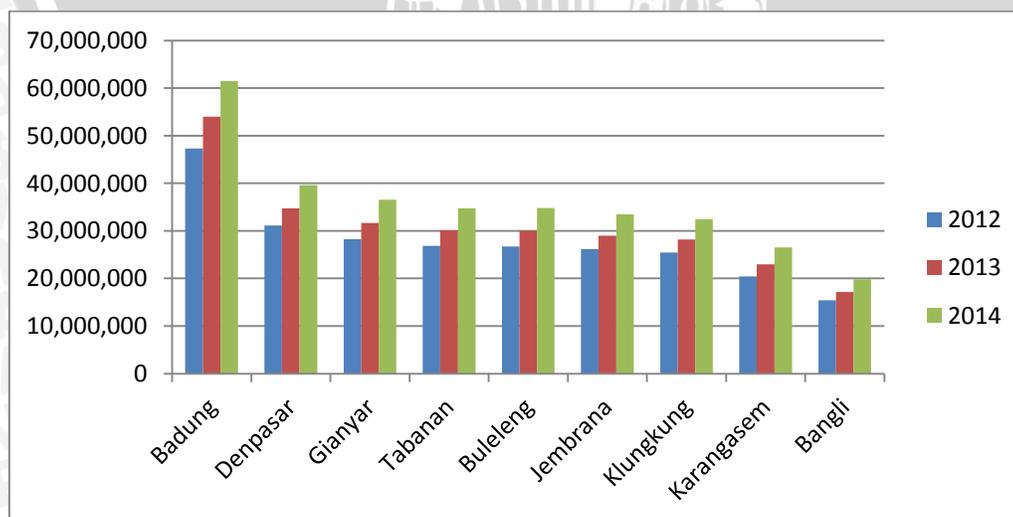
Berdasarkan **Tabel 4.14** dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 1,80% dengan rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 0,09%. Pada tahun 2014, perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana sebesar 2,94% dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,48%. Sedangkan, perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja paling rendah terdapat di Kabupaten Badung, yaitu sebesar 0,48% dengan rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 0,55%, penurunan rata-rata persentase tersebut menjadi penurunan paling tinggi.

Untuk melihat pendapatan penduduk suatu daerah secara umum dapat dilihat dari PDRB per kapita daerah tersebut. Untuk PDRB per kapita Provinsi Bali menurut harga berlaku dapat dilihat pada **Tabel 4.15**

**Tabel 4.15 Jumlah PDRB per Kapita di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	47.306.020	53.973.305	61.495.630	14,09	13,93	14,01
2.	Denpasar	31.148.788	34.730.861	39.611.890	11,49	14,05	12,77
3.	Gianyar	28.271.880	31.635.750	36.527.330	11,89	15,46	13,68
4.	Tabanan	26.819.380	30.104.870	34.763.782	12,25	15,47	13,86
5.	Buleleng	26.690.359	29.990.481	34.785.490	12,36	15,98	14,17
6.	Jembrana	26.190.874	28.991.736	33.438.570	10,69	15,33	13,01
7.	Klungkung	25.446.375	28.183.724	32.475.664	10,75	15,22	12,99
8.	Karangasem	20.446.310	22.985.569	26.525.002	12,41	15,39	13,90
9.	Bangli	15.383.445	17.183.258	19.801.865	11,69	15,23	13,46
	<b>Bali</b>	<b>29.443.850</b>	<b>33.133.410</b>	<b>38.112.570</b>	<b>12,53</b>	<b>15,02</b>	<b>13,77</b>

Sumber: Denpasar Dalam Angka 2015



**Gambar 4.15 Jumlah PDRB per Kapita di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

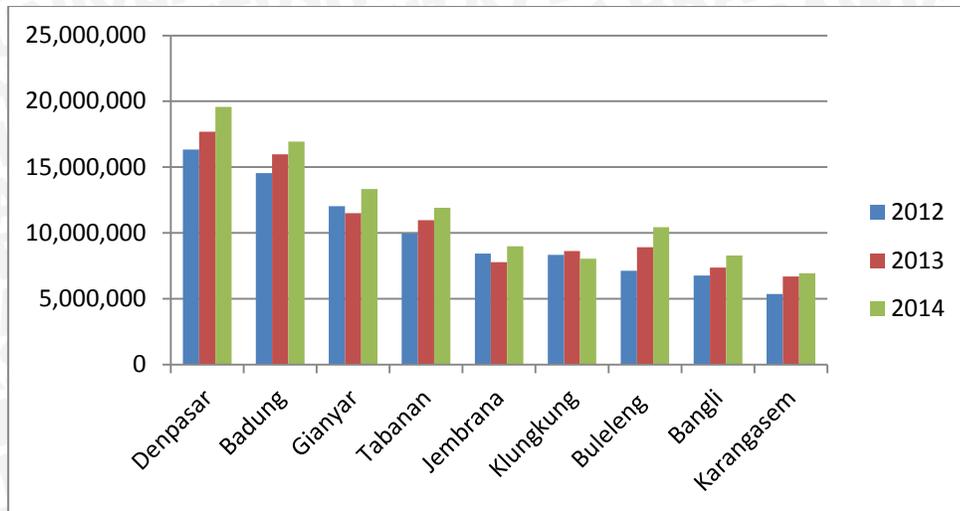
Berdasarkan **Tabel 4.15** terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Provinsi Bali selama kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2014 saja sebesar Rp 38.112.570 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 13,77%. Kabupaten Badung memiliki PDRB per kapita paling tinggi di Provinsi Bali, di mana pada tahun 2014 saja sebesar Rp 61.495.630 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 14,01%. Angka PDRB per kapita Kabupaten Badung berada di atas PDRB per kapita Provinsi Bali. Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki PDRB per kapita paling rendah di Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp 19.801.865 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 13,46%. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, yaitu sebesar 14,17%. Sedangkan, untuk rata-rata persentase peningkatan paling rendah dimiliki oleh Kota Denpasar, yaitu sebesar 12,77%.

Untuk mengetahui pengeluaran penduduk secara umum dapat dilihat dari pengeluaran per kapita suatu daerah. Untuk pengeluaran per kapita Provinsi Bali menurut harga berlaku dapat dilihat pada **Tabel 4.16**

**Tabel 4.16 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	16.342.860	17.698.668	19.570.860	8,29	10,57	9,43
2.	Badung	14.540.220	15.981.912	16.953.072	9,91	6,07	7,99
3.	Gianyar	12.034.860	11.515.848	13.340.184	- 4,31	15,84	5,76
4.	Tabanan	9.967.992	10.963.656	11.923.044	9,98	8,75	9,36
5.	Jembrana	8.424.300	7.772.436	9.001.224	- 7,73	15,80	4,03
6.	Klungkung	8.341.044	8.633.040	8.045.556	3,50	- 6,80	- 1,65
7.	Buleleng	7.123.524	8.914.968	10.439.304	25,14	17,09	21,12
8.	Bangli	6.771.672	7.377.132	8.278.956	8,94	12,22	10,58
9.	Karangasem	5.365.452	6.694.872	6.936.216	24,77	3,60	14,19
	<b>Bali</b>	<b>10.940.688</b>	<b>11.928.840</b>	<b>13.172.988</b>	<b>9,03</b>	<b>10,42</b>	<b>9,73</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.16 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

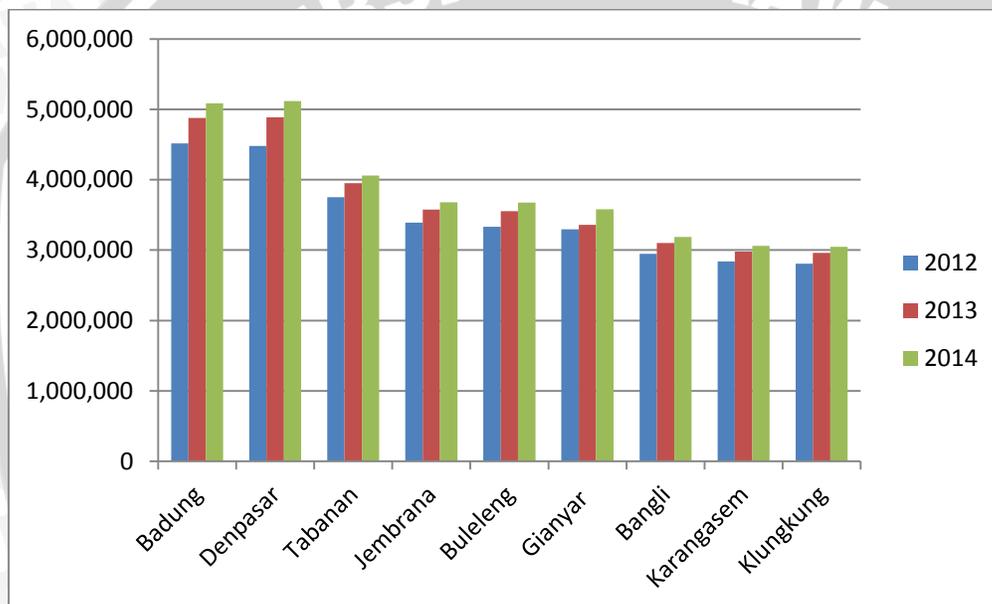
Berdasarkan **Tabel 4.16** terlihat bahwa pengeluaran penduduk Provinsi Bali meningkat tiap tahunnya selama kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2014 saja sebesar Rp 13.172.988 dengan rata-rata persentase sebesar 9,73%. Kota Denpasar memiliki pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp 19.570.860 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 9,43%. Namun, rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Buleleng, yaitu sebesar 21,12%. Kabupaten Karangasem memiliki pengeluaran per kapita paling rendah dan berada di bawah angka pengeluaran per kapita dari Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp 6.936.216 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 14,19%. Sementara itu, untuk rata-rata persentase paling rendah terdapat di kabupaten Klungkung, di mana rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 1,65%.

Selain data jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, jumlah PDRB per kapita, dan jumlah pengeluaran per kapita, untuk melihat indikator kemiskinan di Provinsi Bali dapat dilihat dari data garis kemiskinan per kapita, indeks gini (*gini ratio*), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Jumlah garis kemiskinan per kapita di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.17**

**Tabel 4.17 Garis Kemiskinan per Kapita  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	4.513.104	4.876.896	5.082.816	8,06	4,22	6,14
2.	Denpasar	4.480.392	4.886.292	5.118.156	1,85	6,69	4,27
3.	Tabanan	3.753.240	3.950.712	4.059.588	5,49	2,88	4,18
4.	Jembrana	3.389.652	3.576.036	3.679.032	4,93	2,58	3,76
5.	Buleleng	3.329.496	3.550.944	3.674.652	9,05	4,74	6,90
6.	Gianyar	3.295.668	3.356.904	3.581.580	6,65	3,48	5,06
7.	Bangli	2.948.640	3.102.456	3.187.236	5,26	2,75	4,00
8.	Karangasem	2.840.256	2.980.548	3.057.660	5,49	2,87	4,18
9.	Klungkung	2.805.168	2.959.380	3.044.604	5,21	2,73	3,97
	<b>Bali</b>	<b>3.050.652</b>	<b>3.408.108</b>	<b>3.620.964</b>	<b>11,71</b>	<b>6,24</b>	<b>8,98</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.17 Garis Kemiskinan per Kapita  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (rupiah)**

Berdasarkan **Tabel 4.17** terlihat bahwa garis kemiskinan per kapita di Provinsi Bali meningkat tiap tahunnya, di mana pada tahun 2014 saja sebesar Rp 3.620.964 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 8,98%. Jadi, penduduk Provinsi Bali minimal membutuhkan Rp 3.620.964 untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kabupaten Badung memiliki garis kemiskinan per kapita paling tinggi di Provinsi Bali pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp 5.082.816 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 6,14%. Namun, Kabupaten Buleleng memiliki rata-rata persentase peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 6,90%. Kabupaten Klungkung memiliki garis kemiskinan per kapita paling

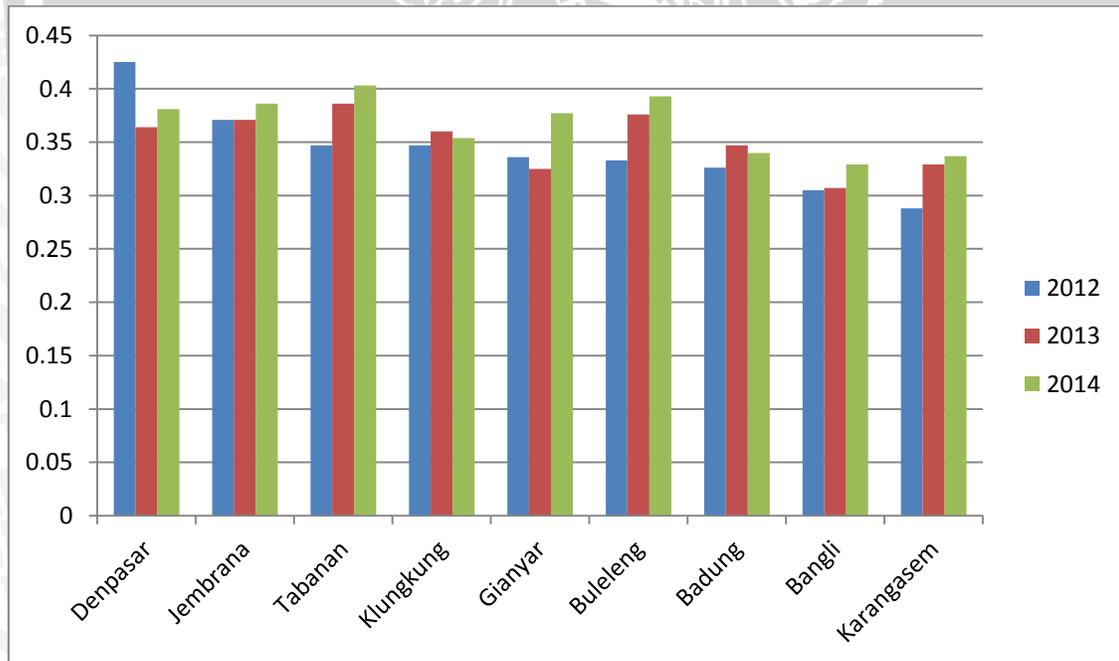
rendah, yaitu sebesar Rp 3.044.604 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,97%. Sementara itu, untuk rata-rata persentase peningkatan paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar 3,76%.

Pemerataan pendapatan dapat diketahui dengan melihat indeks gini. Indeks gini di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.18**

**Tabel 4.18 Indeks Gini di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	0,425	0,364	0,381	- 14,35	4,67	- 4,84
2.	Jembrana	0,371	0,371	0,386	0	4,04	2,02
3.	Tabanan	0,347	0,386	0,403	11,23	4,40	7,82
4.	Klungkung	0,347	0,360	0,354	3,74	- 1,66	1,03
5.	Gianyar	0,336	0,325	0,377	- 3,27	16,00	6,36
6.	Buleleng	0,333	0,376	0,393	12,91	4,52	8,71
7.	Badung	0,326	0,347	0,340	6,44	- 2,01	2,21
8.	Bangli	0,305	0,307	0,329	0,65	7,16	3,91
9.	Karangasem	0,288	0,329	0,337	14,23	2,43	8,33
	<b>Bali</b>	<b>0,430</b>	<b>0,403</b>	<b>0,415</b>	<b>- 6,27</b>	<b>2,97</b>	<b>- 1,65</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.18 Indeks Gini di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

Dari **Tabel 4.18** terlihat bahwa nilai indeks gini Provinsi Bali mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 saja sebesar 0,415 dengan rata-rata persentase Provinsi Bali mengalami

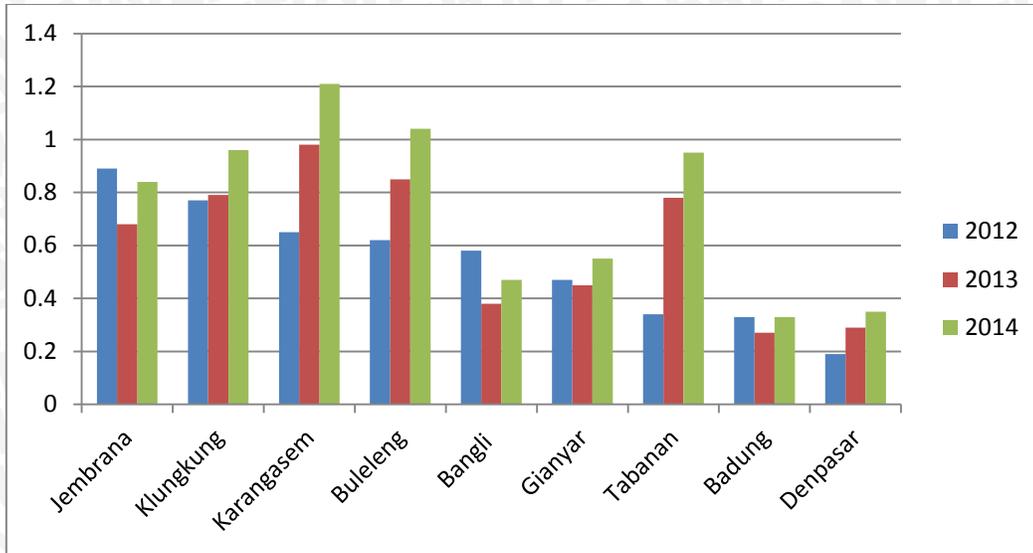
penurunan sebesar 1,65%. Kabupaten Tabanan memiliki nilai indeks gini paling tinggi di Provinsi Bali pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,403 dengan rata-rata persentase sebesar 7,82%. Kabupaten Buleleng memiliki rata-rata persentase paling tinggi, yaitu sebesar 8,71%. Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki nilai indeks gini paling rendah pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,329 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,91%. Kota Denpasar memiliki rata-rata persentase yang mengalami penurunan sebesar, 4,84%. Nilai tersebut menunjukkan bila Kabupaten Tabanan menjadi Kabupaten dengan pemerataan pendapatan paling rendah, sebaliknya Kabupaten Bangli menjadi Kabupaten dengan pemerataan pendapatan paling tinggi di Provinsi Bali. Namun, secara umum Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali memiliki nilai indeks gini di bawah nilai indeks gini Provinsi Bali. Hal tersebut menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan di mana kesenjangan pendapatan semakin terlihat nyata, namun demikian masih pada tingkat ketimpangan sedang. Hal ini terjadi karena nilai indeks gini mendekati 0.

Untuk mengetahui indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.19**

**Tabel 4.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Jembrana	0,89	0,68	0,84	- 23,59	23,52	- 0,03
2.	Klungkung	0,77	0,79	0,96	- 2,59	21,51	12,05
3.	Karangasem	0,65	0,98	1,21	50,76	23,46	37,11
4.	Buleleng	0,62	0,85	1,04	37,09	22,35	29,72
5.	Bangli	0,58	0,38	0,47	- 34,48	23,68	- 5,39
6.	Gianyar	0,47	0,45	0,55	-4,25	22,22	8,98
7.	Tabanan	0,34	0,78	0,95	129,41	21,79	75,60
8.	Badung	0,33	0,27	0,33	- 18,18	22,22	2,02
9.	Denpasar	0,19	0,29	0,35	52,63	20,68	36,66
	<b>Bali</b>	<b>0,39</b>	<b>0,70</b>	<b>0,86</b>	<b>79,48</b>	<b>22,85</b>	<b>51,17</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

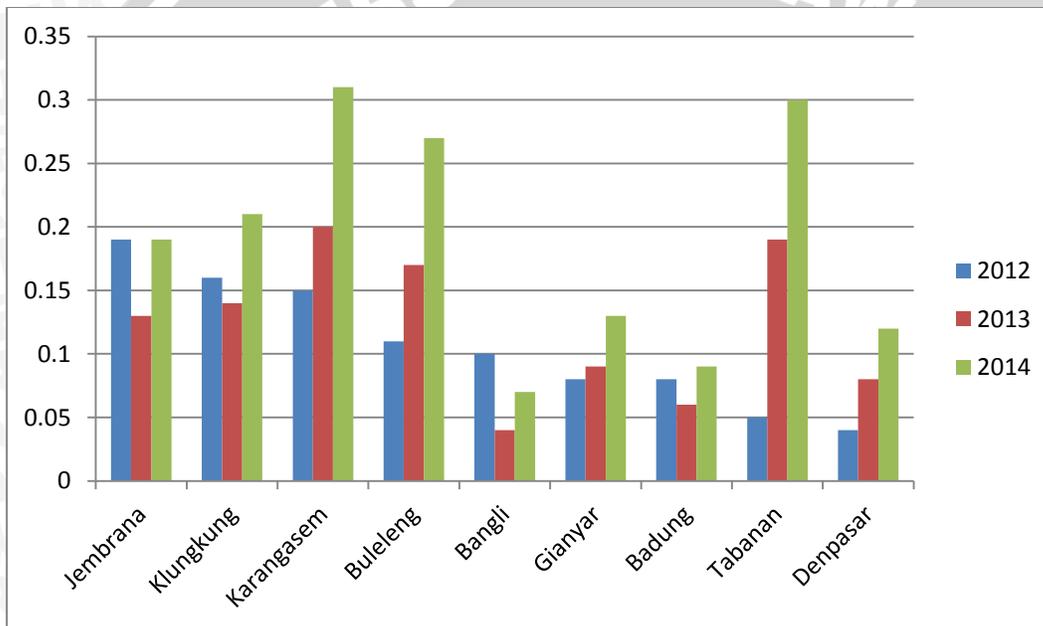
Dari **Tabel 4.19** diketahui bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Bali mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 tahun terakhir, pada tahun 2014 saja sebesar 0,86 dengan rata-rata persentase sebesar 51,17%. Kabupaten Karangasem memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan paling tinggi di Provinsi Bali pada tahun 2014, yaitu sebesar 1,21 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 37,11%. Sementara itu, Kabupaten Badung memiliki indeks kedalaman kemiskinan paling rendah, yaitu sebesar 0,33 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 2,02%. Namun, rata-rata persentase yang mengalami penurunan terdapat di Kabupaten Bangli yang mengalami penurunan sebesar 5,39%. Secara umum nilai indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Untuk melihat indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.20**

**Tabel 4.20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Jembrana	0,19	0,13	0,19	- 31,57	46,15	7,28
2.	Klungkung	0,16	0,14	0,21	- 12,50	50,00	18,75
3.	Karangasem	0,15	0,20	0,31	33,33	55,00	44,16
4.	Buleleng	0,11	0,17	0,27	54,54	58,82	56,68
5.	Bangli	0,10	0,04	0,07	- 60,00	75,00	7,50
6.	Gianyar	0,08	0,09	0,13	12,50	44,44	28,47
7.	Badung	0,08	0,06	0,09	- 25,00	50,00	12,50
8.	Tabanan	0,05	0,19	0,30	280,00	57,89	168,94
9.	Denpasar	0,04	0,08	0,12	100,00	50,00	75,00
	<b>Bali</b>	<b>0,07</b>	<b>0,16</b>	<b>0,26</b>	<b>128,57</b>	<b>62,50</b>	<b>95,53</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014**

Dari **Tabel 4.20** diketahui bahwa indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Bali pada tahun 2014 saja sebesar 0,26 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 95,53%. Nilai indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal tersebut berarti semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Bali. Pada tahun yang sama Kabupaten Karangasem memiliki indeks keparahan kemiskinan paling tinggi di Provinsi Bali, yaitu sebesar 0,31 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 44,16%. Namun, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar

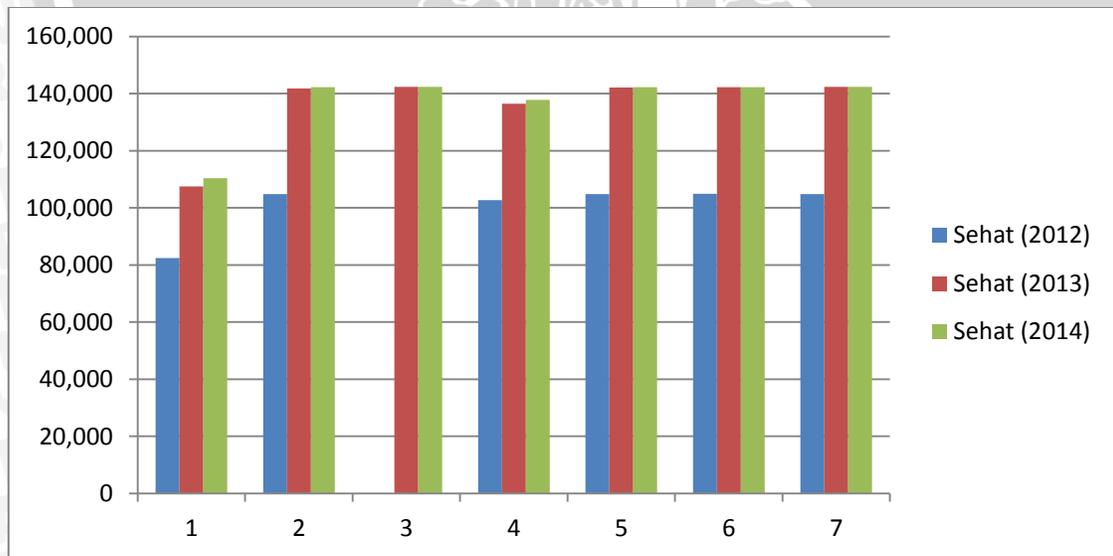
168,94%. Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki nilai indeks keparahan kemiskinan paling rendah di Provinsi Bali, yaitu sebesar 0,07 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 7,50%. Akan tetapi, rata-rata persentase peningkatan paling rendah terdapat di Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar 7,28%.

Indikator kemiskinan juga dapat dilihat dari indikator perumahan. Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada **Tabel 4.21**

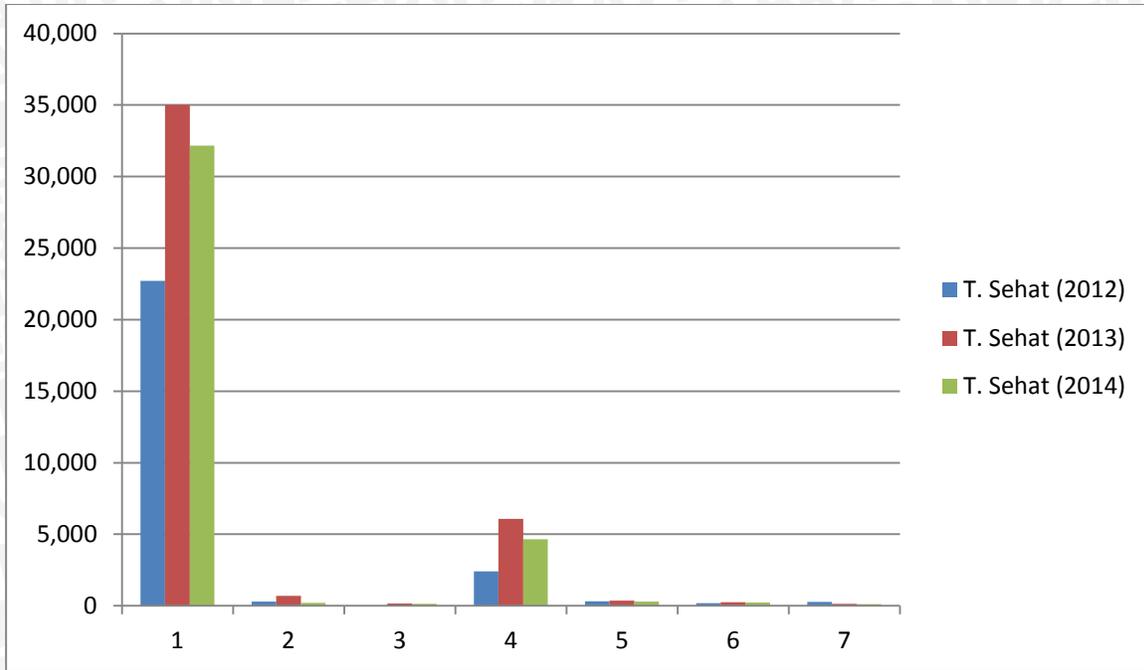
**Tabel 4.21 Indikator Perumahan di Kabupaten Badung Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	82.354	22.716	107.473	35.008	110.323	32.158	30,50	54,11	2,65	- 8,14	16,57	22,98
2.	Jenis lantai	104.786	284	141.797	684	142.267	214	35,32	140,84	0,33	- 68,71	17,82	36,06
3.	Jenis atap	105.070	0	142.324	157	142.353	128	35,45	0	0,02	- 18,47	17,73	- 9,23
4.	Jenis dinding	102.664	2.406	136.397	6.084	137.822	4.659	32,85	152,86	1,04	- 23,42	16,95	64,72
5.	Sumber penerangan	104.755	315	142.125	356	142.196	285	35,67	13,01	0,04	- 19,94	17,86	- 3,46
6.	Sumber air minum	104.881	189	142.239	242	142.253	228	35,61	28,04	0,01	- 5,78	17,81	11,12
7.	Fasilitas tempat buang air besar	104.807	263	142.353	128	142.367	114	35,82	- 51,33	0,01	- 10,93	17,91	- 31,13
<b>Badung</b>		<b>101.331</b>	<b>3.739</b>	<b>136.387</b>	<b>6.094</b>	<b>137.083</b>	<b>5.398</b>	<b>34,59</b>	<b>62,98</b>	<b>0,51</b>	<b>- 11,42</b>	<b>17,55</b>	<b>25,78</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung tahun 2015



**Gambar 4.21 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Badung Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.22 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Badung Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

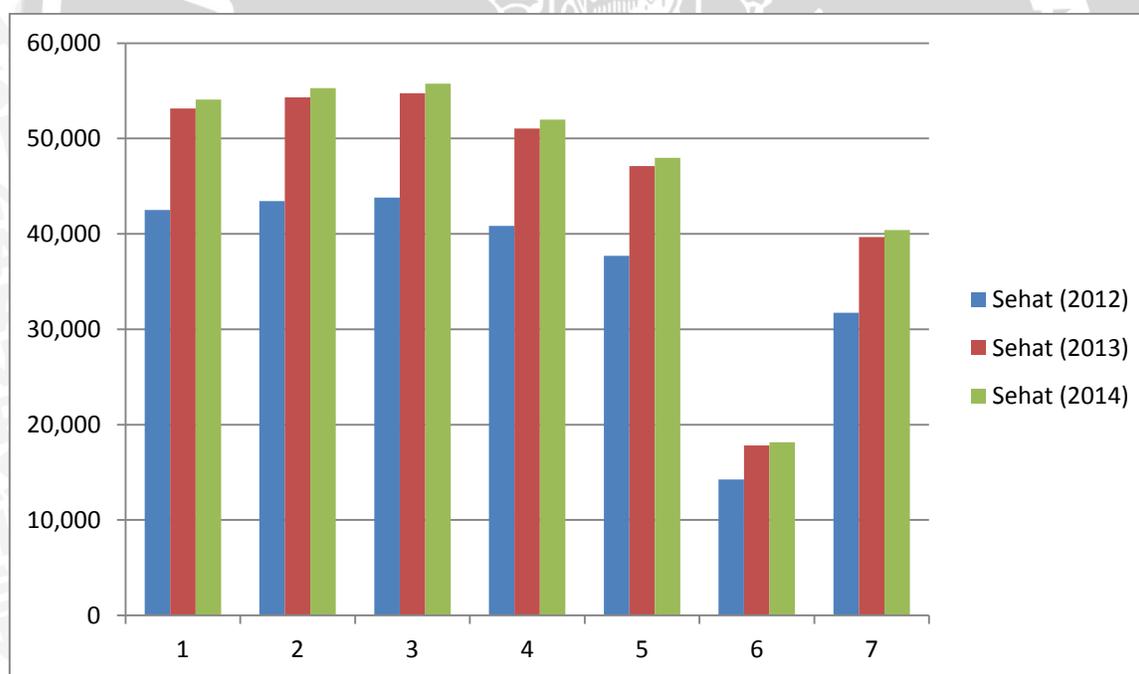
Berdasarkan **Tabel 4.21** terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum jika dilihat dari ke-7 indikator, jumlah rumah sehat di Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Jumlah rumah sehat di Kabupaten Badung sebanyak 137.083 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 17,55%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 saja sebanyak 5.398 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 25,78%. Rata-rata persentase peningkatan rumah tidak sehat lebih tinggi dari rata-rata persentase peningkatan rumah sehat.

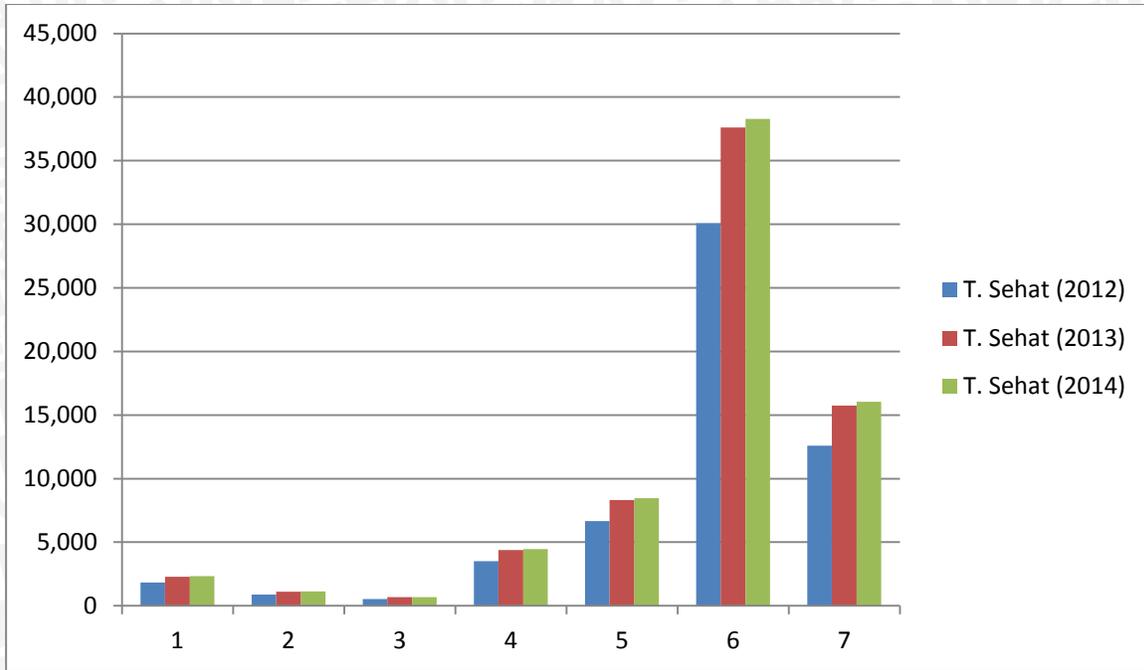
Sementara itu, untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada **Tabel 4.22**

**Tabel 4.22 Indikator Perumahan di Kabupaten Bangli Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	42.505	1.835	53.130	2.295	54.089	2.336	24,99	25,06	1,80	1,78	13,40	13,42
2.	Jenis lantai	43.453	887	54.316	1.109	55.296	1.129	24,99	25,02	1,80	1,80	13,40	13,41
3.	Jenis atap	43.803	537	54.754	671	55.742	683	25,00	24,95	1,80	1,78	13,40	13,37
4.	Jenis dinding	40.833	3.507	51.041	4.384	51.962	4.463	24,99	25,00	1,80	1,80	13,40	13,40
5.	Sumber penerangan	37.689	6.651	47.111	8.314	47.961	8.464	24,99	25,00	1,80	1,80	13,40	13,40
6.	Sumber air minum	14.260	30.080	17.825	37.600	18.147	38.278	25,00	25,00	1,80	1,80	13,40	13,40
7.	Fasilitas tempat buang air besar	31.743	12.597	39.679	15.746	40.395	16.030	25,00	24,99	1,80	1,80	13,40	13,40
<b>Bangli</b>		<b>36.327</b>	<b>8.013</b>	<b>45.408</b>	<b>10.017</b>	<b>46.227</b>	<b>10.198</b>	<b>24,99</b>	<b>25,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangli tahun 2015

**Gambar 4.23 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Bangli Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.24 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Bangli Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

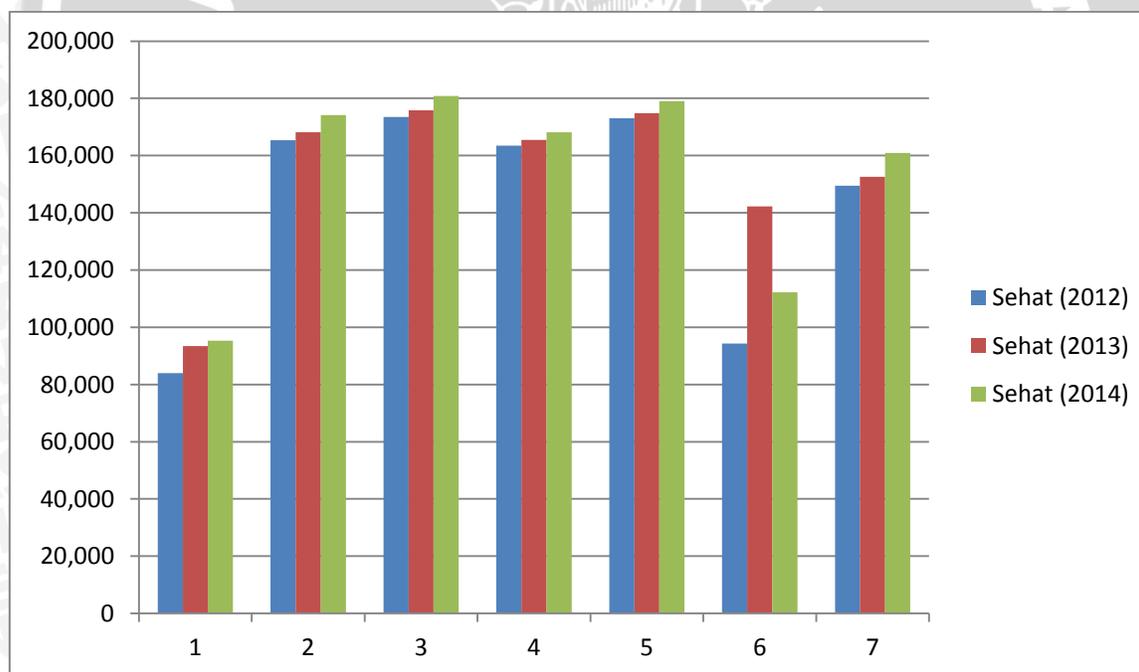
Berdasarkan **Tabel 4.22** terlihat bahwa secara umum ke-7 indikator perumahan mengalami peningkatan jumlah rumah sehat di Kabupaten Bangli. Jumlah rumah sehat di Kabupaten Bangli pada tahun 2014 saja sebanyak 46.227 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 13,40%. Walaupun terjadi peningkatan jumlah rumah sehat di Kabupaten Bangli, jumlah rumah tidak sehat juga meningkat. Untuk jumlah rumah tidak sehat pada tahun yang sama sebanyak 10.198 unit dengan rata-rata persentase peningkatan yang sama dengan rumah sehat, yaitu sebesar 13,40%. Terjadinya peningkatan jumlah rumah sehat dan tidak sehat diakibatkan oleh peningkatan jumlah perumahan. Sementara itu, khusus indikator sumber air minum untuk rumah sehat pada 2014 saja jumlahnya sebanyak 18.147 unit, di mana masih di bawah rumah tidak sehat yang jumlahnya sebanyak 38.278 unit dengan rata-rata persentase peningkatan yang sama, yaitu 13,40%. Hal tersebut, menunjukkan jika sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangli menggunakan sumber air yang tidak sehat.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada **Tabel 4.23**

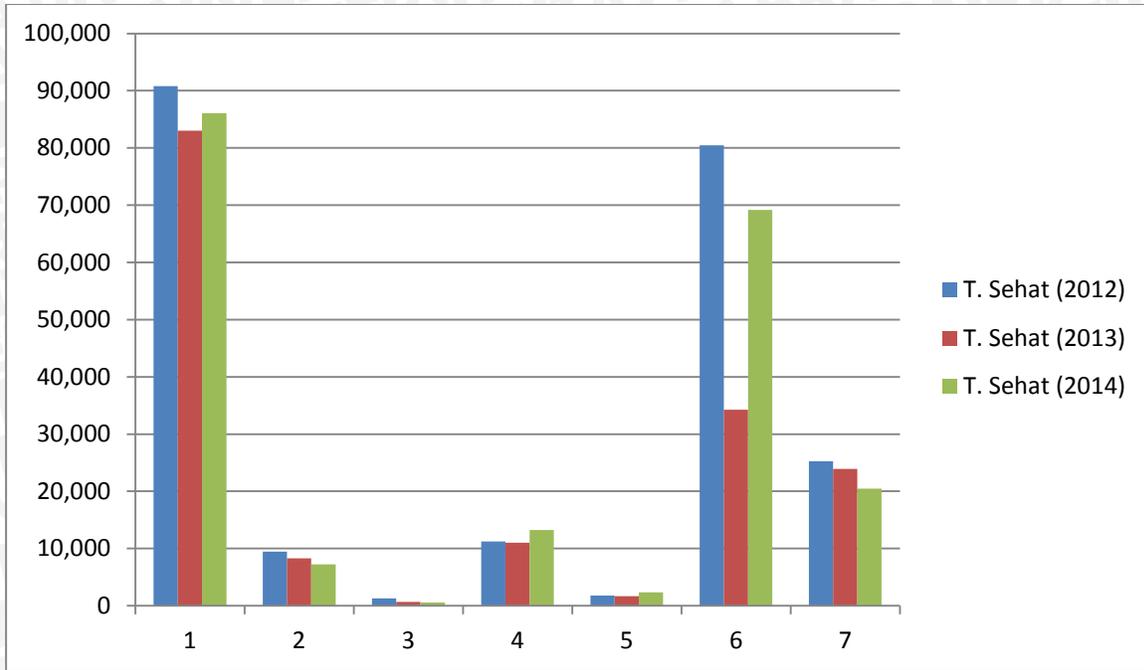
Tabel 4.23 Indikator Perumahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2014 (unit)

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	83.956	90.806	93.443	83.031	95.354	86.065	11,29	- 8,56	2,04	3,65	6,67	- 2,45
2.	Jenis lantai	165.324	9.438	168.162	8.312	174.180	7.239	1,71	- 11,93	3,57	- 12,90	2,64	- 12,41
3.	Jenis atap	173.468	1.294	175.768	706	180.875	544	1,32	- 45,44	2,90	- 22,94	2,11	- 34,19
4.	Jenis dinding	163.524	11.238	165.479	10.995	168.175	13.244	1,19	- 2,16	1,62	20,45	1,41	9,14
5.	Sumber penerangan	172.996	1.766	174.797	1.677	179.096	2.323	1,04	- 5,03	2,45	38,52	1,75	16,74
6.	Sumber air minum	94.301	80.461	142.202	34.272	112.226	69.193	50,79	- 57,40	- 21,07	101,89	14,85	22,24
7.	Fasilitas tempat buang air besar	149.491	25.271	152.579	23.895	160.973	20.446	2,06	- 5,44	5,50	- 14,43	3,78	- 9,9
<b>Buleleng</b>		<b>143.294</b>	<b>31.468</b>	<b>153.204</b>	<b>23.270</b>	<b>152.983</b>	<b>28.436</b>	<b>6,91</b>	<b>- 26,05</b>	<b>- 0,14</b>	<b>22,20</b>	<b>3,38</b>	<b>- 1,92</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng tahun 2015



Gambar 4.25 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Buleleng Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)



**Gambar 4.26 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Buleleng Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

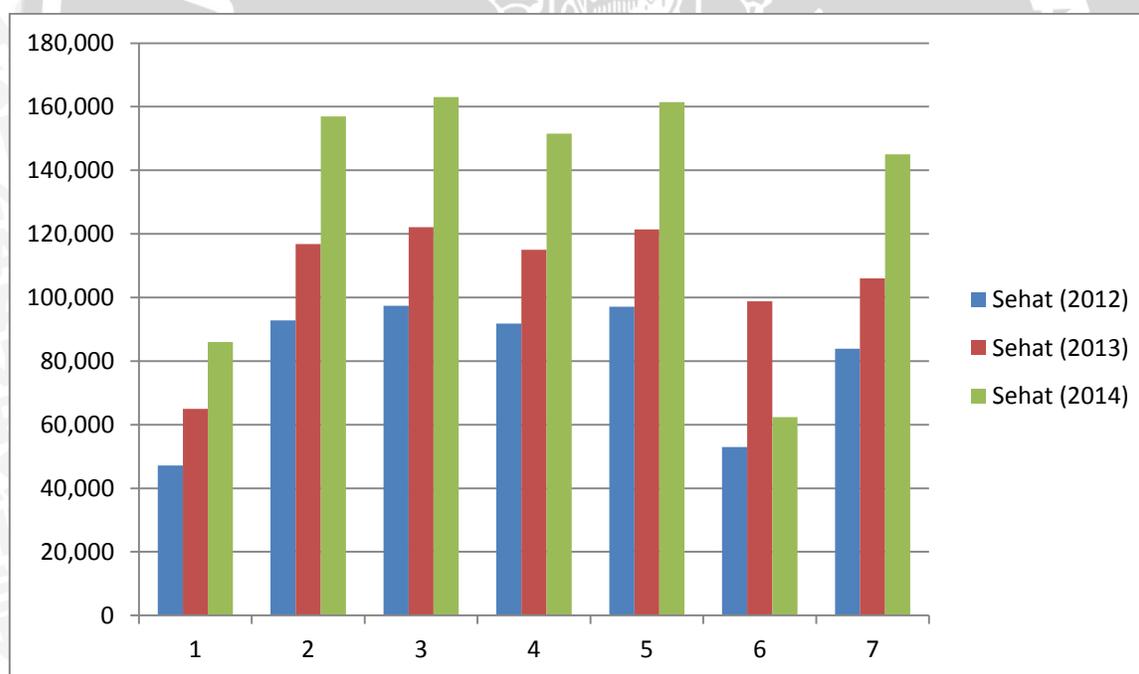
Berdasarkan **Tabel 4.23** terlihat bahwa terjadi fluktuasi baik jumlah rumah sehat maupun rumah tidak sehat di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana jumlah rumah sehat pada tahun 2014 sebanyak 152.983 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,38%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat pada tahun yang sama sebanyak 28.436 unit dengan rata-rata persentase yang mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,92%. Fluktuasi pada rumah tidak sehat dipengaruhi oleh indikator luas lantai, jenis dinding, sumber penerangan, dan sumber air minum. Sedangkan, pada rumah sehat di pengaruhi oleh indikator sumber air minum yang mengalami fluktuasi selama kurun waktu 3 tahun.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada **Tabel 4.24**

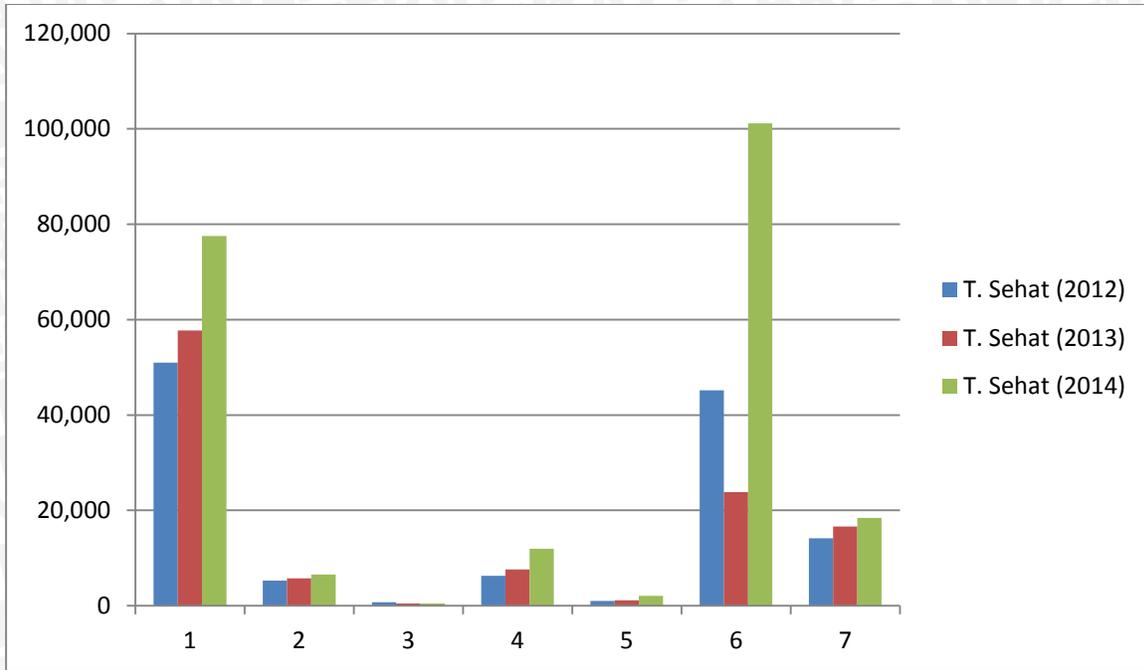
**Tabel 4.24 Indikator Perumahan di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	47.127	50.973	64.930	57.695	85.936	77.564	37,77	13,18	32,35	34,43	35,06	23,81
2.	Jenis lantai	92.803	5.297	116.849	5.776	156.976	6.524	25,91	9,04	34,34	12,95	30,12	10,99
3.	Jenis atap	97.374	726	122.135	490	163.010	490	25,42	- 32,50	33,46	0	29,44	- 16,25
4.	Jenis dinding	91.792	6.308	114.985	7.640	151.565	11.935	25,26	21,11	31,81	56,21	28,53	38,66
5.	Sumber penerangan	97.109	991	121.460	1.165	161.407	2.093	25,07	17,55	32,88	79,65	28,98	48,60
6.	Sumber air minum	52.935	45.165	98.81	23.814	62.359	101.141	86,66	- 47,27	- 36,89	324,71	24,88	138,71
7.	Fasilitas tempat buang air besar	83.915	14.185	106.022	16.603	145.041	18.459	26,34	17,04	36,80	11,17	31,57	14,11
<b>Gianyar</b>		<b>80.436</b>	<b>17.664</b>	<b>106.456</b>	<b>16.169</b>	<b>132.328</b>	<b>31.172</b>	<b>32,34</b>	<b>- 8,46</b>	<b>24,30</b>	<b>92,79</b>	<b>28,32</b>	<b>42,16</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar tahun 2015



**Gambar 4.27 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Gianyar Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.28 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Gianyar Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

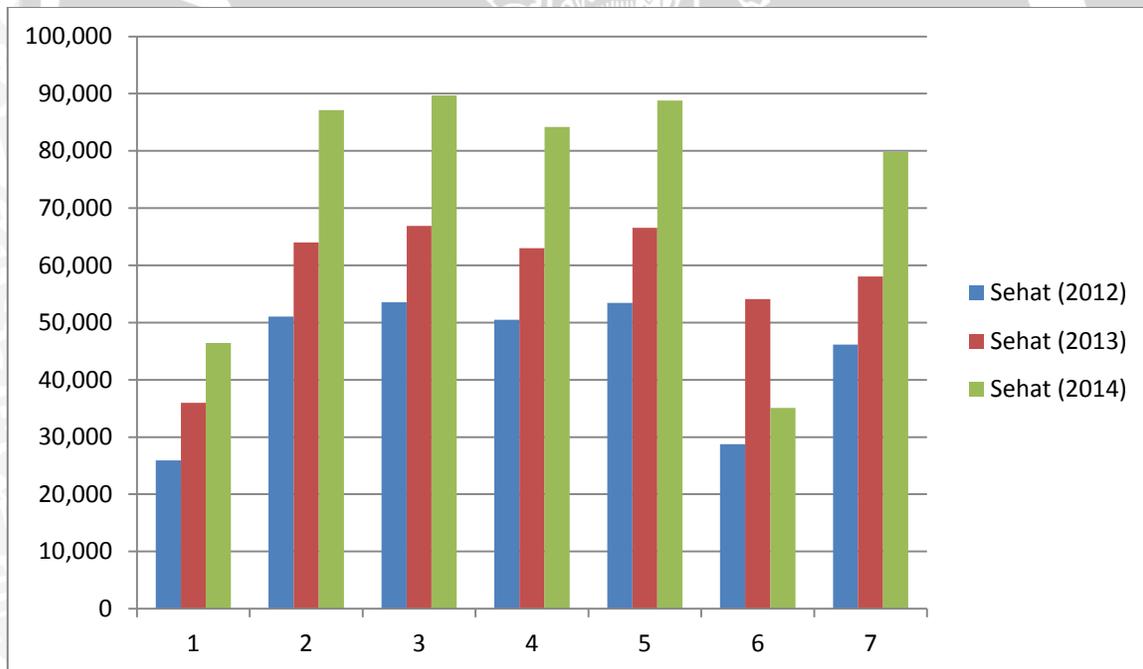
Berdasarkan **Tabel 4.24** terlihat bahwa di Kabupaten Gianyar terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Kabupaten Gianyar sebanyak 132.328 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 28,32%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat terjadi fluktuasi, di mana pada tahun 2014 saja sebanyak 31.172 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 42,16%. Fluktuasi tersebut terjadi akibat adanya fluktuasi dari indikator sumber air minum, di mana pada tahun terakhir jumlah rumah tidak sehat meningkat drastis dengan persentase peningkatan sebesar 324,71% dari tahun sebelumnya, jumlah rumah tidak sehat menjadi sebanyak 101.141 unit. Hal tersebut, menunjukkan bila penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan air bersih pada tahun 2014.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada **Tabel 4.25**

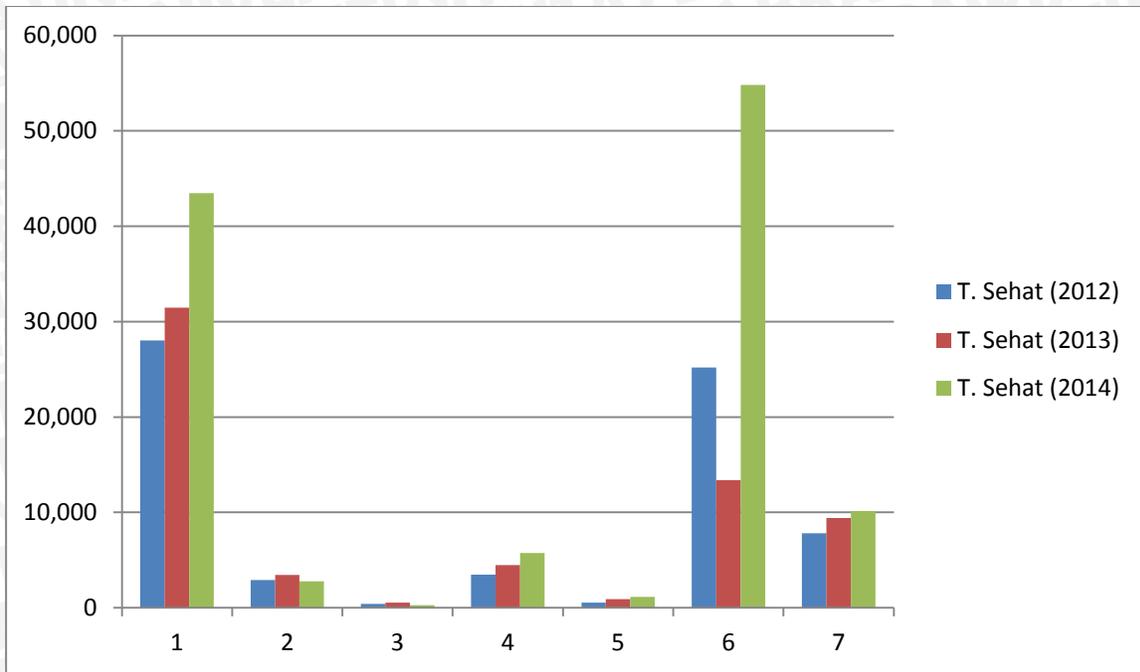
Tabel 4.25 Indikator Perumahan di Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2014 (unit)

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	25.923	28.037	35.985	31.465	46.459	43.474	38,81	12,22	29,10	38,16	33,96	25,19
2.	Jenis lantai	51.046	2.914	64.003	3.447	87.154	2.779	25,38	18,29	36,17	- 19,37	30,77	- 0,54
3.	Jenis atap	53.561	399	66.910	540	89.663	270	24,92	35,33	34,00	- 50,00	29,46	- 7,33
4.	Jenis dinding	50.490	3.470	62.978	4.472	84.177	5.756	24,73	28,87	33,66	28,71	29,19	28,79
5.	Sumber penerangan	53.415	545	66.539	911	88.782	1.151	24,56	67,15	33,42	26,34	28,99	46,75
6.	Sumber air minum	28.771	25.189	54.081	13.369	35.110	54.823	87,97	- 46,92	- 35,07	310,07	26,44	131,57
7.	Fasilitas tempat buang air besar	46.157	7.803	58.047	9.403	79.798	10.135	25,75	20,50	37,47	7,78	31,61	14,14
<b>Jembranan</b>		<b>44.195</b>	<b>9.765</b>	<b>58.363</b>	<b>9.087</b>	<b>73.020</b>	<b>16.913</b>	<b>32,05</b>	<b>- 6,94</b>	<b>25,11</b>	<b>86,12</b>	<b>28,58</b>	<b>39,58</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jembrana tahun 2015



Gambar 4.29 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Jembrana Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)



**Gambar 4.30 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Jembrana Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

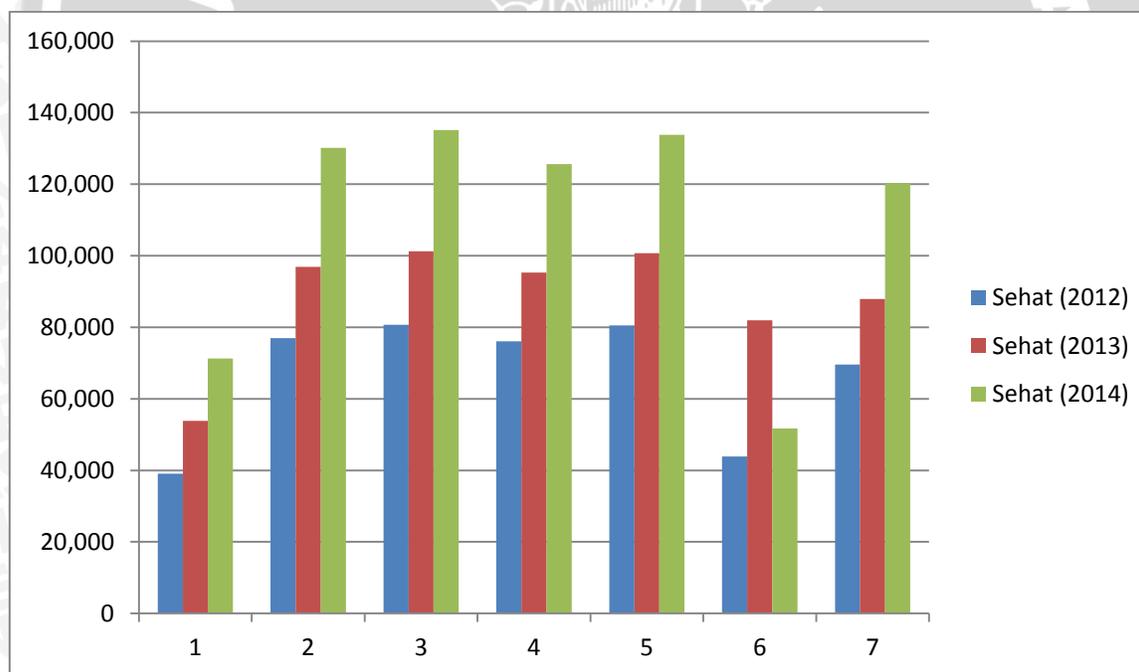
Berdasarkan **Tabel 4.25** terlihat bahwa di Kabupaten Jembrana terjadi peningkatan jumlah rumah sehat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Kabupaten Jembrana sebanyak 73.020 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 28,58%. Khusus untuk indikator sumber air minum pada rumah sehat tahun 2014 jumlahnya sebanyak 35.110 unit, di mana jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 35,07%. Sebaliknya, terjadi peningkatan indikator sumber air bersih pada rumah tidak sehat sebesar 310,07%, yang mana jumlahnya pada tahun 2014 sebanyak 54.823 unit. Hal tersebut, menunjukkan jika pada tahun 2014 penduduk di Kabupaten Jembrana kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada **Tabel 4.26**

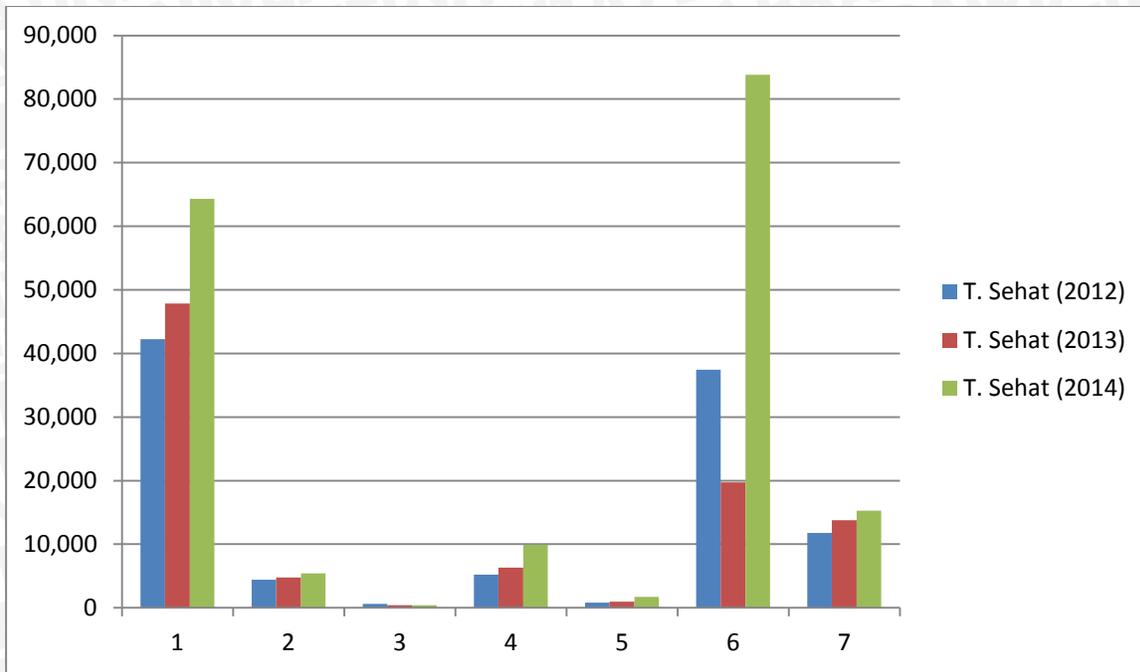
**Tabel 4.26 Indikator Perumahan di Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	39.067	42.253	53.824	47.826	71.236	64.297	37,77	13,18	32,34	34,43	35,06	23,81
2.	Jenis lantai	76.929	4.391	96.862	4.788	130.125	5.408	25,91	9,04	34,34	12,94	30,12	10,99
3.	Jenis atap	80.718	602	101.243	407	135.126	407	25,42	- 32,39	33,46	0	29,44	- 16,19
4.	Jenis dinding	76.091	5.229	95.317	6.333	125.639	9.894	25,26	21,11	31,81	56,22	28,53	38,67
5.	Sumber penerangan	80.499	821	100.684	966	133.798	1.735	25,07	17,66	32,88	79,60	28,98	48,63
6.	Sumber air minum	43.880	37.440	81.909	19.741	51.692	83.841	86,66	- 47,27	- 36,89	324,70	24,88	138,71
7.	Fasilitas tempat buang air besar	69.561	11.759	87.887	13.763	120.258	15.275	26,34	17,04	36,83	10,98	31,58	14,01
<b>Karangasem</b>		<b>66.678</b>	<b>14.642</b>	<b>88.247</b>	<b>13.403</b>	<b>109.696</b>	<b>25.837</b>	<b>32,34</b>	<b>- 8,45</b>	<b>24,30</b>	<b>92,76</b>	<b>28,32</b>	<b>42,15</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem tahun 2015



**Gambar 4.31 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Karangasem Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.32 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Karangasem Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

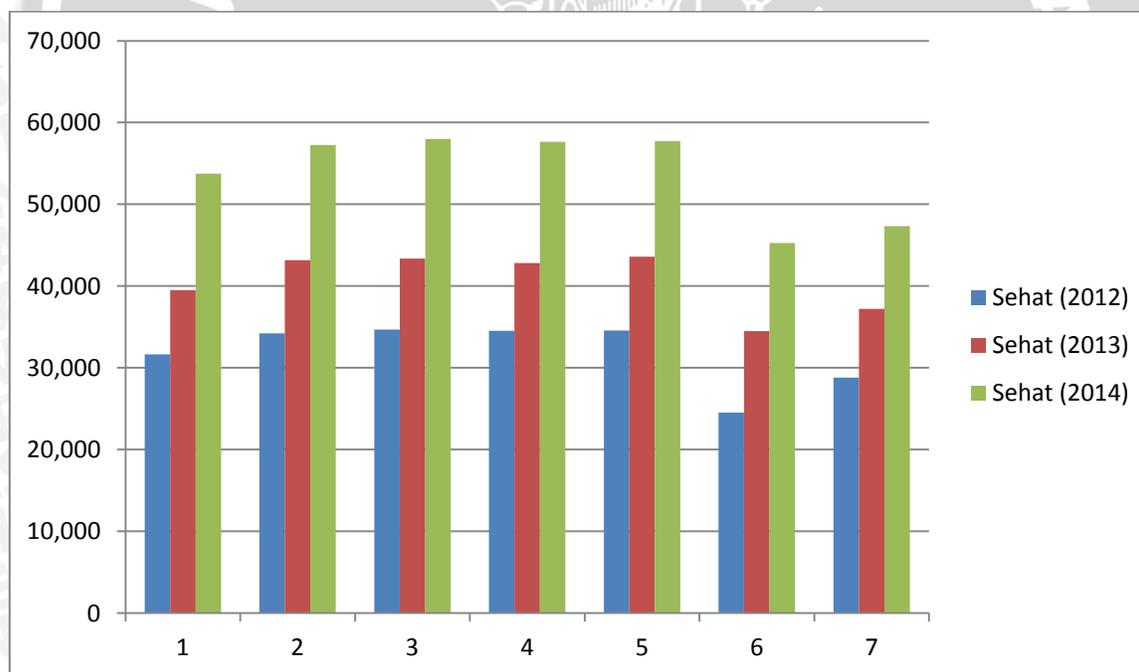
Berdasarkan **Tabel 4.26** terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah sehat di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Jumlah rumah sehat pada tahun 2014 saja sebanyak 109.696 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 28,32%. Sementara itu, jumlah rumah tidak sehat mengalami fluktuasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah rumah tidak sehat meningkat sebesar 92,76% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 25.837 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 42,15%. Khusus untuk indikator sumber air minum pada tahun 2014 jumlah rumah sehat berada di bawah jumlah rumah tidak sehat. Di mana jumlah rumah sehat sebanyak 51.692 unit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 36,89%, dengan rata-rata persentase sebesar 24,88%. Sedangkan, jumlah rumah tidak sehat sebanyak 83,964 unit mengalami peningkatan sebesar 324,70%, dengan rata-rata persentase sebesar 138,71%. Hal tersebut, menunjukkan jika penduduk Kabupaten Karangasem mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Tabel 4.27**

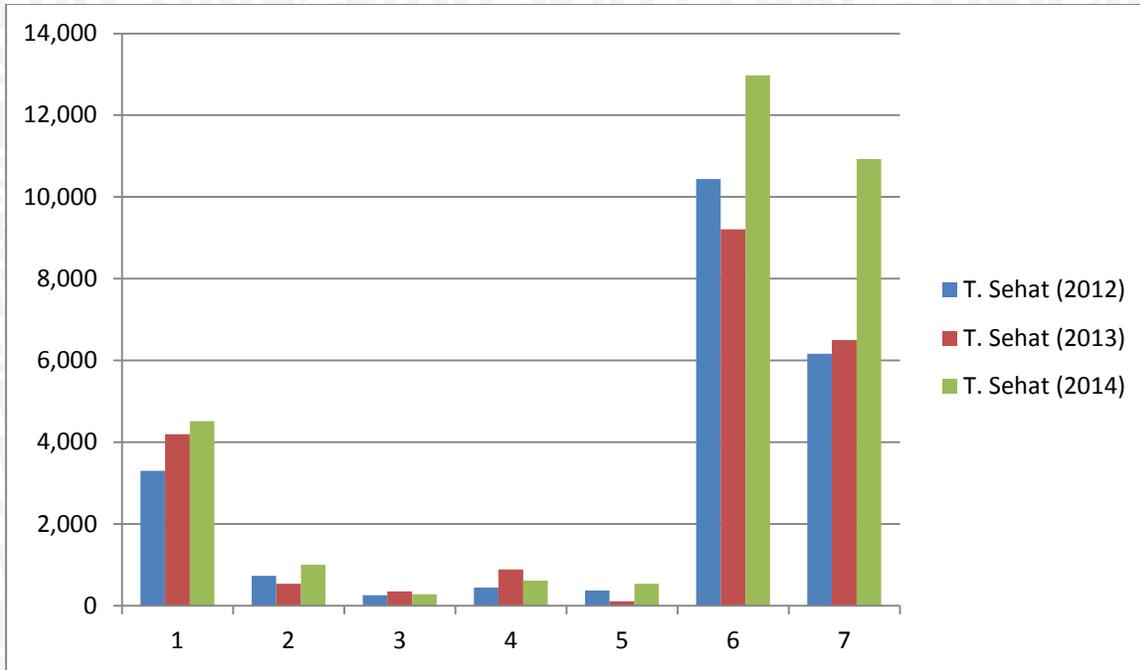
**Tabel 4.27 Indikator Perumahan di Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	31.656	3.304	39.505	4.195	53.745	4.515	24,79	26,96	36,04	7,62	30,42	17,29
2.	Jenis lantai	34.226	734	43.158	542	57.258	1.002	26,09	- 26,15	32,67	84,87	29,38	29,35
3.	Jenis atap	34.701	259	43.346	354	57.980	280	24,91	36,67	33,76	- 20,90	29,33	7,88
4.	Jenis dinding	34.516	444	42.809	891	57.642	618	24,02	100,67	34,64	- 30,63	29,33	35,01
5.	Sumber penerangan	34.582	378	43.586	114	57.724	536	26,03	- 69,84	32,43	370,17	29,23	150,16
6.	Sumber air minum	24.521	10.439	34.489	9.211	45.285	12.975	40,65	- 11,76	31,30	40,86	35,97	14,55
7.	Fasilitas tempat buang air besar	28.790	6.170	37.202	6.498	47.331	10.929	29,21	5,31	27,22	68,19	28,22	36,75
<b>Klungkung</b>		<b>31.856</b>	<b>3.104</b>	<b>40.585</b>	<b>3.115</b>	<b>53.852</b>	<b>4.408</b>	<b>27,40</b>	<b>0,35</b>	<b>32,68</b>	<b>41,50</b>	<b>30,04</b>	<b>20,92</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung tahun 2015



**Gambar 4.33 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Klungkung Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.34 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Klungkung Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

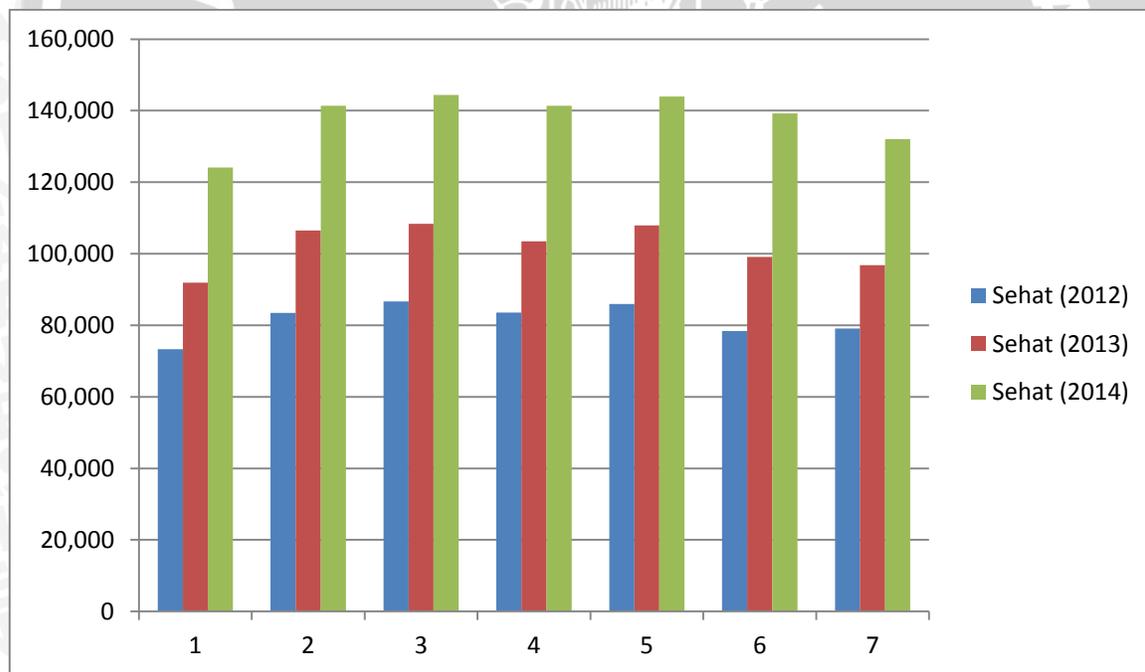
Berdasarkan **Tabel 4.27** terlihat bahwa di Kabupaten Klungkung terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dan tidak sehat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana jumlah rumah sehat pada tahun 2014 sebanyak 53.852 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 30,04%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat sebanyak 4.408 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 20,92%. Meningkatnya jumlah rumah sehat dan tidak sehat tidak lepas dari meningkatnya jumlah perumahan di Kabupaten Klungkung.

Untuk melihat indikator perumahan di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada **Tabel 4.28**

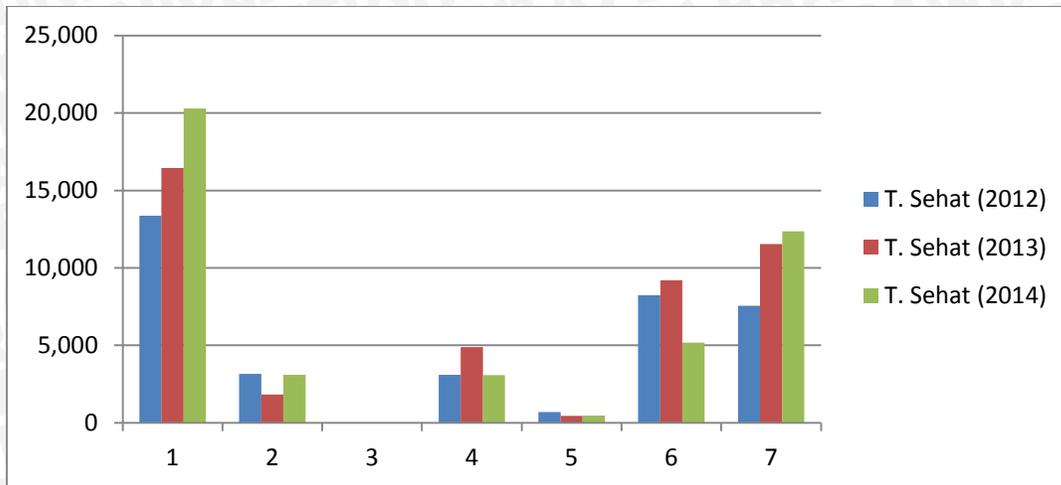
**Tabel 4.28 Indikator Perumahan di Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	73.297	13.363	91.881	16.444	124.140	20.293	25,35	23,05	35,10	23,40	30,23	23,23
2.	Jenis lantai	83.497	3.163	106.494	1.831	141.342	3.091	27,54	- 42,11	32,72	68,81	30,13	13,35
3.	Jenis atap	86.660	0	108.325	0	144.433	0	25,00	0	33,33	0	29,16	0
4.	Jenis dinding	83.558	3.102	103.440	4.885	141.357	3.076	23,79	57,47	36,65	- 37,03	30,22	10,22
5.	Sumber penerangan	85.967	693	107.881	444	143.971	462	25,49	- 35,93	33,45	4,05	29,47	- 15,93
6.	Sumber air minum	78.419	8.241	99.117	9.208	139.262	5.171	26,39	11,73	40,50	- 43,84	33,44	- 16,05
7.	Fasilitas tempat buang air besar	79.095	7.565	96.788	11.537	132.069	12.364	22,36	52,50	36,45	7,16	29,41	29,83
<b>Tabanan</b>		<b>81.499</b>	<b>5.161</b>	<b>101.989</b>	<b>6.336</b>	<b>138.082</b>	<b>6.351</b>	<b>25,14</b>	<b>22,75</b>	<b>35,38</b>	<b>0,24</b>	<b>30,26</b>	<b>11,50</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabanan tahun 2015



**Gambar 4.35 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kabupaten Tabanan Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.36** Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kabupaten Tabanan Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)

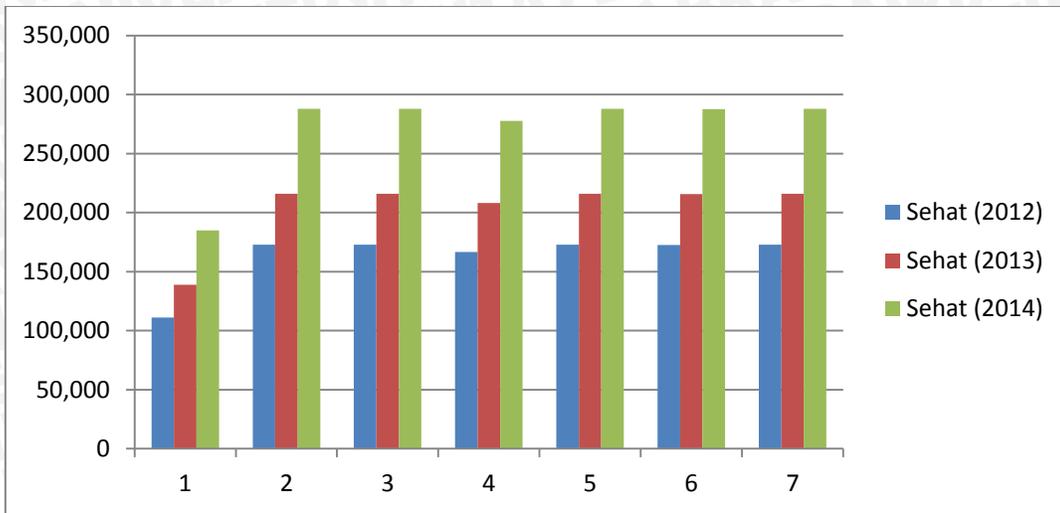
Berdasarkan **Tabel 4.28** terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dan tidak sehat di Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah rumah sehat sebanyak 138.082 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 30,26%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat sebanyak 6.351 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 11,50%. Khusus untuk indikator jenis atap seluruh rumah tangga di Kabupaten Tabanan sudah memiliki atap yang layak, terlihat dari tidak adanya jumlah indikator jenis atap untuk rumah tidak sehat.

Untuk melihat indikator perumahan di Kota Denpasar dapat dilihat pada **Tabel 4.29**

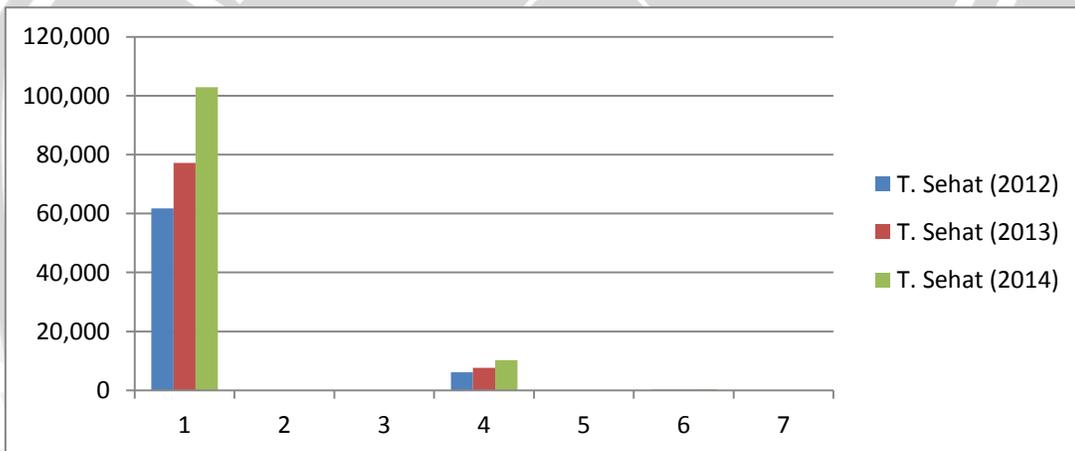
**Tabel 4.29** Indikator Perumahan di Kota Denpasar Tahun 2012-2014 (unit)

No.	Indikator	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Luas lantai	110.990	61.730	138.738	77.162	184.983	102.884	25,00	24,99	33,33	33,33	29,16	29,16
2.	Jenis lantai	172.720	0	215.900	0	287.867	0	25,00	0	33,33	0	29,16	0
3.	Jenis atap	172.720	0	215.900	0	287.867	0	25,00	0	33,33	0	29,16	0
4.	Jenis dinding	166.571	6.149	208.214	7.686	277.619	10.248	25,00	24,99	33,33	33,33	29,16	29,16
5.	Sumber penerangan	172.720	0	215.900	0	287.867	0	25,00	0	33,33	0	29,16	0
6.	Sumber air minum	172.547	173	215.684	216	287.579	288	25,00	24,85	33,33	33,33	29,16	29,09
7.	Fasilitas tempat buang air besar	172.720	0	215.900	0	287.867	0	25,00	0	33,33	0	29,16	0
<b>Denpasar</b>		<b>162.998</b>	<b>9.722</b>	<b>203.748</b>	<b>12.152</b>	<b>271.664</b>	<b>16.203</b>	<b>25,00</b>	<b>24,99</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>

Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar tahun 2015



**Gambar 4.37 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Kota Denpasar Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



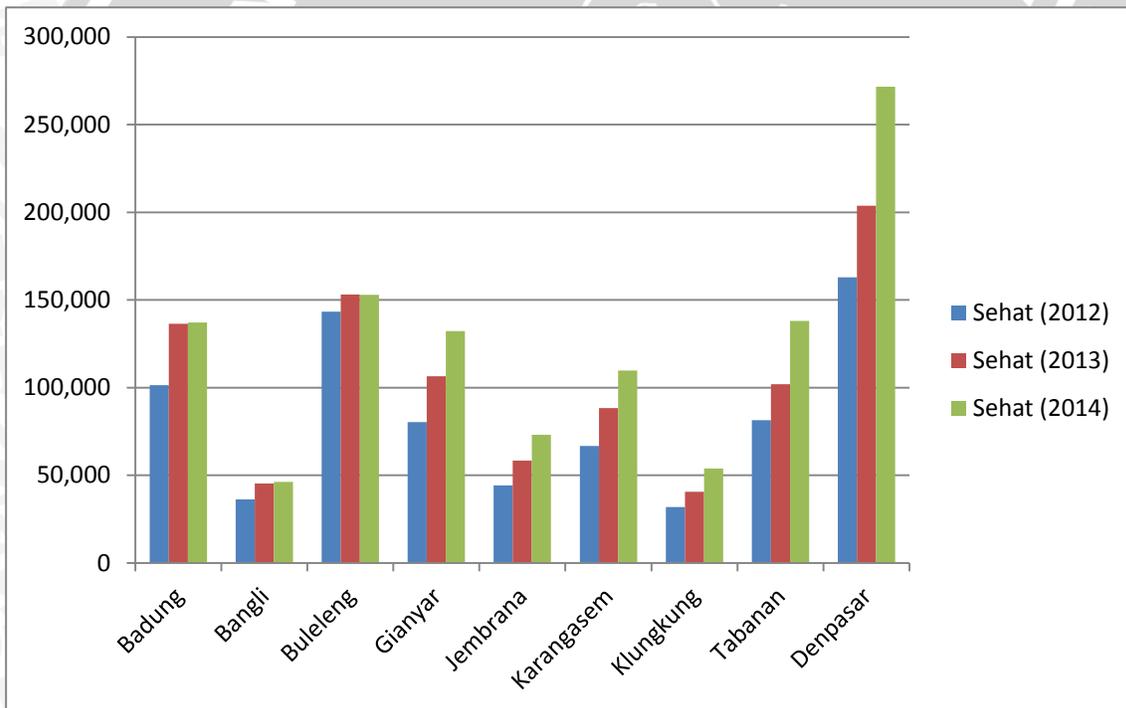
**Gambar 4.38 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Kota Denpasar Menurut Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.29** terlihat bahwa di Kota Denpasar terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dan tidak sehat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Jumlah rumah sehat di Kota Denpasar pada tahun 2014 saja sebanyak 271.664 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 29,16%. Sedangkan, untuk jumlah rumah tidak sehat sebanyak 16.203 unit. Secara umum ke-7 indikator perumahan mengalami peningkatan jumlah rumah sehat di Kota Denpasar. Hal tersebut terlihat dari 4 indikator, yakni indikator jenis lantai, jenis atap, sumber penerangan, dan fasilitas tempat buang air besar seluruh rumah tangga yang ada di Kota Denpasar sudah layak.

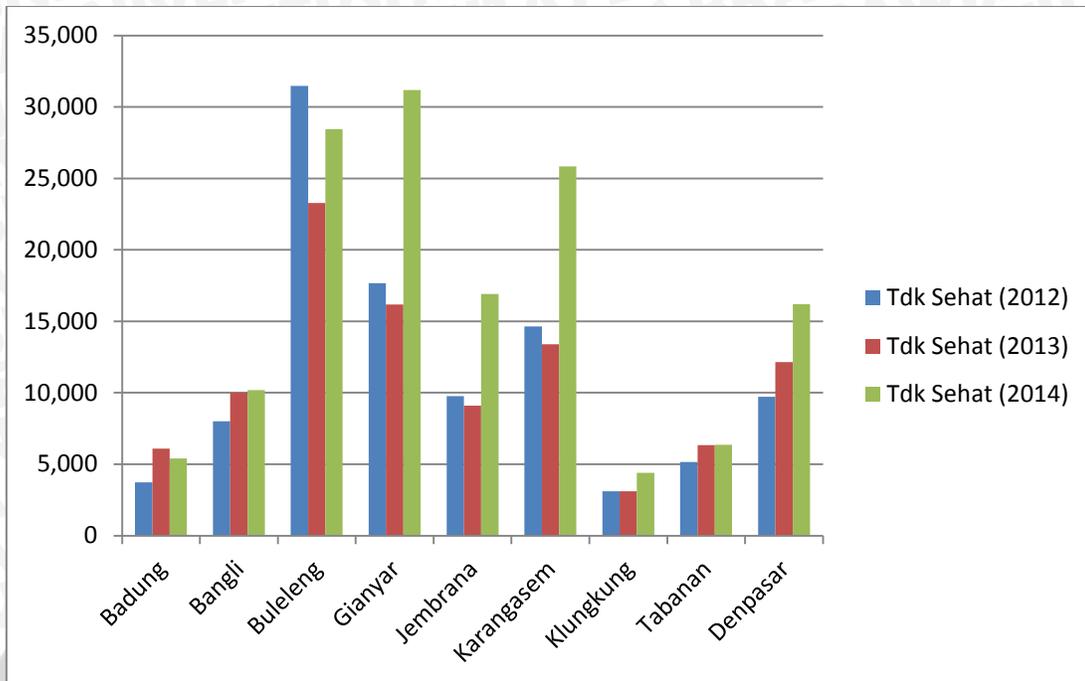
Untuk melihat indikator perumahan di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.30**

**Tabel 4.30 Indikator Perumahan di Provinsi Bali  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun						Persentase Peningkatan				Rata-Rata Persentase	
		2012		2013		2014		2012-2013		2013-2014		Sehat	T. Sehat
		Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat	Sehat	T. Sehat		
1.	Badung	101.331	3.739	136.387	6.094	137.083	5.398	34,59	62,98	0,51	- 11,42	17,55	25,78
2.	Bangli	36.327	8.013	45.408	10.017	46.227	10.198	24,99	25,00	1,80	1,80	13,40	13,40
3.	Buleleng	143.294	31.468	153.204	23.270	152.983	28.436	6,91	- 26,05	- 0,14	22,20	3,38	- 1,92
4.	Gianyar	80.436	17.664	106.456	16.169	132.328	31.172	32,34	- 8,46	24,30	92,78	28,32	42,16
5.	Jembrana	44.195	9.765	58.363	9.087	73.020	16.913	32,05	- 6,94	25,11	86,12	28,58	39,58
6.	Karangasem	66.678	14.642	88.247	13.403	109.696	25.837	32,34	- 8,46	24,30	92,77	28,32	42,15
7.	Klungkung	31.856	3.104	40.585	3.115	53.852	4.408	27,40	0,35	32,68	41,50	30,04	20,93
8.	Tabanan	81.499	5.161	101.989	6.336	138.082	6.351	25,14	22,76	35,38	0,23	30,26	11,50
9.	Denpasar	162.998	9.722	203.748	12.152	271.664	16.203	25,00	24,99	33,33	33,33	29,16	29,16
	<b>Bali</b>	<b>748.614</b>	<b>103.278</b>	<b>934.387</b>	<b>99.643</b>	<b>1.114.935</b>	<b>144.916</b>	<b>24,81</b>	<b>- 3,51</b>	<b>19,32</b>	<b>45,43</b>	<b>22,06</b>	<b>20,95</b>



**Gambar 4.39 Perkembangan Jumlah Rumah Sehat di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**



**Gambar 4.40 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Sehat di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Perumahan Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.30** terlihat bahwa di Provinsi Bali terjadi peningkatan jumlah rumah sehat dan tidak sehat setiap tahunnya selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana jumlah rumah sehat Provinsi Bali pada tahun 2014 saja sebanyak 1.114.935 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 22,06%. Sementara itu, untuk jumlah rumah tidak sehat sebanyak 144.916 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 20,95%. Secara umum dari ke-9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Buleleng yang mengalami fluktuasi dalam hal jumlah rumah sehat selama kurun waktu 3 tahun. Sementara itu, untuk jumlah rumah tidak sehat mengalami peningkatan terdapat pada 4 Kabupaten/Kota, yaitu di Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

#### 4.1.3 Gambaran Umum Pariwisata Provinsi Bali

Bali yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia adalah pulau terbaik nomor 6 di dunia pada tahun 2013 dan nomor 5 di dunia pada tahun 2014, disamping itu Bali menjadi pulau terbaik se-Asia tahun 2014 menurut majalah *Travel+Leisure* tahun 2014. Majalah *Travel+Leisure* merupakan majalah yang tiap tahunnya melakukan perankingan terhadap pariwisata dan merupakan majalah wisata terkemuka yang berbasis di New York, Amerika

Serikat. Perankingan yang dilakukan oleh Majalah Travel+Leisure dapat dilihat pada **Tabel 4.31**

**Tabel 4.31 Peringkat Pulau Terbaik di Dunia**

RANK 2014	RANK 2013	NAME	SCORE
1	4	Santorini, Greece	89,98
2	3	Maui, Hawaii	89,51
3	7	Kauai, Hawaii	88,59
4	-	Hawaii, the Big Island	87,89
5	6	Bali, Indonesia	86,82
6	-	Oahu, Hawaii	86,71
7	10	Galápagos, Ecuador	86,37
8	-	Virgin Gorda, British Virgin Islands	86,22
9	-	Vancouver Island, Canada	86,20
10	-	San Juan Islands, Washington	85,78

Sumber: <http://www.travelandleisure.com>

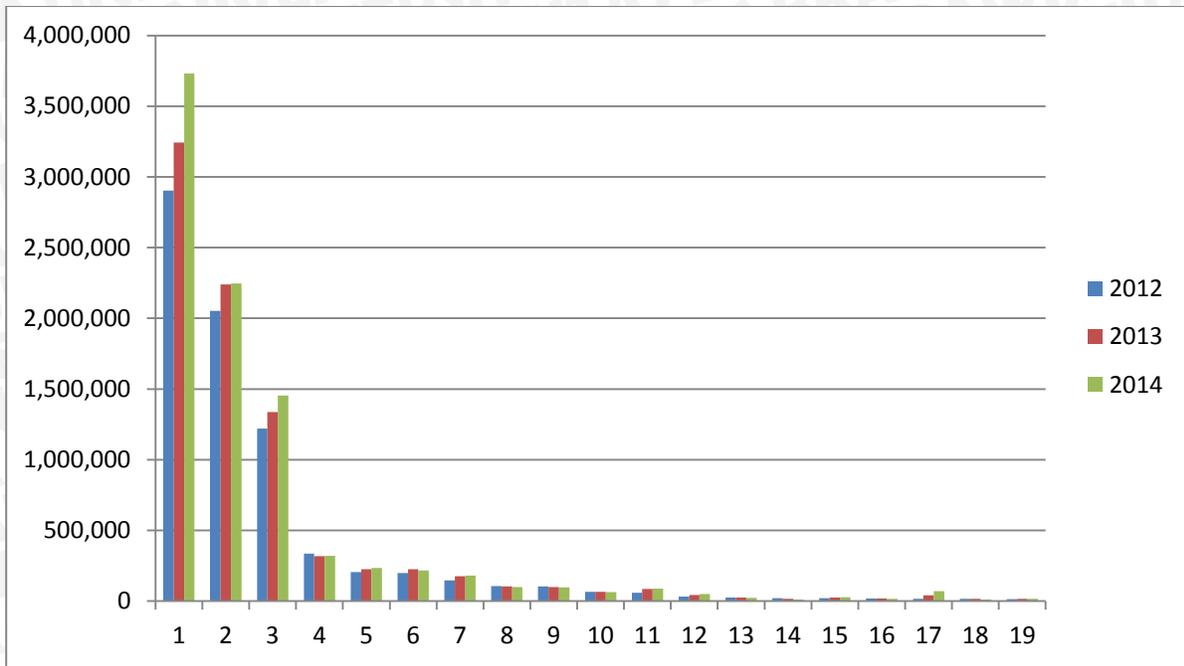
Berdasarkan **Tabel 4.31** Pulau Bali menduduki peringkat 6 dari 10 pulau terbaik dunia pada tahun 2013 dan naik menjadi peringkat 5 pada tahun 2014 dengan nilai 86,82 menurut Majalah Travel+Leisure Tahun 2014. Naiknya ranking Pulau Bali tersebut akan mampu membawa dampak bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Bali.

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk, sesuai dengan data dari Kememparekraf tahun 2014, dapat dilihat pada **Tabel 4.32**

**Tabel 4.32 Perkembangan Wisatawan Mancanegara  
Menurut Pintu Masuk Tahun 2012-2014 (wisman)**

No.	Pintu Masuk	Provinsi	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
			2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Ngurah Rai	Bali	2.902.125	3.241.889	3.731.735	11,70	15,10	13,40
2.	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta	2.053.850	2.240.502	2.246.437	9,08	0,26	4,67
3.	Batam	Kep. Riau	1.219.608	1.336.430	1.454.110	9,57	8,80	9,19
4.	Tanjung Uban	Kep. Riau	336.547	318.154	320.861	- 5,46	0,85	- 2,30
5.	Polonia/Kualanamu	Sumatera Utara	205.845	225.550	234.724	9,57	4,06	6,82
6.	Juanda	Jawa Timur	197.776	225.041	217.193	13,78	- 3,48	5,14
7.	Husein Sastranegara	Jawa Barat	146.736	176.318	180.392	20,16	2,31	11,23
8.	Tanjung Balai Karimun	Kep. Riau	107.499	104.889	100.782	- 2,42	- 3,91	- 3,17
9.	Tanjung Pinang	Kep. Riau	103.785	99.593	97.672	- 4,03	- 1,92	- 2,98
10.	Tanjung Periok	DKI Jakarta	66.168	65.227	64.941	- 1,42	- 0,43	- 0,93
11.	Adi Sucipto	DIY	58.926	86.020	89.156	45,97	3,64	24,81
12.	Minangkabau	Sumatera Barat	32.768	44.135	50.196	34,68	13,73	24,21
13.	Entikong	Kalimantan Barat	25.897	24.856	22.464	- 4,01	- 9,62	- 6,82
14.	Adi Sumarmo	Jawa Tengah	21.612	17.738	12.911	- 17,92	- 27,21	- 22,56
15.	Sultan Syarif Kasim II	Riau	21.387	25.946	27.382	21,31	5,53	13,42
16.	Sam Ratulangi	Sulawesi Utara	19.111	19.917	17.279	4,21	- 13,24	- 4,51
17.	Bandara Internasional Lombok (BIL)	NTB	17.032	40.380	69.881	137,08	73,05	105,07
18.	Sepinggan	Kalimantan Timur	16.828	16.904	13.156	0,45	- 22,17	- 10,86
19.	Makassar	Sulawesi Selatan	13.881	17.730	15.713	27,72	- 11,37	8,17
19 Pintu Masuk Utama			7.567.381	8.327.219	8.966.985	10,04	7,68	8,86
Pintu Masuk Lainnya			477.081	474.910	468.426	- 0,45	- 1,36	- 0,91
<b>Total</b>			<b>8.044.462</b>	<b>8.802.129</b>	<b>9.435.411</b>	<b>9,41</b>	<b>7,19</b>	<b>8,30</b>

Sumber: Pusdatin Kemendparekrif tahun 2015



**Gambar 4.41 Perkembangan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk Tahun 2012-2014 (wisman)**

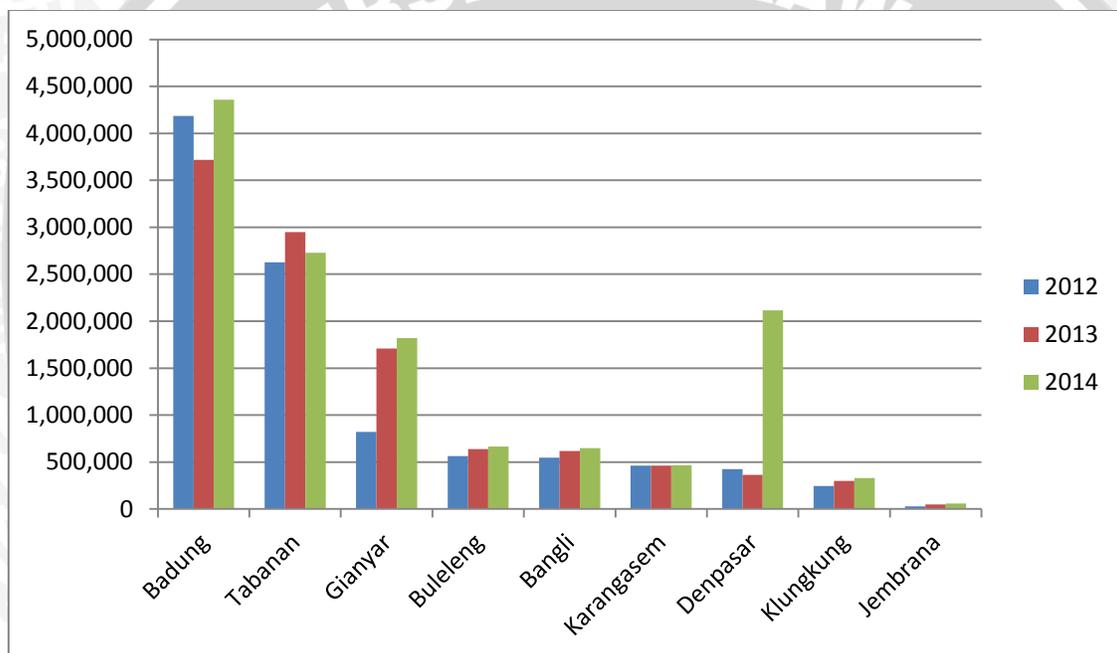
Berdasarkan **Tabel 4.32** terlihat bahwa perkembangan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali menduduki peringkat pertama di Indonesia menurut pintu masuk wisatawan kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 saja, Bandara Internasional Ngurah Rai kedatangan wisatawan sebanyak 3.731.735 wisman dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 13,40%. Sedangkan, kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk lainnya sebanyak 468.426 wisman dengan rata-rata persentase mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,91%. Secara umum, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2014 saja sebanyak 9.435.411 wisman dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 8,30%.

Menurut data dari Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015, perkembangan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali baik yang dilakukan para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dapat diketahui pada **Tabel 4.33**

**Tabel 4.33 Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (wisatawan)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	4.184.175	3.716.376	4.356.816	- 11,18	17,23	3,02
2.	Tabanan	2.626.702	2.948.244	2.726.803	12,24	- 7,51	2,36
3.	Gianyar	819.917	1.707.060	1.821.398	108,19	6,69	57,44
4.	Buleleng	562.895	638.147	663.826	13,36	4,02	8,69
5.	Bangli	548.152	616.637	647.607	12,49	5,02	8,75
6.	Karangasem	462.223	461.515	464.054	- 0,15	0,55	0,19
7.	Denpasar	423.539	364.340	2.115.179	- 13,97	480,55	233,28
8.	Klungkung	245.199	298.979	328.313	21,93	9,81	15,87
9.	Jembrana	29.198	49.170	59.246	68,40	20,49	44,44
	<b>Bali</b>	<b>9.902.000</b>	<b>10.800.468</b>	<b>13.183.242</b>	<b>9,07</b>	<b>22,06</b>	<b>15,56</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.42 Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (wisatawan)**

Berdasarkan **Tabel 4.33** jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 saja jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali sebanyak 13.183.242 wisatawan dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 15,56%. Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, yaitu sebanyak 4.356.816 wisatawan pada tahun 2014 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,02%. Namun, rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 233,28%. Sedangkan, Kabupaten Jembrana memiliki jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara Kabupaten/Kota lainnya, yaitu sebanyak 59.246

wisatawan pada tahun 2014 dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 44,44%. Akan tetapi rata-rata persentase peningkatan paling rendah terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu sebesar 0,19%.

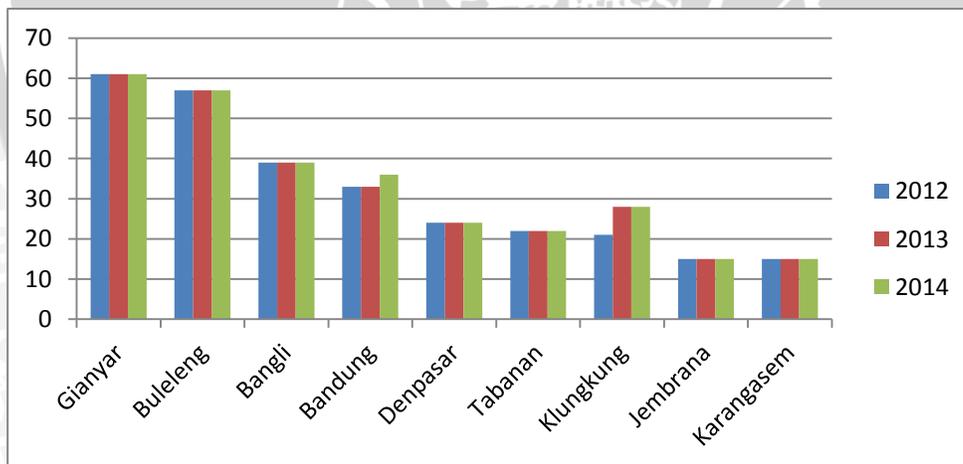
#### A. Daya Tarik Wisata

Provinsi Bali merupakan tujuan wisata di Indonesia yang sudah mendunia dengan beragam daya tarik wisatanya. Untuk jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2014 dapat dilihat pada **Tabel 4.34**

**Tabel 4.34 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (obyek)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Peningkatan Persentase		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Gianyar	61	61	61	0	0	0
2.	Buleleng	57	57	57	0	0	0
3.	Bangli	39	39	39	0	0	0
4.	Badung	33	33	36	0	9,09	4,54
5.	Denpasar	24	24	24	0	0	0
6.	Tabanan	22	22	22	0	0	0
7.	Klungkung	21	28	28	33,33	0	16,66
8.	Jembrana	15	15	15	0	0	0
9.	Karangasem	15	15	15	0	0	0
	<b>Bali</b>	<b>287</b>	<b>294</b>	<b>297</b>	<b>2,43</b>	<b>1,02</b>	<b>1,72</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.43 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (obyek)**

Berdasarkan **Tabel 4.34** terlihat bahwa jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 saja jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali sebanyak 297 obyek, dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 1,72%. Kabupaten Gianyar memiliki jumlah daya tarik wisata paling

banyak diantara Kabupaten/Kota lainnya dengan 61 buah daya tarik wisata. Namun, tidak ada peningkatan jumlah daya tarik wisata selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan, Kabupaten Karangasem memiliki jumlah daya tarik wisata paling sedikit dengan 15 obyek daya tarik wisata. Untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 16,66%.

## **B. Aksesibilitas**

Provinsi Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api namun, jaringan jalan yang ada di Provinsi Bali tergolong sangat baik dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, jaringan jalan tersedia dengan baik khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan, yakni Legian, Kuta, Sanur, Nusa Dua, Ubud, dll. Sebagian besar penduduk memiliki kendaraan pribadi dan memilih menggunakannya. Sementara itu, armada taksi, angkutan pariwisata, dan moda transportasi massal. Moda transportasi massal diberi nama Trans Sarbagita (Trans Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menggunakan bus besar dengan fasilitas AC dan tarif Rp 3.500. Adanya transportasi tersebut bertujuan untuk memberi kenyamanan lebih terhadap para wisatawan di Provinsi Bali.

Sampai sekarang, transportasi di Provinsi Bali umumnya dibangun di Provinsi Bali bagian selatan sekitar Denpasar, Kuta, Nusa Dua, dan Sanur, sedangkan wilayah utara kurang memiliki akomodasi yang baik.

Jenis kendaraan umum di Bali antara lain:

1. Dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda sebagai penarik dikenal sebagai delman di tempat lain.
2. Ojek, taksi sepeda motor.
3. Bemo/angkot, melayani dalam dan antarkota.
4. Bus Trans Sarbagita :
  - a. Koridor 1 (Kota - Garuda Wisnu Kencana atau GWK)
  - b. Koridor 2 (Nusa Dua - Batubulan).
5. Taksi.
6. Komotra, bus yang melayani perjalanan ke kawasan pantai Kuta dan sekitarnya
7. Bus, melayani hubungan antarkota, pedesaan, dan antarprovinsi.

Pulau Bali terhubung dengan Pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dengan Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi yang lama tempuhnya sekitar 30-45 menit. Penyeberangan ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar yang memakan waktu sekitar 4-5 jam lamanya tergantung cuaca.

Sementara untuk transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah Rai dengan destinasi ke sejumlah kota besar di Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Timor Leste, RRC serta Jepang. Landas pacu dan pesawat terbang yang datang dan pergi bisa terlihat dengan jelas dari pantai dan menjadi semacam hiburan tambahan bagi para wisatawan yang menikmati pantai di Pulau Bali.

Untuk transportasi darat antar pulau di Provinsi Bali ada terminal Ubung-Denpasar dan terminal Mengwi yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Terminal Ubung di Pulau Bali ini melayani berbagai rute antar pulau tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Madura, Jember, dll. Angkutan antar pulau dilayani oleh armada bus besar dengan kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Terminal Ubung relatif ramai mulai pukul 15.00-18.00 wita, karena pada jam tersebut banyak bus yang mulai berangkat ke kota tujuan masing-masing.

Keberadaan sarana transportasi tersebut sangat menunjang perkembangan ekonomi, termasuk juga sektor pariwisata di Provinsi Bali. Permasalahan setiap tahunnya masih berupa kondisi jalan yang rusak. Hal tersebut, perlu diperhatikan dengan tegas melalui peningkatan kualitas proyek dan penggunaan anggaran agar dapat membiayai pembangunan jalan, karena infrastruktur jalan merupakan unsur penting dalam perkembangan ekonomi dan pariwisata. Selain permasalahan tersebut, masih banyak calo yang agak memaksa penumpang di terminal Ubung.

### **C. Fasilitas Pariwisata**

Provinsi Bali memiliki fasilitas pariwisata yang keberadaannya menunjang keberlangsungan kegiatan pariwisata. Fasilitas pariwisata tersebut meliputi akomodasi wisata, restoran dan rumah makan, bar, bank, pasar tradisional, dll. Keberadaan fasilitas pariwisata berupa akomodasi wisata telah banyak berkembang di Provinsi Bali. Akomodasi wisata yang terdapat di Provinsi Bali mulai dari hotel berbintang hingga berupa pondok wisata. Wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali akan sangat terbantu dengan adanya kelas akomodasi wisata

yang berkembang tersebut. Karena, tidak semua wisatawan yang datang ke Provinsi Bali memiliki kemampuan finansial yang tinggi.

Perkembangan restoran dan rumah makan di Provinsi Bali lebih banyak berkembang di sekitar Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Sedangkan untuk perkembangan bar, ada yang berdiri sendiri tetapi lebih banyak menjadi bagian dari bangunan hotel. Mengenai fasilitas pariwisata yakni akomodasi wisata, restoran dan rumah makan, serta bar lebih detail dijelaskan pada bagian industri pariwisata.

Fasilitas ekonomi berupa anjungan tunai mandiri (ATM) yang dimiliki oleh bank, baik bank nasional, swasta, maupun daerah, keberadaannya menunjang kegiatan pariwisata khususnya bagi wisatawan. Fasilitas tersebut banyak terdapat di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

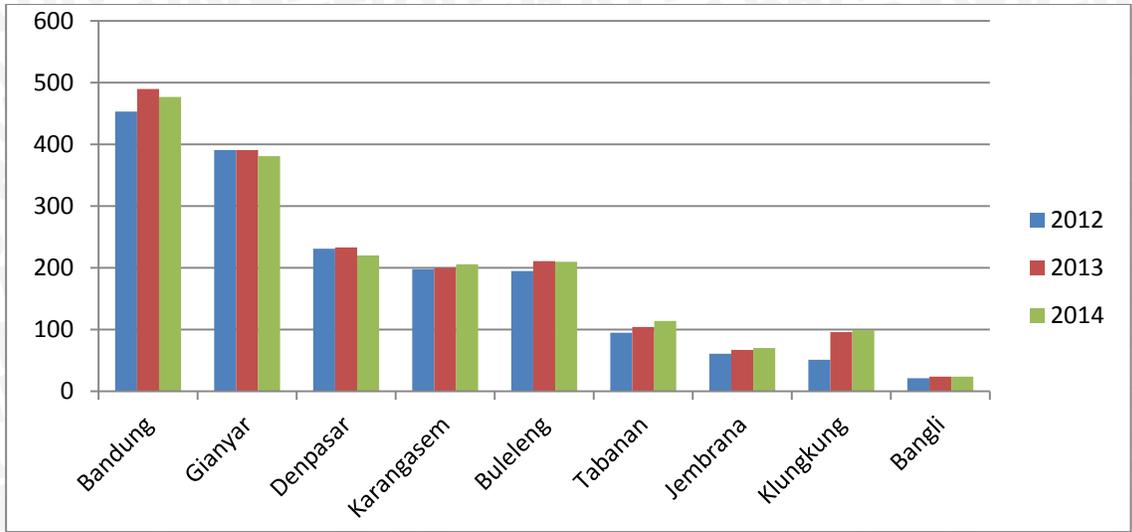
### 1. Akomodasi wisata

Tumbuhnya akomodasi wisata merupakan dampak dari kegiatan pariwisata yang berkembang di Provinsi Bali. Tumbuhnya akomodasi wisata selain menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Bali, juga memberikan nilai positif terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat di Provinsi Bali. Jumlah akomodasi wisata (hotel berbintang, hotel melati, dan pondok wisata) di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.35**

**Tabel 4.35 Jumlah Akomodasi Wisata  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	453	490	477	8,16	- 2,65	2,75
2.	Gianyar	391	391	381	0	- 2,55	- 1,27
3.	Denpasar	231	233	220	0,86	- 5,57	- 2,35
4.	Karangasem	198	200	206	1,01	3,00	2,00
5.	Buleleng	195	211	210	8,20	- 0,47	3,86
6.	Tabanan	95	104	114	9,47	9,61	9,54
7.	Jembrana	61	67	70	9,83	4,47	7,15
8.	Klungkung	51	96	99	88,23	3,12	45,68
9.	Bangli	21	24	24	14,28	0	7,14
<b>Bali</b>		<b>1.696</b>	<b>1.816</b>	<b>1.801</b>	<b>7,07</b>	<b>- 0,82</b>	<b>3,12</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.44 Jumlah Akomodasi Wisata di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.35** penyebaran pembangunan sarana akomodasi wisata di Provinsi Bali masih didominasi oleh Kabupaten Badung, dengan jumlah akomodasi wisata pada tahun 2014 saja sebanyak 477 unit. Kabupaten Badung memiliki rata-rata persentase peningkatan sebesar 2,75%. Namun, rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 45,68%. Sedangkan, Kabupaten Bangli memiliki jumlah akomodasi wisata paling sedikit, yaitu sebanyak 24 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 7,14%. Akan tetapi, untuk rata-rata persentase yang mengalami penurunan paling tajam terdapat di Kota Denpasar, yaitu menurun sebesar 2,35%. Provinsi Bali memiliki jumlah akomodasi wisata pada tahun 2014 saja sebanyak 1.801 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,12%.

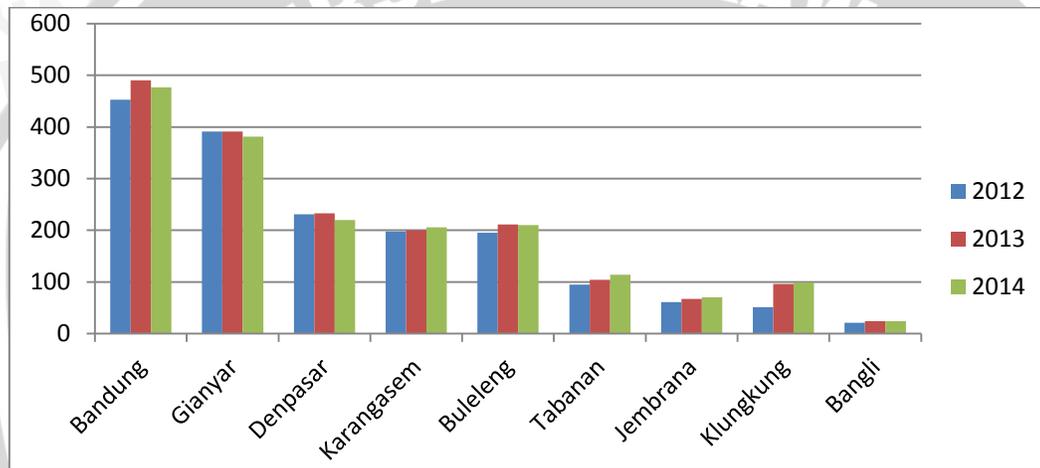
**2. Restoran dan rumah makan**

Keberadaan restoran dan rumah makan di Provinsi Bali sebagai bagian dari industri pariwisata merupakan suatu hal yang positif untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan. Jumlah restoran dan rumah makan di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.36**

**Tabel 4.36 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	623	96	833	- 84,59	767,70	341,55
2.	Gianyar	238	378	405	58,82	7,14	32,98
3.	Jembrana	136	136	76	0	- 44,11	- 22,05
4.	Karangasem	95	246	70	158,94	- 71,54	43,70
5.	Denpasar	76	72	449	- 5,26	523,61	259,17
6.	Buleleng	53	53	145	0	173,58	86,79
7.	Tabanan	40	40	32	0	- 20,00	- 10,00
8.	Klungkung	39	31	31	- 20,51	0	- 10,25
9.	Bangli	39	17	17	- 56,41	0	- 28,20
<b>Bali</b>		<b>1.339</b>	<b>1.069</b>	<b>2.058</b>	<b>- 20,16</b>	<b>92,51</b>	<b>36,17</b>

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.45 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.36** terlihat bahwa jumlah restoran dan rumah makan di Provinsi Bali didominasi oleh Kabupaten Badung, yaitu sebanyak 833 unit pada tahun 2014 dengan rata-rata persentase peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 341,55%. Padahal selama kurun waktu 3 tahun jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Kabupaten Bangli menjadi Kabupaten dengan jumlah restoran dan rumah makan paling sedikit, yaitu sebanyak 17 unit dengan rata-rata persentase mengalami penurunan yang paling tajam, yaitu sebesar 28,20%. Jumlah restoran dan rumah makan di Provinsi Bali pada tahun 2014 saja sebanyak 2.058 unit dengan rata-rata persentase peningkatannya sebesar 36,17%.

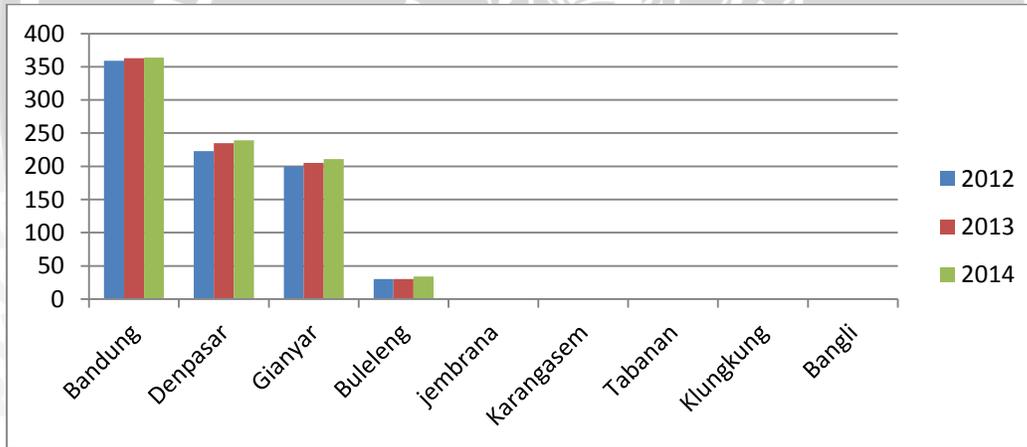
**3. Bar**

Keberadaan bar di Provinsi Bali ada yang terlepas sendiri atau bergabung menjadi satu dengan hotel atau rumah makan. Berdasarkan data dari Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015 jumlah bar di Provinsi Bali tiap tahun dapat dilihat pada **Tabel 4.37**

**Tabel 4.37 Jumlah Bar di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	359	363	364	1,11	0,27	0,69
2.	Denpasar	223	235	239	5,38	1,70	3,54
3.	Gianyar	200	205	211	2,50	2,92	2,71
4.	Buleleng	30	30	34	0	13,33	6,66
5.	Jembrana	0	0	0	0	0	0
6.	Karangasem	0	0	0	0	0	0
7.	Tabanan	0	0	0	0	0	0
8.	Klungkung	0	0	0	0	0	0
9.	Bangli	0	0	0	0	0	0
<b>Bali</b>		<b>812</b>	<b>833</b>	<b>848</b>	<b>2,58</b>	<b>1,80</b>	<b>2,19</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.46 Jumlah Bar di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.37** terlihat bahwa bar di Provinsi Bali hanya terdapat pada 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng. Dari ke-4 Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Badung mendominasi dengan jumlah bar pada tahun 2014 saja sebanyak 364 unit, yang memiliki rata-rata persentase peningkatan paling rendah, yaitu sebesar 0,69%. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah bar paling sedikit di antara ke-4 Kabupaten/Kota, yaitu sebanyak 34 unit dengan rata-rata persentase peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 6,66%. Secara umum jumlah bar di

Provinsi Bali mengalami peningkatan dengan jumlah bar sebanyak 848 unit pada tahun 2014, di mana rata-rata persentase peningkatan sebesar 2,19%.

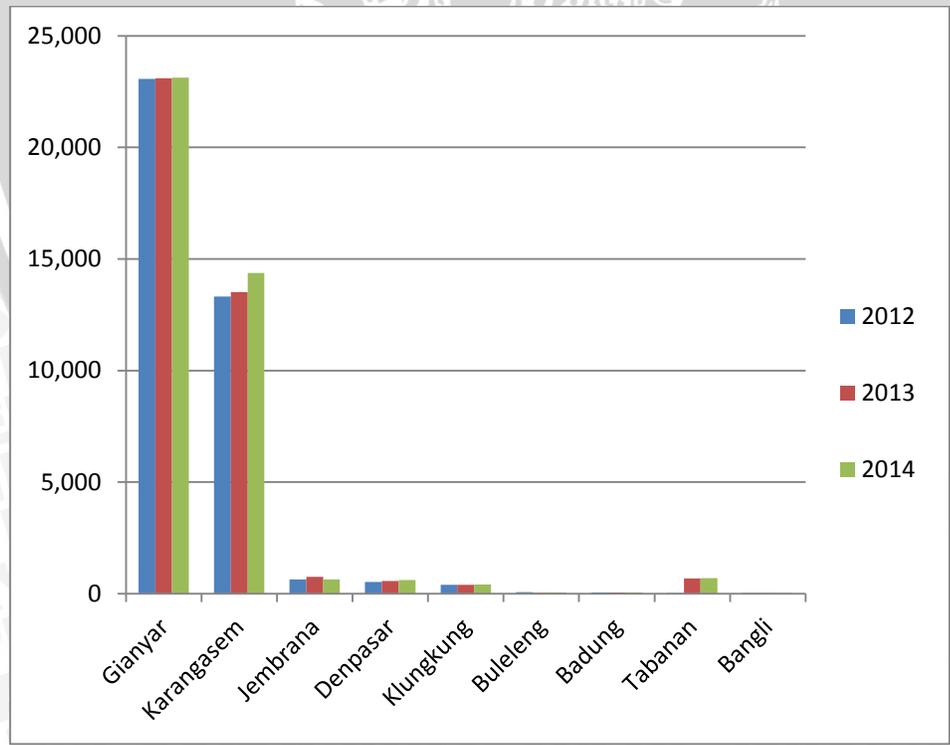
**4. Industri kecil dan menengah**

Keberadaan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Bali sebagai bagian dari industri pariwisata merupakan suatu hal yang positif untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan di Provinsi Bali. Berdasarkan data dari Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015 jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdapat di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.38**

**Tabel 4.38 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Gianyar	23.068	23.098	23.125	0,13	0,11	0,12
2.	Karangasem	13.315	13.509	14.376	1,45	6,41	3,93
3.	Jembrana	641	757	635	18,09	- 16,11	0,99
4.	Denpasar	524	570	611	8,77	7,19	7,98
5.	Klungkung	399	399	408	0	2,25	1,12
6.	Buleleng	69	46	61	- 33,33	32,60	- 0,36
7.	Badung	52	54	51	3,84	- 5,55	- 0,85
8.	Tabanan	27	678	699	2.411,11	3,09	1.207,10
9.	Bangli	26	27	28	3,84	3,70	3,77
<b>Bali</b>		<b>38.121</b>	<b>39.138</b>	<b>39.994</b>	<b>2,66</b>	<b>2,18</b>	<b>2,42</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.47 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.38** tersebut terlihat bahwa jumlah IKM di Provinsi Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 saja jumlah IKM di Provinsi Bali sebanyak 39.994 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 2,42%. Kabupaten Gianyar memiliki jumlah IKM paling banyak di Provinsi Bali, pada tahun 2014 saja sebanyak 23.125 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,12%. Namun, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar 1.207,10%. Sedangkan, Kabupaten dengan jumlah IKM paling sedikit adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebanyak 28 unit pada tahun 2014, dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,77%. Sementara itu, untuk rata-rata persentase yang mengalami penurunan paling tinggi adalah Kabupaten Badung dengan rata-rata persentase menurun sebesar 0,85%.

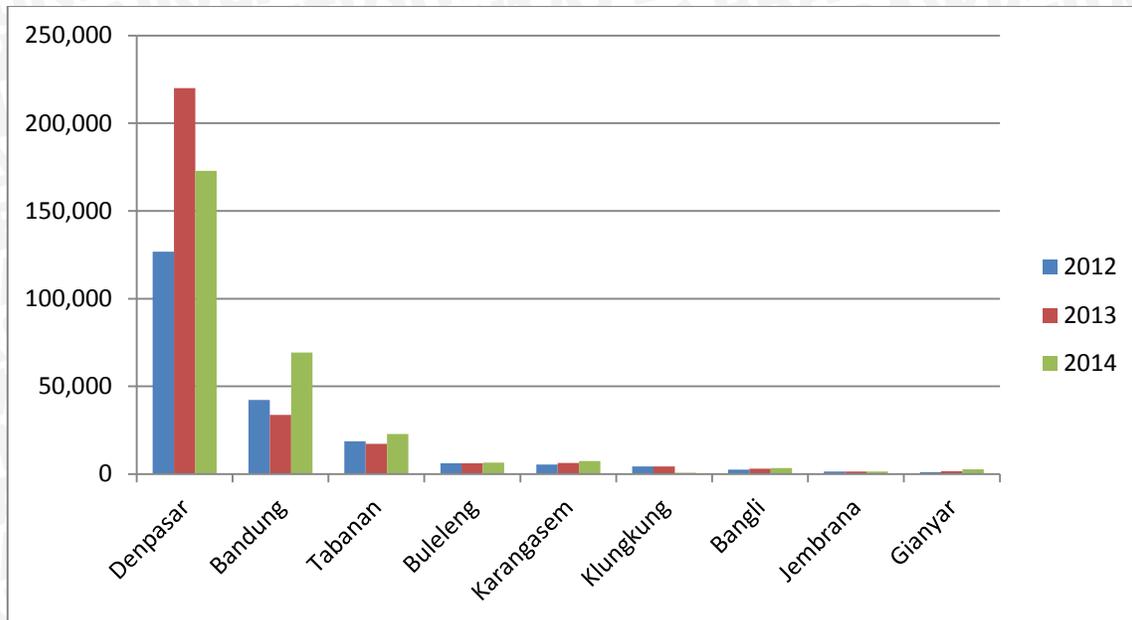
## 5. Moda angkutan

Moda angkutan sebagai bagian dari industri pariwisata merupakan suatu hal yang positif untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan di Provinsi Bali. Adanya moda angkutan mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan dari objek satu ke objek lainnya di Provinsi Bali. Jumlah moda angkutan di Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 4.39**

**Tabel 4.39 Jumlah Moda Angkutan  
di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Denpasar	126.823	220.052	172.813	73,51	- 21,46	26,02
2.	Badung	42.179	33.681	69.281	- 20,14	105,69	42,77
3.	Tabanan	18.600	17.287	22.863	- 7,05	32,25	12,59
4.	Buleleng	6.098	6.098	6.432	0	5,47	2,73
5.	Karangasem	5.324	6.358	7.377	19,42	16,02	17,72
6.	Klungkung	4.240	4.343	784	2,42	- 81,94	- 39,75
7.	Bangli	2.501	2.984	3.489	19,31	16,92	18,11
8.	Jembrana	1.406	1.436	1.355	2,13	- 5,64	- 1,75
9.	Gianyar	1.073	1.519	2.602	41,56	71,29	56,43
	<b>Bali</b>	<b>208.244</b>	<b>293.758</b>	<b>286.996</b>	<b>41,06</b>	<b>- 2,30</b>	<b>19,38</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.48 Jumlah Moda Angkutan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.39** dapat dilihat bahwa jumlah moda angkutan selama kurun waktu 3 tahun terakhir di Provinsi Bali mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 saja sebanyak 286.996 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 19,38%. Kota Denpasar memiliki jumlah moda angkutan paling banyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 172.813 unit dengan rata-rata persentase sebesar 26,02%. Namun, untuk rata-rata persentase paling tinggi terdapat di Kabupaten Gianyar, yaitu sebesar 56,43%. Sedangkan, jumlah moda angkutan paling sedikit terdapat di Kabupaten Klungkung, yaitu sebanyak 784 unit dengan rata-rata persentase mengalami penurunan paling tinggi, yaitu sebesar 39,75%.

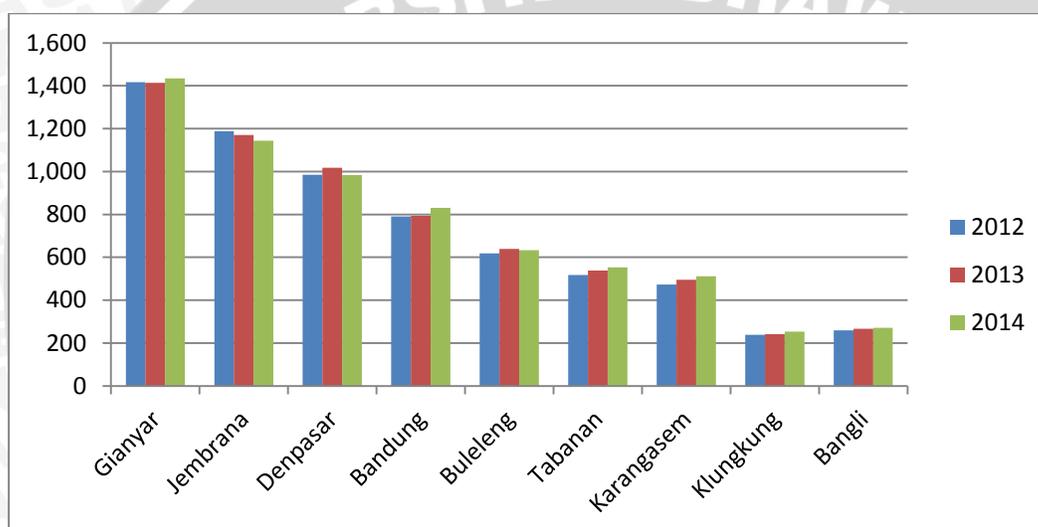
#### **6. Lembaga keuangan**

Lembaga keuangan sebagai bagian dari industri pariwisata merupakan suatu hal yang positif untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam hal penukaran mata uang asing, selain itu juga sebagai tempat masyarakat untuk meminjam modal usaha. Di Provinsi Bali jumlah lembaga keuangan dapat dilihat pada **Tabel 4.40**

**Tabel 4.40 Jumlah Lembaga Keuangan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Gianyar	1.417	1.414	1.435	- 0,21	1,48	0,63
2.	Jembrana	1.189	1.171	1.144	- 1,51	- 2,30	- 1,90
3.	Denpasar	985	1.018	984	3,35	- 3,33	0,01
4.	Badung	790	794	830	0,50	4,53	2,52
5.	Buleleng	619	640	633	3,39	- 1,09	1,14
6.	Tabanan	517	539	553	4,25	2,59	3,42
7.	Karangasem	473	496	511	4,86	3,02	3,94
8.	Klungkung	239	241	254	0,83	5,39	3,11
9.	Bangli	260	267	271	2,69	1,49	2,09
	<b>Bali</b>	<b>6.489</b>	<b>6.580</b>	<b>6.615</b>	<b>1,40</b>	<b>0,53</b>	<b>0,96</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.49 Jumlah Lembaga Keuangan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.40** terlihat bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Gianyar memiliki lembaga keuangan terbanyak di Provinsi Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu sebanyak 1.435 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,63%. Akan tetapi, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu sebesar 3,94%. Sedangkan, Kabupaten Bangli memiliki jumlah lembaga keuangan paling sedikit, yaitu sebanyak 271 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 2,09%. Namun, untuk rata-rata persentase yang mengalami penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar 1,90%. Secara umum di Provinsi Bali terjadi peningkatan jumlah lembaga keuangan tiap tahunnya selama kurun waktu 3 tahun, di mana pada tahun 2014 saja sebanyak 6.615 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,96%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan di Provinsi Bali sangat penting bagi masyarakat dan wisatawan.

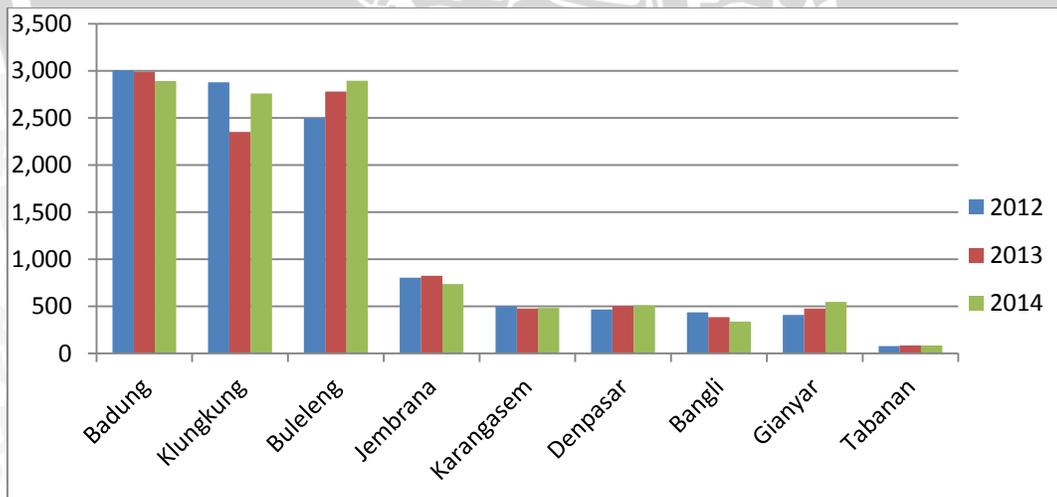
**7. Pusat perbelanjaan**

Berbelanja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata. Bahkan bagi suatu daerah tujuan wisata, berbelanja merupakan salah satu jenis pariwisata yang memiliki makna yang cukup besar. Karena wisatawan tidak mungkin tidak berbelanja pada daerah tujuan wisata. Jumlah tempat belanja (pasar dan toko) di Provinsi Bali sendiri dapat dilihat pada **Tabel 4.41**

**Tabel 4.41 Jumlah Pusat Perbelanjaan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			Persentase Peningkatan		Rata-Rata Persentase
		2012	2013	2014	2012-2013	2013-2014	
1.	Badung	3.007	2.990	2.890	- 0,56	- 3,34	- 1,95
2.	Klungkung	2.879	2.352	2.761	- 18,30	17,38	- 0,45
3.	Buleleng	2.500	2.781	2.895	11,24	4,09	7,66
4.	Jembrana	805	826	736	2,60	- 10,89	- 4,14
5.	Karangasem	501	476	485	- 4,99	1,89	- 1,54
6.	Denpasar	468	503	512	7,47	1,78	4,63
7.	Bangli	437	386	340	- 11,67	- 11,91	- 11,79
8.	Gianyar	411	477	549	16,05	15,09	15,57
9.	Tabanan	78	86	84	10,25	- 2,32	3,96
<b>Bali</b>		<b>11.086</b>	<b>10.877</b>	<b>11.252</b>	<b>- 1,88</b>	<b>3,44</b>	<b>0,78</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015



**Gambar 4.50 Jumlah Pusat Perbelanjaan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (unit)**

Berdasarkan **Tabel 4.41** terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah pusat perbelanjaan terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng, yaitu sebanyak 2.895 unit, dengan rata-rata

persentase peningkatan sebesar 7,66%. Namun, untuk rata-rata persentase peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Gianyar, yaitu sebesar 15,57%. Sementara itu, Kabupaten Tabanan memiliki jumlah pusat perbelanjaan paling sedikit di antara Kabupaten/Kota di provinsi Bali, yaitu sebanyak 84 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 3,96%. Akan tetapi, untuk rata-rata persentase penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 11,79%. Secara umum jumlah pusat perbelanjaan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan jumlah pusat perbelanjaan pada tahun 2014 saja sebanyak 11.252 unit dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 0,78%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pusat perbelanjaan sangat dibutuhkan penduduk Provinsi Bali dan wisatawan dalam memenuhi kebutuhannya.

#### **E. Pemasaran Pariwisata**

Pemasaran atau marketing pariwisata di Provinsi Bali pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Pemasaran yang dilakukan pemerintah dan swasta bisa dibagi berdasarkan tingkatannya. Untuk pemerintah, ada pemasaran yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang makin ke bawah makin spesifik untuk daerah yang bersangkutan. Pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah lebih dikenal dengan *image promotion* (promosi citra), di mana pemasaran ini bersifat umum yakni promosi destinasi dengan menjadikan objek wisata dan fasilitas akomodasi wisata sebagai pendukung. Pemasaran yang dilakukan oleh pihak swasta dikenal dengan *sales promotion* (promosi penjualan) yang menawarkan paket atau produk yang dimiliki dengan menggunakan citra Bali pada umumnya. Kedua bentuk pemasaran tersebut mempunyai kekuatan sesuai dengan kebutuhannya, namun akan sangat baik atau ideal apabila bisa disinergikan.

Pemasaran pariwisata untuk pasar domestik dan pasar mancanegara dibedakan berdasarkan daerah asal wisatawan. Segmen pasar juga bisa dibedakan berdasarkan klasifikasi umur wisatawan: wisatawan anak-anak atau keluarga, golongan remaja dan muda usia, serta golongan lanjut usia. Berdasarkan cara berlibur, wisatawan dapat dibedakan menjadi wisatawan yang datang berlibur sendiri tanpa melalui biro perjalanan yang dikenal dengan istilah FIT (*free individual traveller*), serta wisatawan yang datang berkelompok (*group*). Selain itu, segmentasi pasar juga bisa dibedakan berdasarkan kebutuhan wisatawan, yakni wisatawan yang datang untuk menikmati liburan (*leisure* dan rekreasi), dan bisnis atau MICE

(*meeting, incentive, conference, dan exhibition*). Hal tersebut merupakan berbagai faktor yang dapat digunakan sebagai penentuan segmentasi pasar pariwisata di Provinsi Bali.

#### **4.2 Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Objek Wisata**

Di Provinsi Bali, masyarakat yang berada di sekitar objek wisata sebagian besar sudah berperan di dalam pengelolaan objek wisata tersebut, di mana pengelolaannya dikelola oleh pemerintah dan desa adat. Selain dikelola oleh desa adat, objek wisata juga mendapatkan bantuan dari swasta. Tetapi masih ada pula objek wisata yang pengelolaannya dikelola penuh oleh pemerintah.

Objek wisata yang dikelola dengan pemerintah dan desa adat, dalam pengelolaannya pemerintah membantu dengan memberikan dana, sedangkan desa adat melakukan pengelolaan dalam hal perawatan objek wisata. Salah satu contoh objek wisata yang di kelola bersama oleh pemerintah dan desa adat adalah Air Terjun Gitgit yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Sedangkan, salah satu contoh objek wisata yang pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh desa adat adalah objek wisata Pura Ponjok Batu yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, salah satu contoh objek wisata yang dikelola penuh oleh pemerintah tanpa adanya campur tangan dari masyarakat sekitar desa adat yaitu Ex Pelabuhan Buleleng yang terdapat di Kabupaten Buleleng.

##### **4.2.1 Partisipasi Masyarakat Sekitar Objek Wisata**

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu partisipasi masyarakat di sekitar objek wisata. Hal tersebut, membuktikan adanya kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata terhadap pengembangan wisata yang ada di Provinsi Bali. Pokdarwis merupakan mitra kerja pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan destinasi pariwisata, terutama peningkatan sumber daya manusia dalam hal kepariwisataan, serta turut memantau organisasi-organisasi yang memiliki hubungan dengan kegiatan kepariwisataan.

Kerja sama antara pihak hotel/penginapan wisatawan dengan masyarakat merupakan salah satu contoh bentuk partisipasi masyarakat di sekitar objek wisata. Bentuk kerjasama tersebut berupa menjadikan beberapa rumah masyarakat desa di Provinsi Bali sebagai *guest house* untuk wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pembayaran dapat dilakukan kepada hotel/penginapan, kemudian hasil dari kerjasama tersebut diberikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil. Desa Munduk yang terdapat di

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu contoh dari kerjasama tersebut, di mana masyarakat desa tersebut sudah terbiasa menerima wisatawan di rumahnya, sekaligus wisatawan tersebut dapat turut serta dalam upacara atau kegiatan adat yang ada di desa dengan mengikuti aturan yang ada.

#### **4.3 Analisis Isi (*Content Analysis*) Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Kaitannya dengan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali**

Analisis isi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali menggunakan analisis isi yang menganalisis kebijakan secara deskriptif, yaitu melihat 10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata, yaitu: tujuan pariwisata, peran pemerintah, daya saing, peduli (penanaman modal), pengelolaan pariwisata, pengelolaan pendapatan, partisipasi masyarakat, dampak (usaha-usaha yang timbul), akses masyarakat (kesempatan kerja), serta monitor dampak (pengawasan) menurut UNWTO, 2010. Variabel dijadikan sebagai kata kunci (*key words*) untuk membandingkan kesesuaian isi kebijakan dengan 10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata, sehingga akan dilihat kesesuaian isi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Adapun kebijakan yang digunakan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013-2018. Hasil analisis dapat dilihat pada **Tabel 4.42**

**Tabel 4.42 Analisis Isi (Content Analysis) Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Kaitannya dengan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali**

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
1.	<b>Tujuan pariwisata :</b> semua aspek dan jenis pariwisata harus peduli terhadap pengentasan kemiskinan.	Tujuan pariwisata (Pasal 4 huruf a, b, c, dan d). <u>Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.</u>	Arah pembangunan pariwisata (pasal 2 ayat 8 huruf b). <u>Arah pembangunan pariwisata nasional dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.</u>	Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2005-2025 (BAB III). <u>Visinya adalah terwujudnya Provinsi Bali dan masyarakat Bali yang lebih sejahtera lahir dan batin dengan pelaksanaan pembangunan yang mampu mengatasi dan mengurangi berbagai tantangan dan permasalahan, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.</u>	Arahan peruntukan pariwisata (pasal 12 ayat 2 huruf f). <u>Pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pada pertanian, kerajinan, industri kecil dan pariwisata kerakyatan.</u>	Pasal 3 huruf b, c, d, dan e. <u>Kepariwisataan budaya Bali bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja.</u>	Arah pembangunan pariwisata (pasal 11 huruf e). <u>Arah pembangunan pariwisata daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.</u>	Misi pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 (BAB V) Misi (poin 3) <u> mewujudkan Bali yang sejahtera lahir batin melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil, pembangunan bidang pertanian,</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, tujuan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, serta pengembangan industri kecil.

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
				Misinya (poin 4) Adalah <u>mewujudkan masyarakat Bali sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.</u>				<u>kelautan, perikanan, dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga penduduk miskin berkurang.</u>	
2.	<b>Peran Pemerintah :</b> Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata harus mencakup pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dan pariwisata digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan.	Peran pemerintah (pasal 28 huruf l). <u>Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat.</u>	Peran pemerintah (pasal 29 huruf b dan c). <u>Peran pemerintah adalah memberdayakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan. Serta menguatkan kelembagaan</u>	Peran pemerintah (BAB II). <u>Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata harus tetap mempertahankan kearifan lokal yang berbasis pada budaya masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan antara</u>	-	Peran pemerintah (pasal 31). <u>Peran Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan kepariwisataan yang dikelola desa pekraman atau lembaga tradisional.</u>	Peran pemerintah (pasal 36 ayat 1 huruf c). <u>Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.</u>	Peran pemerintah (BAB VI). <u>Pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas juga ramah lingkungan. Kebijakan untuk memeberikan insentif bagi petani dalam</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat dengan memberikan

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
			<u>masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.</u>	<u>pemanfaatan ruang dan teknologi dengan kelestarian lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat lokal.</u>			<u>usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak dan bibit ternak, perlindungan/ pengembangan buah lokal, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.</u>	bantuan dana bagi pariwisata yang dikelola desa pekraman atau lembaga tradisional, sehingga mampu mempertahankan kearifan lokal.	
3.	<b>Daya saing :</b> Daya saing dan keberhasilan ekonomi bisnis dan tujuan wisata sangat penting dalam pengentasan	Daya saing (pasal 30 huruf f). Pemerintah <u>memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata serta produk pariwisata</u>	Visi pembangunan pariwisata (pasal 2 ayat 4). Visi <u>pembangunan kepariwisataan nasional adalah</u>	Peningkatan daya saing (BAB IV). <u>Kepariwisataan yang didukung kreatifitas masyarakat berbudaya tinggi dan industri kecil</u>	Fasilitas (pasal 122 ayat 4 huruf b). <u>Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan</u>	Daya saing (pasal 18). <u>Pemerintah Provinsi melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan</u>	Daya saing (Pasal 8 huruf c). <u>Mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, membuka ruang partisipasi publik</u>	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAB VII). <u>Perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata,</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, daya saing dilakukan oleh pemerintah dengan cara

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
	kemiskinan karena masyarakat miskin mendapatkan keuntungan.	<u>yang berada di wilayahnya.</u>	<u>terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.</u>	<u>berkeunggulan kompetitif diarahkan melakukan pengembangan berdasarkan pengelolaan secara efisien dan rasional serta memperkuat daya saing nasional dan global kebijakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri kecil diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi.</u>	<u>makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata.</u>	<u>Bali bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali dan lembaga/instansi lainnya.</u>	<u>secara luas, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya.</u>	<u>menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.</u>	memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata serta produk pariwisata seperti industri kecil yang unggul, sehingga terwujud pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
4.	<b>Peduli (penanaman modal) :</b> Semua usaha pariwisata harus peduli tentang kegiatan mereka	Pendanaan (pasal 57 dan pasal 61). <u>Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara</u>	Penanam modal dan insentif (pasal 28 huruf d dan g). <u>Penyusunan regulasi dan pemberian</u>	Investasi (BAB IV). <u>Investasi akan dikembangkan dengan mendorong terciptanya iklim</u>	Investasi (pasal 12 ayat 2 huruf j). <u>pengembangan investasi pariwisata diprioritaskan untuk</u>	Penanaman modal (pasal 30 dan pasal 31). <u>Pendanaan pembangunan kepariwisataan budaya Bali</u>	Pemberian insentif dan investasi (pasal 37) Arah <u>kebijakan pengembangan investasi dibidang</u>	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAB VII). <u>Memberikan kesempatan kepada</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, peduli (penanaman modal)

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
	pada masyarakat lokal dan berusaha menguntungkan masyarakat miskin.	<u>pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.</u>	<u>insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah, dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal. Serta peningkatan akses dan permodalan dalam upaya, mengembangkan produk industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.</u>	<u>usaha yang kondusif bagi penanam modal guna membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</u>	<u>meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.</u>	<u>menjadi tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan kepariwisataan yang dikelola oleh desa pekraman atau lembaga tradisional.</u>	<u>pariwisata adalah peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang dan peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.</u>	<u>masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan serta penyertaan modal dalam pengelolaannya.</u>	terlihat dari pendanaan pariwisata yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Pendanaan dalam hal pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengelolaan usaha perhotelan melalui koperasi masyarakat, sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal guna membuka kesempatan kerja.

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
5.	<b>Pengelolaan pariwisata :</b> Wisata harus dikelola dengan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama yang dibangun kedalam strategi dan rencana.	Penyelenggaraan pariwisata (pasal 5 huruf c dan e). <u>Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas, serta memberdayakan masyarakat setempat.</u>	Misi pembangunan kepariwisataan (pasal 2 ayat 5). <u>Misi pembangunan kepariwisataan nasional adalah pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat.</u>	-	Strategi dan rencana (pasal 122 ayat 4 huruf a). <u>Pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat.</u>	Penyelenggaraan pariwisata (pasal 2). <u>Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dilaksanakan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.</u>	Strategi pengembangan (pasal 36) <u>Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan meliputi : memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.</u>	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAB VII). <u>Melakukan peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata.</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, pengelolaan pariwisata diselenggarakan dengan prinsip pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
6.	<b>Pengelolaan pendapatan :</b> Pengelolaan pariwisata bertujuan untuk mengelola pendapatan dan didistribusikan kepada masyarakat.	Pengelolaan pendapatan (pasal 59). <u>Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dana yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.</u>	Meningkatkan sinergi dan keadilan distributif (pasal 43 huruf a). <u>Meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata.</u>	-	-	Anggaran (pasal 30 dan pasal 31). <u>Pendanaan pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, pengusaha dan masyarakat. Provinsi Bali dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan kepariwisataan yang dikelola desa pakraman atau lembaga tradisional.</u>	Pendapatan asli daerah (pasal 66 ayat 2 huruf a). <u>Meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah.</u>	-	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata dilakukan dengan mengalokasikan sebagian dana untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, serta meningkatkan sinergi dan distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah.

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
7.	<b>Partisipasi masyarakat :</b> Perencanaan dan pengembangan pariwisata harus melibatkan berbagai kepentingan termasuk partisipasi dan perwakilan dari masyarakat miskin.	Setiap orang berhak (pasal 19 ayat 1). <u>Setiap orang berhak melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.</u>	Pemberdayaan masyarakat (pasal 28 huruf a) <u>Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan adalah pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan.</u>	Pengembangan pariwisata (BAB IV). <u>Pariwisata budaya dikembangkan secara berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</u>	-	Setiap orang berhak (pasal 26 ayat 1 dan pasal 24). <u>Setiap orang berhak melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja wisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.</u>	Sasaran pembangunan kepariwisataan (pasal 10 ayat 1). <u>Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan.</u>	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAB VII). <u>Melakukan demokratisasi usaha pariwisata dalam rangka lebih memperdayakan masyarakat lokal.</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari hak, arah kebijakan, serta sasaran pembangunan kepariwisataan yang ingin meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan.
8.	<b>Dampak (usaha-usaha yang timbul) :</b> Semua potensi pariwisata	Usaha pariwisata (pasal 14 ayat 1). <u>Usaha pariwisata meliputi jasa transportasi, jasa</u>	Peningkatan potensi dan kapasitas (Pasal 29 ayat 3 huruf c dan pasal 64	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (BAB IV).	(pasal 12 ayat 2 huruf i). <u>Pengembangan sektor pariwisata yang</u>	Usaha pariwisata (pasal 8 ayat 1). <u>Usaha pariwisata meliputi jasa transportasi, jasa</u>	Usaha pariwisata (pasal 55). <u>Mendorong pertumbuhan usaha pariwisata</u>	Mewujudkan Bali yang Sejahtera (BAB III). <u>Berkembangnya</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, dampak

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan						Kesimpulan	
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataa Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028		Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018
	mempunyai dampak terhadap masyarakat lokal dan global dimasa sekarang dan masa depan sumber daya alam serta budaya.	<u>perjalanan, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan acara hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, serta spa.</u>	huruf b). <u>Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dengan meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.</u>	<u>Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diarahkan untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif melalui perkuatan kewirausahaan sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.</u>	<u>berlandaskan Kebudayaan Daerah Bali berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan.</u>	<u>perjalanan, jasa makanan dan minuman, jasa akomodasi, jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, wisata spiritual, serta spa.</u>	<u>skala usaha mikro kecil dan menengah.</u>	<u>industri kecil dan industri rumah tangga yang bedaya saing tinggi.</u>	(usaha-usaha yang timbul) dari adanya pariwisata adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jasa dan usaha sekala mikro, kecil, dan menengah, (ekonomi kerakyatan).

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
9.	<b>Akses masyarakat (kesempatan kerja) :</b> Semua usaha pariwisata harus melibatkan masyarakat miskin, memberikan akses dan memaksimalkan peluang untuk menguntungkan masyarakat miskin.	Setiap orang berhak (pasal 19 ayat 2). <u>Setiap orang atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi serta pengelolaan.</u>	Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat (pasal 29 ayat 1 huruf b). <u>Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.</u>	-	(Pasal 12 ayat 2 huruf i). <u>Pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan daerah Bali diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat.</u>	Hak (pasal 24 ayat 2). <u>Hak masyarakat memperoleh kesempatan kerja baik sebagai pekerja pada usaha pariwisata, sebagai pengelola Daya Tarik Wisata, melaksanakan promosi, dan duduk dalam kelembagaan pariwisata.</u>	Pemberdayaan masyarakat (pasal 13 huruf e). <u>Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.</u>	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAB VII). <u>Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.</u>	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, masyarakat di sekitar obyek daya tarik wisata mempunyai hak prioritas, serta diberdayakan (kesempatan kerja) menjadi pekerja maupun pengelola pariwisata.
10.	<b>Monitor dampak (pengawasan) :</b> Pengawasan terhadap pengentasan kemiskinan	Pengawasan (pasal 28 huruf m). <u>Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan</u>	Pengawasan (pasal 59 huruf b dan pasal 68 ayat 2). <u>Menguatkan kemampuan perencanaan,</u>	Pengawasan (BAB IV). <u>Pengawasan pengembangan pariwisata budaya dalam rangka meningkatkan</u>	Mengatur dan Mengawasi (Pasal 98 ayat 2 huruf g). <u>Mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/</u>	Pengawasan (pasal 32 ayat 1 dan ayat 3). <u>Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan</u>	Pengawasan (pasal 75 ayat 1 dan ayat 3). <u>Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian</u>	-	Dari semua dokumen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, monitor dampak (pengawasan)

No.	Variabel/Key words	Dokumen Kebijakan							Kesimpulan
		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025	Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025	Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali	RIPPARDA Prov. Bali tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028	Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018	
	melalui usaha pariwisata harus dimonitor secara efektif.	<u>kepariwisataan.</u>	<u>pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</u>	<u>kesejahteraan masyarakat agar mampu mendorong peningkatan daya saing dan peningkatan kualitas perekonomian regional.</u>	<u>akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.</u>	<u>kegiatan kepariwisataan budaya Bali dalam bidang hukum, administrasi, pengetahuan teknis, dan perilaku.</u>	<u>pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, sehingga pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk pengawasan lebih lanjut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil analisis 2016

Berdasarkan hasil analisis isi kebijakan pada **Tabel 4.42** terlihat bahwa pemerintah di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali pada khususnya, sangat peduli terhadap pengembangan pariwisata dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu terbukti, dari kebijakan-kebijakan berupa UU, PP, dan Perda mencakup ke-10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata yang dikeluarkan oleh UNWTO. Kesejahteraan penduduk sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut.

Setelah kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali diketahui, dari hasil analisis isi kebijakan pengembangan pariwisata sangat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, maka selanjutnya dilihat bagaimana hubungan pengembangan pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

#### **4.4 Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Korelasi Spearman (*Spearman Correlation*)**

Untuk melihat hubungan antara variabel pariwisata dengan variabel kemiskinan dalam penelitian ini digunakan Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Analisis Korelasi Spearman (*Spearman Correlation*). Melihat begitu pentingnya peranan sektor Pariwisata bagi Provinsi Bali, jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB 3 tahun terakhir. Serta terdapatnya angka penduduk miskin di Provinsi Bali. Maka, kita dapat melihat hubungan antara pariwisata dengan kemiskinan. Untuk melihat hubungan antara variabel pariwisata dengan variabel kemiskinan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.43**

**Tabel 4.43 Hasil Analisis Tabulasi Silang (Crosstabs) dan Korelasi Spearman (Spearman Correlation) untuk Melihat Hubungan antara Pariwisata dengan Kemiskinan di Provinsi Bali**

VARIABEL		KEMISKINAN										
		K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	K <sub>4</sub>	K <sub>5</sub>	K <sub>6</sub>	K <sub>7</sub>	K <sub>8</sub>	K <sub>9</sub>	K <sub>10</sub>	K <sub>11</sub>
P A R I W I S A T A	P <sub>1</sub>	0,512*	- 0,156	- 0,386	0,715	0,602	0,866	- 0,512	- 0,399	- 0,156	0,379	0,215
		0,231**	0,844	0,663	0,173	0,190	0,011	0,231	0,497	0,844	0,185	0,292
	P <sub>2</sub>	0,306	- 0,306	- 0,530	0,600	0,439	0,661	- 0,306	- 0,366	- 0,306	- 0,306	- 0,303
		0,325	0,638	0,140	0,011	0,325	0,047	0,325	0,495	0,638	0,638	0,638
	P <sub>3</sub>	0,102	0,306	- 0,707	0,925	0,805	0,567	- 0,102	0,000	0,204	0,306	0,000
		0,663	0,463	0,249	0,048	0,120	0,200	0,663	0,690	0,048	0,463	0,925
	P <sub>4</sub>	0,227	0,144	- 0,500	0,722	0,685	0,573	- 0,227	- 0,182	0,000	0,392	0,276
		0,350	0,350	0,034	0,067	0,122	0,200	0,350	0,717	0,837	0,182	0,387
	P <sub>5</sub>	0,306	0,051	0,000	0,338	0,317	0,425	- 0,306	- 0,183	0,051	0,714	0,543
		0,044	0,572	0,725	0,523	0,489	0,133	0,044	0,273	0,572	0,025	0,103
	P <sub>6</sub>	0,459	- 0,459	- 0,354	0,088	- 0,134	0,283	- 0,459	- 0,183	- 0,459	- 0,459	- 0,455
		0,273	0,725	0,328	0,036	0,199	0,133	0,273	0,273	0,725	0,725	0,725
	P <sub>7</sub>	- 0,061	- 0,102	- 0,283	0,035	- 0,288	- 0,113	- 0,265	0,142	- 0,102	- 0,592	- 0,626
0,463		0,663	0,399	0,590	0,199	0,852	0,277	0,300	0,663	0,509	0,399	
P <sub>8</sub>	0,333	0,250	- 0,577	0,755	0,797	0,694	- 0,333	- 0,100	0,083	0,333	0,144	
	0,060	0,283	0,182	0,141	0,171	0,076	0,060	0,331	0,551	0,060	0,350	
P <sub>9</sub>	0,231	0,000	0,000	0,340	0,277	0,357	- 0,231	- 0,221	0,000	0,694	0,573	
	0,112	0,773	0,358	0,200	0,669	0,284	0,112	0,413	0,773	0,076	0,200	
P <sub>10</sub>	- 0,459	0,459	0,442	- 0,163	- 0,110	- 0,283	0,459	0,659	0,663	0,459	0,240	
	0,725	0,273	0,328	0,632	0,523	0,693	0,725	0,273	0,025	0,273	0,328	
P <sub>11</sub>	0,714	0,051	- 0,354	0,588	0,659	0,992	- 0,714	- 0,183	0,051	0,306	- 0,013	
	0,025	0,572	0,328	0,036	0,273	0,011	0,025	0,273	0,572	0,044	0,328	
P <sub>12</sub>	- 0,290	0,245	- 0,424	0,387	0,197	- 0,124	0,423	0,463	0,245	0,067	- 0,138	
	0,231	0,844	0,235	0,759	0,373	0,526	0,185	0,497	0,844	0,249	0,168	
P <sub>13</sub>	- 0,459	0,306	- 0,442	0,338	0,317	- 0,283	0,459	- 0,122	0,051	- 0,051	0,101	
	0,725	0,044	0,328	0,523	0,489	0,693	0,725	0,489	0,572	0,572	0,328	

Sumber: hasil analisis 2016

 (Ada korelasi) \* (Spearman Correlation)  
Nilainya - 1 sampai + 1

\*\* (P. Value/Approx. Sig.)

Jika, Approx. Sig. > 0,05 maka tidak ada hubungan  
Jika, Approx. Sig. < 0,05 maka ada hubungan

Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| a. P <sub>1</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum)   | n. K <sub>1</sub> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja)              |
| b. P <sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) | o. K <sub>2</sub> (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin)           |
| c. P <sub>3</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi)     | p. K <sub>3</sub> (Peningkatan Jumlah Pengangguran)              |
| d. P <sub>4</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan)          | q. K <sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita)           |
| e. P <sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan)                       | r. K <sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Pengeluaran per Kapita)    |
| f. P <sub>6</sub> (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata)                         | s. K <sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita)      |
| g. P <sub>7</sub> (Peningkatan Jumlah Akomodasi Wisata)                          | t. K <sub>7</sub> (Peningkatan Indeks Gini)                      |
| h. P <sub>8</sub> (Peningkatan Jumlah Restoran dan Rumah Makan)                  | u. K <sub>8</sub> (Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)) |
| i. P <sub>9</sub> (Peningkatan Jumlah Bar)                                       | v. K <sub>9</sub> (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) |
| j. P <sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah)              | w. K <sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat)              |
| k. P <sub>11</sub> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan)                            | x. K <sub>11</sub> (Peningkatan Jumlah Rumah Tidak Sehat)        |
| l. P <sub>12</sub> (Peningkatan Jumlah Lembaga Keuangan)                         |  |
| m. P <sub>13</sub> (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan)                       |  |

Berdasarkan **Tabel 4.43** tersebut terlihat bahwa hasil analisis crosstabs dan spearman correlation secara keseluruhan, baik yang menunjukkan adanya hubungan maupun tidak. Sementara, untuk melihat hasil yang memiliki hubungan dapat dilihat pada **Tabel 4.44**

**Tabel 4.44 Variabel Pariwisata dengan Variabel Kemiskinan yang Berhubungan di Provinsi Bali**

No.	Variabel X	Variabel Y	P. Value (Sig)	Signifikan / Tidak	Nilai Hubungan	Kriteria
1.	P <sub>1</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum)	K <sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita)	0,011	Signifikan	0,866	Korelasi Sempurna
2.	P <sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan)	K <sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita)	0,011	Signifikan	0,600	Korelasi Sedang
		K <sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita)	0,047	Signifikan	0,661	Korelasi Tinggi
3.	P <sub>3</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi)	K <sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita)	0,048	Signifikan	0,925	Korelasi Sempurna
		K <sub>9</sub> (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2))	0,048	Signifikan	0,204	Hampir Tidak Ada Korelasi
4.	P <sub>4</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan)	K <sub>3</sub> (Peningkatan Jumlah Pengangguran)	0,034	Signifikan	- 0,500	Korelasi Sedang
5.	P <sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan)	K <sub>1</sub> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja)	0,044	Signifikan	0,306	Korelasi Rendah
		K <sub>7</sub> (Peningkatan Indeks Gini)	0,044	Signifikan	- 0,306	Korelasi Rendah
		K <sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat)	0,025	Signifikan	0,714	Korelasi Tinggi
6.	P <sub>6</sub> (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata)	K <sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita)	0,036	Signifikan	0,088	Hampir Tidak Ada Korelasi
7.	P <sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah)	K <sub>9</sub> (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2))	0,025	Signifikan	0,663	Korelasi Tinggi
		K <sub>1</sub> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja)	0,025	Signifikan	0,714	Korelasi Tinggi
8.	P <sub>11</sub> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan)	K <sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita)	0,036	Signifikan	0,588	Korelasi Sedang
		K <sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita)	0,011	Signifikan	0,992	Korelasi Sempurna
		K <sub>7</sub> (Peningkatan Indeks Gini)	0,025	Signifikan	- 0,714	Korelasi Tinggi
9.	P <sub>13</sub> (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan)	K <sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat)	0,044	Signifikan	0,306	Korelasi Rendah
		K <sub>2</sub> (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin)	0,044	Signifikan	0,306	Korelasi Rendah

Sumber: hasil analisis 2016

Berdasarkan **Tabel 4.44** tersebut terlihat bahwa hasil analisis *crosstabs* dan *spearman correlation* dari sekian variabel pariwisata dan variabel kemiskinan hanya ada beberapa variabel yang berhubungan, yaitu:

1. Hubungan antara variabel  $P_1$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_1$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dengan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,866, yang menunjukkan adanya korelasi sempurna dan searah. Jika,  $P_1$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) meningkat, maka meningkat pula  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi, karena semakin meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum di Provinsi Bali, menunjukkan perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Perkembangan tersebut berdampak kepada meningkatnya biaya hidup, serta meningkatnya penduduk pendatang ke Pulau Bali untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Hal tersebut, berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan minum, serta perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bali (Garis Kemiskinan per Kapita). Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 36.111.298,8 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 24,79%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.
2. Hubungan antara variabel  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,600, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan searah. Jika,  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan)

meningkat, maka meningkat pula  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan transportasi dan pengiriman barang baik berupa barang kerajinan maupun *furniture* yang dikirim ke luar negeri. Meningkat dan menurunnya PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan berpengaruh terhadap meningkat dan menurunnya pendapatan masyarakat (Jumlah PDRB per Kapita) di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 14.203.195,1 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 25,57%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.

3. Hubungan antara variabel  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,047. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,661, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan searah. Jika,  $P_2$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) meningkat, maka meningkat pula  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi, karena semakin meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Bali, menunjukkan perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Perkembangan tersebut berdampak kepada meningkatnya biaya hidup, serta meningkatnya penduduk pendatang ke Pulau Bali untuk mencari kerja. Hal tersebut, berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan minum, serta perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Bali (Garis Kemiskinan per Kapita). Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 14.203.195,1 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 25,57%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita

Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.

4. Hubungan antara variabel  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,048. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,925, yang menunjukkan adanya korelasi sempurna dan hubungan yang searah. Jika,  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) meningkat, maka meningkat pula  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dengan adanya usaha informasi dan komunikasi. Adanya usaha informasi dan komunikasi akan sangat membantu dalam hal promosi pariwisata. Peningkatan usaha informasi dan komunikasi akan berpengaruh kepada peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan penduduk (PDRB per kapita di Provinsi Bali). Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 8.034.798,2 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 9,87%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.
5. Hubungan antara variabel  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel  $K_9$  (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)) dengan nilai signifikan sebesar 0,048. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel  $K_9$  (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)) sebesar 0,204, yang menunjukkan hampir tidak ada korelasi dan hubungannya searah. Jika,  $P_3$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) meningkat, maka meningkat pula  $K_9$  (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua penduduk di Provinsi Bali bekerja di sektor pariwisata atau

juga belum semua penduduk dapat merasakan dampak dari adanya usaha informasi dan komunikasi. Sehingga, peningkatan PDRB lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tidak berdampak dalam membantu penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 8.034.798,2 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 9,87%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 0,26, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 62,50%.

6. Hubungan antara variabel  $P_4$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel  $K_3$  (Peningkatan Jumlah Pengangguran) dengan nilai signifikan sebesar 0,034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_4$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel  $K_3$  (Peningkatan Jumlah Pengangguran) sebesar - 0,500, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan hubungan yang berlawanan arah. Jika,  $P_4$  (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) meningkat, maka  $K_3$  (Peningkatan Jumlah Pengangguran) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, adanya pengembangan pariwisata akan berimbas kepada permintaan terhadap barang industri olahan, seperti *handy craft*, makanan minuman, *souvenir*, dll yang menjadi ciri khas Pulau Bali. Meningkatnya permintaan akan industri olahan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Peningkatan tersebut juga berdampak kepada kebutuhan tenaga kerja dibidang industri pengolahan, sehingga hal tersebut berimbas kepada penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 9.984.338,7 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,34%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah pengangguran di Provinsi Bali sebesar 44.041 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 4,90%.
7. Hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara

variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan hubungan yang searah. Jika,  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka meningkat pula  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali berdampak kepada meningkatnya permintaan akan jasa-jasa. Meningkatnya permintaan akan jasa-jasa secara otomatis akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Peningkatan tersebut terjadi agar pelayanan terhadap wisatawan tetap optimal. Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali sebanyak 2.272.632 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,33%.

8. Hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) dengan nilai signifikansi sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) sebesar - 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan hubungan yang berlawanan arah. Jika,  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali berdampak pada pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Peningkatan pendapatan penduduk berdampak pada pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Semakin menurunnya nilai indeks gini, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk yang merata. Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks gini di Provinsi Bali sebesar 0,415, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,97%.

9. Hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) sebesar 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika,  $P_5$  (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka meningkat pula  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berdampak kepada peningkatan pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, dengan pemerataan pendapatan tersebut, penduduk di Provinsi Bali mampu menjadikan rumah mereka lebih sehat (peningkatan jumlah rumah sehat). Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Provinsi Bali sebanyak 1.114.935 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 19,32%.
10. Hubungan antara variabel  $P_6$  (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,036. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_6$  (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,088, yang menunjukkan hampir tidak ada korelasi dan hubungan yang searah. Jika,  $P_6$  (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) meningkat, maka meningkat pula  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatnya jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali. akan tetapi pengaruhnya sangat kecil. Kecilnya pengaruh dikarenakan penduduk di Provinsi Bali bekerja tidak hanya di sektor pariwisata tetapi juga di 16 sektor lainnya. Masing-masing sektor tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat atau jumlah PDRB per kapita masyarakat di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali pada tahun

2014 mencapai sebanyak 297 obyek, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 1,02%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.

11. Hubungan antara variabel  $P_{10}$  (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) dan variabel  $K_9$  (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{10}$  (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) dan variabel  $K_9$  (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) sebesar 0,663, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika,  $P_{10}$  (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) meningkat, maka meningkat pula  $K_9$  (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, jumlah industri kecil dan menengah tidak yang meningkat masih belum mampu memberdayakan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Bali, karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga, tidak memberikan dampak terhadap penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (Indeks Keparahan Kemiskinan), dapat dilihat dari nilai indeks yang meningkat. Meningkatnya nilai indeks menunjukkan bahwa tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah industri kecil dan menengah Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 39.994 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,18%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,26, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 62,50%.

12. Hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika,  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula  $K_1$  (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja),

demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali akan mempengaruhi kebutuhan akan moda angkutan. Kebutuhan akan moda angkutan yang meningkat mempengaruhi peningkatan jumlah moda angkutan. Meningkatnya jumlah moda angkutan akan berdampak kepada peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali sebanyak 2.272.632 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,33%.

13. Hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,036. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,588, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan hubungan yang searah. Jika,  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula  $K_4$  (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan adalah dampak dari kebutuhan akan moda angkutan yang meningkat. Jumlah moda angkutan yang meningkat berpengaruh kepada peningkatan jumlah tenaga kerja. Semakin banyak penduduk di Provinsi Bali yang bekerja, maka meningkat pula pendapatan (jumlah PDRB per Kapita) penduduk di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.
14. Hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,992, yang menunjukkan adanya korelasi

sempurna dan hubungan yang searah. Jika,  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula  $K_6$  (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, dampak dari adanya peningkatan jumlah moda angkutan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh semua penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, penduduk miskin yang tidak memiliki kemampuan di bidang moda angkutan, tetap mengalami kemiskinan, bahkan mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.

15. Hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) sebesar - 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang berlawanan arah. Jika,  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka  $K_7$  (Peningkatan Indeks Gini) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan di Provinsi Bali berdampak pada kesempatan kerja penduduk di Provinsi Bali. Banyaknya penduduk yang bekerja, sehingga terjadi pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Semakin menurunnya nilai indeks gini, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk yang menuju merata. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks gini di Provinsi Bali sebesar 0,415, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,97%.
16. Hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah

dan hubungan yang searah. Jika,  $P_{11}$  (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula  $K_{10}$  (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan berdampak kepada peningkatan jumlah kesempatan kerja bagi penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, dengan adanya kesempatan kerja bagi penduduk, maka jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali menjadi meningkat, dengan meningkatnya tenaga kerja, maka pendapatan penduduk akan meningkat. Sehingga, penduduk di Provinsi Bali mampu menjadikan rumah mereka lebih sehat (peningkatan jumlah rumah sehat). Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Provinsi Bali sebanyak 1.114.935 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 19,32%.

17. Hubungan antara variabel  $P_{13}$  (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel  $K_2$  (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan variabel  $P_{13}$  (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel  $K_2$  (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan searah. Jika,  $P_{13}$  (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) meningkat, maka meningkat pula  $K_2$  (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatnya jumlah pusat perbelanjaan dapat mengurangi pendapat penduduk yang mata pencahariannya sebagai pedagang dengan modal yang kecil. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar bagi pedagang dengan modal yang kuat. Sehingga pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sangat kecil. Hal tersebut terlihat dari data jumlah pusat perbelanjaan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 11.252 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 3,44%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 196.203 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 7,34%.

Dari hasil analisis isi (*content analysis*) serta analisis tabulasi silang (*crosstabs analysis*) dan analisis korelasi spearman (*spearman correlation*), dapat dilihat hubungan dari ke-2 rumusan masalah pada penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.45**

Tabel 4.45 Hubungan dari ke-2 Rumusan Masalah pada Penelitian

No.	Simpulan Analisis Isi	Simpulan Analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman	Kesimpulan
1.	Tujuan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, serta pengembangan industri kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>1</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dan variabel K<sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K<sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>3</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>3</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>4</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel K<sub>3</sub> (Peningkatan Jumlah Pengangguran).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K<sub>1</sub> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K<sub>7</sub> (Peningkatan Indeks Gini).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>5</sub> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K<sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>6</sub> (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>10</sub> (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) dan variabel K<sub>9</sub></li> </ul>	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai tujuan dari adanya pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, serta pengembangan industri kecil. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum mempengaruhi garis kemiskinan per kapita, PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mempengaruhi jumlah PDRB per kapita dan garis kemiskinan per kapita, PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mempengaruhi jumlah PDRB per kapita dan angka indeks keparahan kemiskinan (P2), PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan mempengaruhi jumlah pengangguran, jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, nilai indeks gini, dan jumlah rumah sehat, jumlah daya tarik wisata mempengaruhi jumlah PDRB per kapita, jumlah industri kecil dan menengah mempengaruhi angka indeks keparahan kemiskinan (P2), jumlah moda angkutan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, jumlah PDRB per kapita, garis kemiskinan per kapita, nilai indeks gini, dan jumlah rumah sehat, serta jumlah pusat perbelanjaan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

No.	Simpulan Analisis Isi	Simpulan Analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman	Kesimpulan
		<p>(Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_4</math> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_6</math> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_7</math> (Peningkatan Indeks Gini).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_{10}</math> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{13}</math> (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel <math>K_2</math> (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin).</li> </ul>	
2.	<p>Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat dengan memberikan bantuan dana bagi pariwisata yang dikelola desa pekraman atau lembaga tradisional, sehingga mampu mempertahankan kearifan lokal.</p>	-	<p>Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman hal tersebut tidak terlihat.</p>
3.	<p>Daya saing dilakukan oleh pemerintah dengan cara memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata serta produk pariwisata seperti industri kecil yang unggul, sehingga terwujud pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_3</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel <math>K_4</math> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_5</math> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel <math>K_7</math> (Peningkatan Indeks Gini).</li> </ul>	<p>Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai daya saing dibidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mempengaruhi jumlah</p>

No.	Simpulan Analisis Isi	Simpulan Analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman	Kesimpulan
			PDRB per kapita, serta jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi nilai indeks gini di Provinsi Bali.
4.	Peduli (penanaman modal) terlihat dari pendanaan pariwisata yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Pendanaan dalam hal pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengelolaan usaha perhotelan melalui koperasi masyarakat, sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal guna membuka kesempatan kerja.	Hubungan antara variabel P5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai peduli (penanaman modal) terlihat dari pendanaan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali.
5.	Pengelolaan pariwisata diselenggarakan dengan prinsip pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>6</sub> (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>13</sub> (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel K<sub>2</sub> (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin).</li> </ul>	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai pengelolaan pariwisata kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, jumlah daya tarik wisata mempengaruhi jumlah PDRB per Kapita, serta jumlah Pusat perbelanjaan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.
6.	Pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata dilakukan dengan mengalokasikan sebagian dana untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, serta meningkatkan sinergi dan distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>1</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dan variabel K<sub>6</sub> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K<sub>4</sub> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel P<sub>2</sub> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K<sub>6</sub></li> </ul>	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai pengelolaan pendapatan dari adanya pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum mempengaruhi garis kemiskinan per kapita,

No.	Simpulan Analisis Isi	Simpulan Analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman	Kesimpulan
		<p>(Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_3</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel <math>K_4</math> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_3</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel <math>K_4</math> (Peningkatan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_4</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel <math>K_3</math> (Peningkatan Jumlah Pengangguran).</li> </ul>	<p>PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mempengaruhi jumlah PDRB per kapita dan garis kemiskinan per kapita, PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mempengaruhi jumlah PDRB per kapita dan angka indeks keparahan kemiskinan (P2), serta PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan mempengaruhi jumlah pengangguran di Provinsi Bali.</p>
7.	<p>Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari hak, arah kebijakan, serta sasaran pembangunan kepariwisataan yang ingin meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_4</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel <math>K_3</math> (Peningkatan Jumlah Pengangguran).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_5</math> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> </ul>	<p>Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai partisipasi masyarakat dibidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan mempengaruhi jumlah jumlah pengangguran, jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, serta jumlah moda angkutan mempengaruhi jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali.</p>
8.	<p>Dampak (usaha-usaha yang timbul) dari adanya pariwisata adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jasa dan usaha sekala mikro, kecil, dan menengah, (ekonomi kerakyatan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_4</math> (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_6</math> (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_7</math></li> </ul>	<p>Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur dampak (usaha-usaha yang timbul) dari adanya pariwisata, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, jumlah moda angkutan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, jumlah PDRB per Kapita, angka garis kemiskinan per kapita, nilai indeks gini, dan jumlah rumah sehat, serta pusat</p>

No.	Simpulan Analisis Isi	Simpulan Analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman	Kesimpulan
		(Peningkatan Indeks Gini). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_{10}</math> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{13}</math> (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel <math>K_2</math> (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin).</li> </ul>	perbelanjaan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.
9.	Masyarakat di sekitar obyek daya tarik wisata mempunyai hak prioritas, serta diberdayakan (kesempatan kerja) menjadi pekerja maupun pengelola pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_4</math> (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel <math>K_3</math> (Peningkatan Jumlah Pengangguran).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_5</math> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_1</math> (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja).</li> </ul>	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai kesempatan kerja dibidang pariwisata bagi penduduk di Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Provinsi Bali. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan mempengaruhi jumlah pengangguran, jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, serta jumlah moda angkutan mempengaruhi jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali.
10.	Monitor dampak (pengawasan) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, sehingga pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk pengawasan lebih lanjut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_5</math> (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel <math>K_{10}</math> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).</li> <li>• Hubungan antara variabel <math>P_{11}</math> (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel <math>K_{10}</math> (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).</li> </ul>	Hasil analisis kebijakan menunjukkan jika kebijakan di Provinsi Bali sudah mengatur mengenai monitor dampak dari adanya pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dari hasil analisis tabulasi silang dan analisis korelasi spearman bahwa, jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah rumah sehat, serta jumlah moda angkutan mempengaruhi jumlah rumah sehat di Provinsi Bali.

Sumber: hasil analisis 2016

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

